



e ISSN 2614-8935

p ISSN 2615-3815

INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Vol. 15 No. 1, Mei 2018

**Analisis Kemandirian Keuangan Daerah
Studi Kasus: Provinsi Banten Tahun 2011-2015**

(Tarnoto dan Joko Tri Haryanto)

**Faktor yang Mempengaruhi Rumah Tangga untuk Mengakses Lembaga
Keuangan Formal (Studi Kasus Susenas 2015)**

(Tri Achya Ngasuko)

**Determinan Partisipasi Keluarga Berencana Pada Keluarga Pra Sejahtera di
Provinsi Sumatera Selatan: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia**

(Dio Febria, M. Yazid, Nura Malahayati)

**Aspek Inovasi dan Teknologi Dalam Pengembangan Kawasan Danau Toba di
Kabupaten Samosir**

(Anton Parlindungan Sinaga)

Kearifan Lokal Dalam Mendukung Sektor Pariwisata di Kabupaten Samosir

(Dumora Jenny Margaretha Siagian)

**Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei Berbasis Penilaian Kinerja
Lingkungan**

(Nobrya Husni, Esther S. M. Nababan, Delvian)

Diterbitkan oleh :

**Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Sumatera Utara**

Inovasi	Vol. 15	No. 1	Hal. 1 - 63	Medan Mei 2018	e ISSN 2614-8935 p ISSN 2615-3815
---------	---------	-------	----------------	-------------------	--------------------------------------

Terakreditasi sebagai Majalah Berkala Ilmiah
dengan Nomor Akreditasi: 532/AU2/P2MI-LIPI/04/2013



INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Volume 15, Nomor 1

Mei 2018

ISSN 1829-8079

Jurnal INOVASI adalah jurnal ilmiah bidang ilmu politik dan kebijakan yang terakreditasi dengan Nomor Akreditasi: 736/AU3/P2MI-LIPI/04/2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : 329/E/2016 tanggal 24 Maret 2016

Jurnal INOVASI sebagai media litbang Provinsi Sumatera Utara memuat karya tulis ilmiah hasil penelitian atau tinjauan kepustakaan dalam bidang pemerintahan dan kemasarakatan, sosial budaya, ekonomi dan pembangunan, sumberdaya alam dan maritim sebagai bahan kebijakan dan wawasan berpolitik yang terbit dua kali dalam setahun setiap bulan Mei dan Oktober.

Pengarah

Penanggung Jawab

Ketua

Anggota

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Ir. Sugih Prihatin, M.Si

Prof. Dr. Marlon Sihombing MA (*Kebijakan Publik*, Universitas Sumatera Utara)

Zahari Zein, M.Sc., Ph.D (*Lingkungan*, Universitas Sumatera Utara)

Ir. E. Harso Kardhinata, M.Sc (Pertanian, Universitas Sumatera Utara)

H. Makrum Rambe, SE., MM

Erwinsyah, SH., MH

Hendra Dermawan Siregar, STP., M.SP

Drs. H. Darwin Lubis, MM

Sekretariat Redaksi

Dra. Hj. Chandra Leka, MAP

Deni Syahputra, ST

Yanita, SE

Editorial Board

Editor In Chief

Section Editor

Nobrya Husni, ST

Anton Parlindungan Sinaga, ST

Porman Juanda Marpomari Mahulae, ST

Dumora Jenny Margaretha Siagian, ST

Silvia Darina, SP

Sahat C. Simanjuntak, ST

Layouter

Eko Sudrajat, SP

Wahyu Nugroho

Jurnal Manager

Deliyanto, S.Kom

Mitra Bestari Volume 15, Nomor 1, Mei 2018

Dr. Iskandar Muda, SE, M.Si., Ak (*Ekonomi*, Universitas Sumatera Utara)

Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M. Si (*Kesehatan*, Universitas Sumatera Utara)

Dr. Azizul Kholis, SE., M.Si (*Ekonomi Akuntansi*, Universitas Negeri Medan)

Suzanna Eddyono, S.Sos., M.Si., MA (*Sosial*, Universitas Gajah Mada)

Zahari Zein, M.Sc., Ph.D (*Lingkungan*, Universitas Sumatera Utara)

Alamat Penerbit :

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Sisingamangaraja No. 198 Medan 20126

Tel. (061) 7866225; 7883016 - Fax. (061) 7866248

Website : <http://balitbang.sumutprov.go.id>

Email : inovasibpp@gmail.com

PENGANTAR REDAKSI

HORAS.....

Pembaca yang terhormat,

Jurnal INOVASI telah memasuki volume 15 di tahun 2018 dan menjadi edisi yang istimewa. Mulai volume 1 terbitan Mei 2018, Jurnal INOVASI secara resmi menggunakan aplikasi Open Journal System (OJS) dalam pengelolaannya, mulai dari penerimaan naskah hingga penerbitannya. Banyak kendala dan tantangan yang dihadapi redaksi untuk menghadirkan edisi kali ini, salah satunya pemahaman dalam menggunakan aplikasi OJS. Jurnal INOVASI yang telah berbasis OJS diharapkan memperluas cakupan pembaca serta meningkatkan minat para peneliti, dosen, mahasiswa serta para ahli untuk menerbitkan naskah ilmiah.

Jurnal Inovasi edisi Mei 2018 kali ini memuat tulisan dengan tema beragam. Artikel pertama dan kedua mengusung tema keuangan yaitu tentang kemandirian keuangan daerah serta akses rumah tangga terhadap lembaga keuangan formal. Artikel berikutnya menyajikan hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia dari sisi partisipasi program Keluarga Berencana (KB). Dua artikel selanjutnya mengetengahkan topik tentang aspek inovasi dan teknologi pengembangan Kawasan Danau Toba (KDT) serta kearifan lokal dalam mendukung pariwisata khususnya di Kabupaten Samosir. Edisi kali ini ditutup dengan artikel tentang kebijakan pengelolaan KEK Sei Mangkei ditinjau dari indikator lingkungan.

Semoga sajian tulisan kali ini bermanfaat bagi para pembaca serta dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah khususnya Provinsi Sumatera Utara.

Terima kasih dan selamat membaca.

-Dewan Redaksi-



INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Volume 15, Nomor 1

Mei 2018

ISSN 1829-8079

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/dicopy tanpa ijin dan biaya.

DDC 657.8

Tarnoto dan Joko Tri Haryanto

Analisis Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus: Provinsi Banten Tahun 2011-2015)

Inovasi, Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2018, Vol 15, No.1, halaman 1 - 10

Penelitian menjadi penting dikaitkan posisi Provinsi Banten sebagai penyangga ibu kota negara dalam konsep pengembangan megapolitan, dengan tetap membatasi analisis secara kinerja APBD saja. Dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, disimpulkan Provinsi Banten memiliki kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal sangat tinggi. Hanya di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang yang masih berada di level kemandirian sangat rendah. Untuk efektifitas pemungutan PAD maupun Pajak Daerah, efektifitas di seluruh daerah di atas 100%. Artinya efektifitasnya sangat tinggi serta menjadi salah satu yang terbaik secara nasional. Kondisi ini seharusnya dapat dijadikan modal terbesar bagi pemerintah daerah Provinsi Banten sebagai bentuk kearifan lokal yang dapat menjadi alternatif pembentukan modal sosial bagi pembangunan daerah. Modal sosial yang begitu besar ini seharusnya dapat diolah dan dijadikan modal pembangunan daerah ke depannya berpadu dengan pola perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Kata kunci: kinerja keuangan daerah, PAD, kemandirian daerah, desentralisasi fiskal

DDC 332.024

Tri Achya Ngasuko

Faktor yang Mempengaruhi Rumah Tangga untuk Mengakses Lembaga Keuangan Formal (Studi Kasus: Susenas 2015)

Inovasi, Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2018, Vol 15, No.1, halaman 11 - 21

Studi ini adalah yang pertama yang menguji faktor-faktor yang berpengaruh untuk para kepala keluarga mengakses ke layanan keuangan formal, terutama tabungan, berdasarkan Susenas 2015. Hasil penelitian memberikan profil rumah tangga dan faktor yang berpengaruh untuk kepala rumah tangga untuk mengakses lembaga keuangan formal, khususnya tabungan. Analisis data menggunakan model *logit*, diperoleh probabilitas bagi rumah tangga untuk mempunyai tabungan di lembaga formal dipengaruhi secara positif oleh karakteristik demografi seperti usia, jumlah anggota keluarga, tanggungan orang tua kepala keluarga, kepala keluarga laki-laki, pekerjaan formal kepala keluarga, dan kepemilikan kredit para kepala keluarga. Sedangkan banyaknya tanggungan anak-anak, bidang pekerjaan kepala keluarga di sektor pertanian, dan lokasi tempat tinggal di pedesaan berpengaruh negatif terhadap kepemilikan rekening tabungan. Temuan penelitian ini sangat

penting dalam memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan tingkat keuangan inklusif di Indonesia.

Kata kunci: keuangan inklusif, tabungan rumah tangga; Susenas 2015

DDC 363.96

Dio Febria, M. Yazid, Nura Malahayati

Determinan Partisipasi Keluarga Berencana pada Keluarga Pra Sejahtera di Provinsi Sumatera Selatan: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia

Inovasi, Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2018, Vol 15, No.1, halaman 23-31

Penelitian ini merupakan analisis kuantitatif, menggunakan data sekunder dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 dengan metode analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap partisipasi KB pada keluarga pra sejahtera yaitu jumlah anak dan usia suami, dengan nilai koefisien jumlah anak adalah positif yang berarti semakin banyak anak (> 2 anak) maka semakin tinggi peluang istri untuk berpartisipasi KB. Nilai koefisien usia suami adalah negatif yang artinya semakin muda usia suami maka semakin tinggi peluang istri untuk berpartisipasi KB. Sementara variabel lain yaitu: usia istri, pendidikan istri, partisipasi istri dalam bekerja, tempat tinggal, ukuran keluarga ideal, komunikasi suami istri, dan kunjungan petugas KB tidak secara signifikan menentukan tingkat partisipasi KB seorang istri. Pemerintah seharusnya mensosialisasikan program keluarga berencana sejak awal pernikahan, agar keluarga pra sejahtera berpartisipasi KB sebelum memiliki banyak anak. Selain itu, perlu penelitian lebih lanjut terkait efektifitas alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan (pil dan suntik KB) pada keluarga pra sejahtera.

Kata kunci: keluarga berencana, keluarga pra sejahtera, jumlah anak, usia suami

DDC 607.4

Anton Parlindungan Sinaga

Aspek Inovasi dan Teknologi dalam Pengembangan Kawasan Danau Toba di Kabupaten Samosir

Inovasi, Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2018, Vol 15, No.1, halaman 33 - 47

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis inovasi, teknologi, dan sarana prasarana yang dibutuhkan Kabupaten Samosir dalam mendukung pengembangan pariwisata. Pengambilan data menggunakan metode wawancara dengan penyebaran kuisioner pada populasi sampel. Sampel penelitian terdiri dari: wisatawan, penduduk setempat, pelaku usaha, pemerintah daerah dan stakeholders terkait. Dari hasil

penelitian diperoleh untuk Kabupaten Samosir dibutuhkan inovasi sosial, inovasi dan teknologi pengolahan air Danau Toba, inovasi dan teknologi IPAL, inovasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan, inovasi infrastruktur (homestay), inovasi kuliner, inovasi produk tenun ulos, inovasi dan teknologi pengolahan kopi, kacang dan bawang, inovasi transportasi air, inovasi harga, inovasi pengelolaan cagar budaya, inovasi koordinasi kolaboratif, inovasi infrastruktur (rambu-rambu wisata), inovasi dan teknologi pengolahan daging kerbau, serta inovasi toilet yang berstandar internasional.

Kata kunci: pariwisata, Danau Toba, Kabupaten Samosir, inovasi

DDC 306.4

Dumora Jenny Margaretha Siagian

Kearifan Lokal Batak Toba dalam Mendukung Sektor Pariwisata di Kabupaten Samosir

Inovasi, Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2018, Vol 15, No.1, halaman 49 - 55

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menjelaskan secara deskriptif kearifan lokal masyarakat Batak Toba yang dapat dibangun kembali untuk menarik wisatawan berkunjung ke pulau Samosir. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta penelusuran dokumen dan hasil penelitian terdahulu. Analisa dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian adalah bahwa kearifan lokal Batak Toba menjadi potensi penting dalam membentuk karakter orang Batak yang bisa bergaul dan bersosialisasi dengan wisatawan. Sehingga para wisatawan dapat nyaman berada di tengah – tengah masyarakat adat. Sehingga kearifan lokal perlu dihidupkan dan diberdayakan kembali, selain untuk menyambut wisatawan, juga untuk melestarikan kearifan lokal yang telah diajarkan nenek moyang untuk dipedomani oleh generasi-generasi berikutnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sekitar objek wisata. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya koordinasi antara pemerintah dan pemuka adat dalam meng-inventarisasi, me-revitalisasi dan mengembangkan kearifan lokal bagi pelajar di sekolah dan masyarakat di sekitar objek wisata yang dapat mendukung sektor pariwisata.

Kata kunci: kearifan lokal, budaya, Batak Toba, pariwisata, Samosir

DDC 628

Nobrya Husni

Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei Berbasis Penilaian Kinerja Lingkungan

Inovasi, Jurnal Politik dan Kebijakan, Mei 2018, Vol 15, No.1, halaman 57 - 63

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pengelola dan penyewa terhadap penilaian kinerja lingkungan terutama dari aspek lingkungan, serta menganalisis kesiapan KEK Sei Mangkei dalam melakukan penilaian kinerja lingkungan dari aspek lingkungan. Penelitian dilakukan dengan metode survey dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner. Analisis data dilakukan secara kuantitatif deskriptif dan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengelola dan tenant pada KEK Sei Mangkei memiliki pemahaman sedang – baik terhadap konsep penilaian kinerja lingkungan berdasarkan ISO 14031.

Kata kunci: kawasan ekonomi khusus, kelapa sawit, ISO 14031, indikator lingkungan



INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Volume 15, No. 1

May 2018

ISSN 1829-8079

The discriptors given are keywords. The abstrack sheet may by reproduced/ copied without permission or charge

DDC 657.8

Tarnoto dan Joko Tri Haryanto

Analysis of Regional Financial Independency (Case Study: Banten Province 2011-2015)

Inovasi, Journal of Politics and Policy, May 2018, Vol 15, No.1, p.1 - 10

This research is important to associate with Banten Province position as a buffer of the state capital in megapolitan development concept, while limiting only from Local Budget performance analysis. Using the ratio of regional financial independence, the conclusion is Banten Province has regional financial independency as well as very high on the the degree of fiscal decentralization. Only in Lebak District, Pandeglang District and Serang Municipal are still at very low level of independency. For the effectiveness of local own resources as well as local taxes, effectiveness in all regions is above 100%. This means that the effectiveness is very high and become one of the best in national level. This condition should be the best opportunity for the Banten provincial government as a form of local wisdom as an alternative formation of social capital for regional development. This enormous social capital should be able to process and use as regional development capital in the future combined with an integrated development planning pattern.

Keywords: regional financial performance, local own resources, regional independency, fiscal decentralization

DDC 332.024

Tri Achya Ngasuko

Determinant Factor for Household to Access Formal Financial Institution (Case Study: Susenas 2015)

Inovasi, Journal of Politics and Policy, May 2018, Vol 15, No.1, p.11 - 21

This study is the first to examine influencing factors for heads of households accessing formal financial services, particularly savings, based on Susenas 2015. The results of this study provide household profiles and influencing factors for heads of households to access formal financial institutions, especially savings. Using the logit model, the probability for households to have savings in formal institutions is positively influenced by demographic characteristics such as age, number of family members, dependents of family head parents, male family heads, formal employment of heads of households, and credit ownership head of family. While the number of dependents of children, the field of work of the head of the family in the agricultural sector, and location of head of household in rural area negatively affect the ownership of savings accounts. The findings of this research are crucial in providing policy recommendations to improve the level of inclusive finance in Indonesia.

Keywords: financial inclusion, household saving, Susenas 2015

DDC 363.96

Dio Febria, M. Yazid, Nura Malahayati

Determinant of Family Planning Participation of Pre-prosperous Family in South Sumatera Province: Demographic and Health Survey Indonesia)

Inovasi, Journal of Politics and Policy, May 2018, Vol 15, No.1, p. 23 - 31

The research is a quantitative analysis using secondary data from Demographic and Health Survey (DHS) of Indonesia 2012, analysed by logistic regression. The result shows that two variables significantly affecting FP participation rate are the number of children and age of the husband. The number of children is a positive coefficient meaning that number of children (> 2 children), the higher probability of a wife to participate in family planning. Age of husband is a negative coefficient meaning that the younger the husband's age, the higher probability of a wife to participate in family planning. In contrast, other variables, namely: age of wife, education of wife, wife's participation in work, residence, size of the ideal family, communication between wife and husband, and number of visits of FP officer do not significantly affect the FP participation rate of wife. Government should socialize FP program for early stage of marriage, so that the pre-prosperous family would participate in the FP program before they have many children. In addition, further research is needed on the effectiveness of the most used contraception (pill and contraceptive injection) on the pre-prosperous family.

Keywords: family planning, pre-prosperous family, number of children, age of husband

DDC 607.4

Anton Parlindungan Sinaga

Aspect Innovation and Technology in Regency of Samosir on The Development of The Toba Lake Zone

Inovasi, Journal of Politics and Policy, May 2018, Vol 15, No.1, p.33 - 47

This study aims to analyze the types of innovation, technology, and infrastructure needed by Samosir Regency in supporting tourism development. Data collection using interview method with questionnaires distribution in sample population. The study sample consisted of: tourists, local people, business actors, local government and related stakeholders. From the research results obtained for Samosir District needed social innovation, innovation and water treatment technology of Lake Toba, innovation and technology of WWTP, policy innovation and governance, innovation infrastructure (homestay), culinary innovation, ulos weaving product innovation, , beans and onions,

water transport innovations, price innovations, cultural heritage management innovations, collaborative coordination innovations, infrastructure innovations, buffalo meat processing innovations and technologies, and innovation of international standard toilets.

Keyword: tourism, Lake Toba, Samosir District, innovation

DDC 306.4

Dumora Jenny Margaretha Siagian

Local Wisdom of Batak Toba on Supporting Tourism Sector in Regency of Samosir

Inovasi, Journal of Politics and Policy, May 2018, Vol 15, No.1, p. 49 - 55

This research is a qualitative research which describes descriptively local wisdom of Toba Batak society that can be rebuilt to attract tourists to visit Samosir Island. Data collection is done through observation, interview, and trace of documents and previous research results. The analysis is done descriptively. The result of research is that Batak Toba local wisdom becomes an important potential in shaping the character of Batak people who can socialize with tourists. So that the tourists can be comfortable in the midst of indigenous peoples. So local wisdom needs to be revived and re-empowered, in addition to welcoming tourists, as well as to preserve the local wisdom that the ancestors have taught to be guided by the next generations. This can be done through education and socialization to schools and community groups around the tourist attraction. Recommendations that can be given are the need for coordination between government and traditional leaders in inventoring, revitalizing and developing local wisdom for students in schools and communities around tourism objects that can support the tourism sector.

Keywords: *local wisdom; culture; Batak Toba; tourism; Samosir*

DDC 628

Nobrya Husni

Management of Special Economic Zones Sei Mangkei Based on Environmental Performance Assessment)

Inovasi, Journal of Politics and Policy, May 2018, Vol 15, No.1, p. 57 - 63

This study aims to determine the understanding of managers and tenants on the assessment of environmental performance, especially from environmental aspects, and analyzing SEZ Sei Mangkei's readiness in conducting environmental performance assessment from environmental aspect. The research was conducted by survey method with data collection technique through interview and questionnaire. Data analysis is done quantitatively descriptive and qualitative. Based on the result of the research, it is concluded that the managers and tenants of KEK Sei Mangkei have good understanding on the concept of environmental performance assessment based on ISO 14031. on the concept of environmental performance assessment based on ISO 14031.

Keywords: *special economic zone, oil palm, ISO 14031, environment indicators*



INOVASI

JURNAL POLITIK DAN KEBIJAKAN

Volume 15, Nomor 1

MEI 2018

ISSN 1829-8079

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
✎ Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Studi Kasus: Provinsi Banten Tahun 2011-2015 <i>(Tarnoto dan Joko Tri Haryanto)</i>	1 - 10
✎ Faktor yang Mempengaruhi Rumah Tangga untuk Mengakses Lembaga Keuangan Formal (Studi Kasus Susenas 2015) <i>(Tri Achya Ngasuko)</i>	11 - 21
✎ Determinan Partisipasi Keluarga Berencana Pada Keluarga Pra Sejahtera di Provinsi Sumatera Selatan: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia <i>(Dio Febria, M. Yazid, Nura Malahayati)</i>	23 - 31
✎ Aspek Inovasi dan Teknologi Dalam Pengembangan Kawasan Danau Toba di Kabupaten Samosir <i>(Anton Parlindungan Sinaga)</i>	33 - 47
✎ Kearifan Lokal Dalam Mendukung Sektor Pariwisata di Kabupaten Samosir <i>(Dumora Jenny Margaretha Siagian)</i>	49 - 55
✎ Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei Berbasis Penilaian Kinerja Lingkungan <i>(Nobrya Husni, Esther S. M. Nababan, Delvian)</i>	57 - 63

Hasil Penelitian

ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH STUDI KASUS: PROVINSI BANTEN TAHUN 2011-2015

(ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL INDEPENDENCY CASE STUDY : BANTEN PROVINCE 2011-2015)

Tarnoto, Joko Tri Haryanto***

*Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
Jl. Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat, 10710.

**Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Jl. Dr. Wahidin Raya, Jakarta Pusat, 10710.
Email: jtharyanto@fiskal.kemenkeu.go.id

Diterima: 17 Maret 2018; Direvisi: 02 April 2018; Disetujui: 18 April 2018

ABSTRAK

Desentralisasi dijalankan bertujuan untuk memotong rantai birokrasi pelayanan publik sekaligus mengupayakan terciptanya aspek kemandirian. Salah satu kebijakannya melalui pemekaran daerah termasuk Provinsi Banten. Sayangnya, pemekaran daerah justru identik dengan hal negatif khususnya terkait kinerja keuangan daerah. Untuk itulah, penelitian ini dilakukan demi mendapatkan gambaran kinerja keuangan daerah Provinsi Banten 2011-2015. Penelitian menjadi penting dikaitkan posisi Provinsi Banten sebagai penyangga ibu kota negara dalam konsep pengembangan megapolitan, dengan tetap membatasi analisis secara kinerja APBD saja. Dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, disimpulkan Provinsi Banten memiliki kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi fiskal sangat tinggi. Hanya di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang yang masih berada di level kemandirian sangat rendah. Untuk efektifitas pemungutan PAD maupun Pajak Daerah, efektifitas di seluruh daerah di atas 100%. Artinya efektifitasnya sangat tinggi serta menjadi salah satu yang terbaik secara nasional. Kondisi ini seharusnya dapat dijadikan modal terbesar bagi pemerintah daerah Provinsi Banten sebagai bentuk kearifan lokal yang dapat menjadi alternatif pembentukan modal sosial bagi pembangunan daerah. Modal sosial yang begitu besar ini seharusnya dapat diolah dan dijadikan modal pembangunan daerah ke depannya berpadu dengan pola perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Kata kunci: kinerja keuangan daerah, PAD, kemandirian daerah, desentralisasi fiskal

ABSTRACT

Decentralization is aimed to cut off the bureaucratic chains of public services while at the same time seeking for an independency aspect. One of its policies through regional expansion includes Banten Province. Unfortunately, the expansion of regions is actually synonymous with negative things, especially related to regional financial performance. For this reason, this research is conducted to get an overview of financial performance of Banten Province 2011-2015. This research is important to associate with Banten Province position as a buffer of the state capital in megapolitan development concept, while limiting only from Local Budget performance analysis. Using the ratio of regional financial independence, the conclusion is Banten Province has regional financial independency as well as very high on the the degree of fiscal decentralization. Only in Lebak District, Pandeglang District and Serang Municipal are still at very low level of independency. For the effectiveness of local own resources as well as local taxes, effectiveness in all regions is above 100%. This means that the effectiveness is very high and become one of the best in national level. This condition should be the best opportunity for the Banten provincial government as a form of local wisdom as an alternative formation of social capital for regional development. This enormous social capital should be able to process and use as regional development capital in the future combined with an integrated development planning pattern.

Keywords: regional financial performance, local own resources, regional independency, fiscal decentralization

PENDAHULUAN

Berdasarkan penelitian oleh Swandewi (2014) Indonesia telah menjalankan praktek desentralisasi fiskal sejak Orde Lama, yang kemudian diperbarui dengan revisi Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah serta UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pengesahan kedua UU tersebut juga menjadi solusi bagi pemerintah dalam meredam berbagai gejala dis-integrasi bangsa seiring dengan munculnya bencana krisis ekonomi moneter tahun 1998 (Rinaldi, 2012). Munculnya bahaya disintegrasi bangsa di periode tersebut sejatinya merupakan akumulasi dari berbagai bentuk disparitas antar daerah yang justru muncul seiring pelaksanaan desentralisasi fiskal periode Orde Baru. Dengan demikian, bentuk desentralisasi semu yang diimplementasikan oleh pemerintah ternyata justru bertransformasi menjadi wajah sentralisasi (Kharisma, 2013).

Sentralisasi berbagai kebijakan serta kuatnya dominasi pemerintah pada periode tersebut, di sisi lain juga menimbulkan pola ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap Pemerintah Pusat. Bahkan oleh Shah, 1994 dalam Hamid, 2005, fenomena ini disebut sebagai bentuk ketimpangan fiskal vertikal tinggi. Kombinasi antara disparitas yang semakin melebar dengan berbagai persoalan lainnya terakumulasi menyebabkan munculnya ketimpangan pertumbuhan dan pembangunan daerah (Solihin & Ajeng Lestari, 2010). Dua permasalahan mendasar yang berkembang kemudian adalah: a) Pemerintah Pusat telah menetapkan jenis-jenis bantuan yang menurut Pemerintah akan bermanfaat bagi Daerah, meski faktanya Daerah justru merasa tidak membutuhkan bantuan tersebut; b) Pemerintah Pusat melakukan alokasi berdasarkan beberapa kriteria dan indikator tertentu untuk setiap jenis bantuan tersebut (Wahyuni & Priyo Hari Adi, 2009).

Reformasi pelaksanaan desentralisasi tersebut kemudian terus diperbaiki melalui revisi berikutnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut telah dijadikan sebagai aturan umum dalam implementasi kebijakan otonomi daerah di seluruh Indonesia. Jika dikembalikan kepada semangat awal pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah berupaya untuk memotong rantai birokrasi pelayanan publik sekaligus mengupayakan

terciptanya aspek kemandirian di masing-masing daerah (Tjahjono & Rika Oktaviani, 2016). Semangat reformasi tersebut oleh Simanjuntak (2015) disebut sebagai lompatan tajam yang mengubah sejarah pelaksanaan hubungan politik dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang harus didukung dengan segala ketulusan hati dan *political will* dari pemerintah (Laedy, 2016).

Pemotongan rantai birokrasi juga ditempuh melalui konsolidasi dan pemekaran daerah jika memang dirasakan rentang pelayanan tersebut terlalu jauh. Tak heran jika di era desentralisasi fiskal, pemekaran daerah kemudian menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan. Terlebih mempertimbangkan berbagai kondisi geografis Indonesia yang memang dirasa terlalu sulit untuk menjalankan mekanisme pelayanan publik yang tersentral (Wurangin, dkk, 2017). Namun sayangnya, filosofi utama pemekaran tersebut sepertinya tidak terlalu dipahami oleh pemangku kepentingan di daerah. Yang terpikirkan dengan pelaksanaan pemekaran daerah adalah upaya membagi-bagi kue kekuasaan secara primordial. Akibatnya selama beberapa tahun terakhir ini, pemekaran daerah secara besar-besaran kemudian menimbulkan kritik dan kecemasan berbagai pihak.

Meskipun sebetulnya tidak semua pemekaran kemudian bernada negatif, seperti contoh kasus terbaik upaya pemekaran yang positif adalah pembentukan Provinsi Banten. Provinsi Banten resmi menjadi sebuah provinsi ke-30 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak tahun 2000, dibentuk melalui UU Nomor 23 tahun 2000. Sebelumnya, daerah Banten merupakan keresidenan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Merujuk kepada UU Nomor 23 Tahun 2000 tersebut, tujuan pembentukan Provinsi Banten adalah : 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimasa yang akan datang; 2) Mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Beberapa pihak kemudian mengusulkan adanya indikator keberhasilan sebuah daerah pemekaran dalam menjalankan misi desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Regulasi yang ada pun juga mengamanatkan adanya kewajiban mengevaluasi kinerja daerah pemekaran khususnya dalam periode lima tahun pertama. Jika dianggap bagus, maka daerah

tersebut layak untuk terus dijalankan, sebaliknya jika indikatornya justru memperlihatkan sinyal buruk maka wajib untuk demerger kembali. Oleh Halim, 2002, indikator dan kriteria ini kemudian diterjemahkan kembali menjadi : a) kemampuan keuangan daerah yang artinya daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah; b) ketergantungan kepada bantuan Pemerintah Pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Dalam rangka menjaga pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah kemudian dituntut untuk memiliki kinerja keuangan daerah yang lebih handal agar tidak lagi bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat melalui mekanisme transfer ke daerah. Namun demikian, sekiranya mekanisme transfer ke daerah tersebut tetap diperlukan meskipun aspek kemandirian keuangan daerah sudah muncul dan masing-masing memiliki independensi yang tinggi. Transfer ke daerah tersebut masih tetap diperlukan untuk mengakselerasi pelaksanaan pembangunan di daerah khususnya kebutuhan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan maka daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas melakukan investasi pembangunan jangka panjang, dan sebagainya.

Analisis terkait Provinsi Banten menjadi sangat menarik ke depannya jika dikaitkan dengan proyeksi kemampuan dan kapasitas Provinsi Banten di dalam memainkan perannya sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota. Dalam konsep pembangunan megapolitan, keberhasilan daerah-daerah penyangga dalam menjalankan pembangunan daerahnya dianggap menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan nasional. Penelitian ini akan melihat secara lebih mendalam kajian mengenai analisis kemandirian dan kinerja keuangan daerah di Provinsi Banten tahun 2011-2015.

Merujuk kepada Tabel 1, terlihat bahwa realisasi penerimaan PAD se-Provinsi Banten di dalam APBD nya tidak memperlihatkan tren kenaikan secara signifikan dari tahun 2011-2015. Pada tahun 2014 dan 2015 realiasi PAD Provinsi Banten baru dapat melebihi realisasi komponen dana perimbangan. Hipotesis awal yang muncul adalah Provinsi Banten masih mengalami banyak kendala dalam mewujudkan

kemandirian daerahnya serta bergantung kepada bantuan Pemerintah Pusat, khususnya pada periode awal paska pemekaran. Padahal seperti dijelaskan di awal pembahasan bahwa peranan Provinsi Banten sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota menjadi sangat penting. Keberhasilan menciptakan kemandirian daerah di Provinsi Banten menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Beberapa pertanyaan penelitian yang diusulkan dalam kajian ini diantaranya: a) Bagaimana kemandirian keuangan daerah se-Provinsi Banten dalam membiayai pembangunan dinilai dari rasio kemandirian daerah; b) Bagaimana kemampuan pemerintah se-Provinsi Banten dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal ditinjau dari rasio derajat desentralisasi fiskal; c) Bagaimana efektifitas PAD pemerintah se-Provinsi Banten dalam merealisasikan PAD; dan, d) Bagaimana efektifitas pajak daerah se-Provinsi Banten dalam merealisasikan pendapatan pajak daerah.

Beberapa penelitian dapat menggambarkan analisis kemampuan keuangan daerah. Namun demikian, menurut Tamboto, (2014) penggunaan analisis rasio kemampuan keuangan pada sektor publik masih belum terlalu familiar. Belum ada kesepakatan yang menyeluruh dan bersifat final terkait penggunaan indikator-indikator penjelasnya. Satu hal yang perlu dipahami bahwa seluruh indikator dan pendekatan tersebut pada intinya bertujuan untuk meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Beberapa teknik analisis yang dapat digunakan antara lain: mengitung rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, derajat desentralisasi fiskal, rasio efektifitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio efektifitas pajak daerah, rasio efisiensi pajak daerah, derajat kontribusi BUMD, rasio kemampuan mengembalikan pinjaman, rasio pendapatan terhadap hutang (Mahmudi, 2010).

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 1 ayat 5 PP No. 58 Tahun 2005). Keuangan daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain

sesuai ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku (Nurhemi & Guruh Suryani, 2015).

Tabel 1. Realisasi APBD se-Provinsi Banten Tahun 2011-2015

Komponen	2011	2012	2013	2014	2015
Pendapatan Daerah	14,604.8	17,914.2	21,019.2	27,944.5	26,650.5
Pendapatan Asli Daerah	5,142.4	6,271.4	7,873.6	10,112.3	11,260.0
Dana Perimbangan	6,665.7	8,170.5	9,071.3	9,179.7	9,046.2
Lain-lain PAD yang Sah	2,796.7	3,472.3	4,074.3	8,652.5	6,344.3
Belanja Daerah	13,922.5	17,282.4	19,794.6	25,937.7	26,983.4
Belanja Pegawai	5,659.7	6,401.0	7,166.4	7,788.3	8,209.3
Belanja Barang dan Jasa	3,045.5	3,421.6	4,295.5	5,382.1	6,847.0
Belanja Modal	2,862.8	4,026.1	4,715.1	8,653.7	6,363.9
Belanja Lainnya ***	2,354.5	3,433.7	3,617.6	4,113.6	5,563.1
Surplus/Defisit	682.3	631.8	1,224.6	2,006.9	-332.8

Sumber: Kemenkeu, 2016

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Halim dan Damayanti, 2007). Pengelolaan keuangan daerah menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*. Transparansi merupakan wujud adanya keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Prinsip akuntabilitas terkait dengan pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat (Sambow, dkk, 2016). Pengelolaan keuangan daerah diperlukan agar terwujud tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel diperlukan suatu proses pengawasan dan pengendalian pengelolaan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan utamanya terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (Yuwono, 2008).

Penelitian yang mengkaji tentang Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada Kota Manado dan Kota Bitung tahun 2008-2012) dengan menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio IKR, rasio pertumbuhan dan rasio keserasian. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dari berbagai analisis menggunakan rasio-rasio tersebut, kemampuan Kota Manado dan Kota Bitung masih tergolong kurang mampu dalam pembiayaan pengeluaran rutin yang dilakukan, sekaligus mengindikasikan adanya

ketergantungan pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat (Rahman, dkk, 2014).

Penelitian lainnya oleh Albasiah (2013) mengenai Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi: Studi Kasus Kota Malang tahun 2007-2011. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas serta rasio pertumbuhan. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kota Malang terus membaik. Perspektif yang hampir sama diperoleh dari hasil penelitian Fambayun (2013) tentang Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Magetan 2009-2013. Penelitian ini menggunakan alat analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas serta rasio pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kinerja pengelolaan keuangan dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Magetan berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik dengan rasio kemandirian rata-rata 6,84 persen sementara rasio efektivitas rata-rata 120,62 persen serta rasio efisiensi 2,40 persen. Berdasarkan analisis rasio aktivitas, terlihat pemerintah masih memprioritaskan alokasi anggaran yang bersifat rutin operasional dibandingkan belanja-belanja pembangunan, meskipun tetap berdampak positif bagi perekonomian di Kabupaten Magetan.

Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal juga dipengaruhi bagaimana cara daerah menyikapinya. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian Bandiyah (2015) terkait dengan hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Kota

Denpasar sebelum dan sesudah otonomi daerah. Sebelum pelaksanaan desentralisasi fiskal, Pemerintah Kota Denpasar sudah melakukan kesiapan dan berkemampuan dalam merealisasikan bentuk dan kerja dan desentralisasi fiskal itu sendiri sehingga PAD nya dapat terus dioptimalkan. Selain itu pelaksanaan desentralisasi fiskal justru dimanfaatkan juga sebagai sarana memperkenalkan daerah sebagai pusat perdagangan dan investasi khususnya jasa pariwisata.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kumorotomo (2008) yang menekankan perlunya inisiatif dan inovasi daerah dalam menyikapi pelaksanaan desentralisasi fiskal. Beberapa cara dan langkah inisiatif serta inovasi yang dimaksudkan diantaranya upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang wajib pajak melalui pembentukan tim ekstensifikasi dan intensifikasi PAD sekaligus memberikan penghargaan kepada wajib pajak terbaik. Hal positif lainnya yang dapat dilaksanakan oleh daerah dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah adalah meningkatkan *public awareness* dan juga mekanisme pengawasan seluruh pihak yang terkait terhadap kualitas pelaksanaan penganggaran publik di daerah (Noordiawan dan Hertanti, 2010).

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang berusaha memecahkan masalah yang ada berdasarkan dengan menyajikan data dan menganalisis serta menginterpretasikannya (Surakhmad, 2005). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berdasarkan laporan realisasi APBD runtun waktu periode 2011-2015. Sumber resmi data realisasi APBD tersebut didapatkan dari Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Adapun lokus penelitian yang dipilih adalah Provinsi Banten dengan mempertimbangkan beberapa aspek baik keterwakilan daerah pemekaran serta pentingnya posisi Provinsi Banten sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota negara dalam konsep pengembangan daerah berbasis megapolitan. Sumber data sekunder selain didapatkan dari instansi pemerintah resmi, juga diperoleh dari berbagai literatur baik buku resmi pegangan umum maupun berbagai jurnal lainnya sebagai referensi utama.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan di dalam beberapa indikator dan rasio-rasio kuantitatif yang terdiri dari:

- 1) **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah:** Rasio yang menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dihitung dengan rumus (Halim, 2004) :

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Transfer Pem Pusat + Prov}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan analisis menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah tersebut, Halim, 2004 kemudian mengkategorikan daerah-daerah kedalam beberapa kelompok seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengelompokkan Daerah dan Pola Hubungan

Rasio Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0-25	Rendah Sekali	Instruktif
25-50	Rendah	Konsultatif
50-75	Sedang	Partisipatif
75-100	Tinggi	Delegatif

Sumber: Halim (2004)

Berdasarkan klasifikasi tersebut, pola hubungan yang terbentuk dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah; b) *Konsultatif* yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi; c) *Partisipatif* yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi; dan, d) *Delegatif* yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

- 2) **Derajat Desentralisasi Fiskal:** Indikator ini digunakan untuk menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Artinya semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal. Rasio ini dirumuskan (Mahmudi, 2010) :

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Berdasarkan klasifikasi tersebut, pola hubungan yang terbentuk dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah; b) *Konsultatif*

yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi; c) *Partisipatif* yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi; dan, d) *Delegatif* yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

3) **Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Indikator efektivitas PAD ini merupakan rasio antara realisasi PAD dengan target PAD yang dianggarkan di dalam APBD. Menurut Bhinadi (2003), rasio ini disebut juga sebagai Tingkat Pencapaian Target PAD.

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan klasifikasi yang disusun oleh Mahmudi, 2010, beberapa pola hubungan yang terbentuk di daerah dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Tidak efektif jika tingkat pencapaian kurang dari 75; b) Kurang efektif apabila tingkat pencapaian sekitar 75-89; c) Cukup efektif dengan realisasi pencapaian 90-99; d) Kurang efektif dengan realisasi 100; dan, d) Sangat efektif jika realisasi melebihi 100.

Tabel 3. Klasifikasi Efektivitas PAD

Nilai Efektivitas	Tingkat Pencapaian
< 75	Tidak efektif
75-89	Kurang efektif
90-99	Cukup efektif
100	Kurang efektif
> 100	Sangat efektif

Sumber: Mahmudi (2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil analisis kemandirian keuangan daerah-daerah di Provinsi Banten dari tahun 2011-2015, secara umum dapat dikatakan sudah memiliki aspek kemandirian yang relatif memuaskan. Beberapa daerah bahkan sudah termasuk dalam kategori daerah dengan kemandirian besar dan pola hubungannya bersifat partisipatif. Maka daerah-daerah tersebut memiliki kebebasan di dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Yang termasuk ke dalam kelompok daerah dengan kemandirian besar diantaranya: Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang serta Kota Tangerang Selatan. Dilihat dari kontribusi secara sektoral, daerah-daerah yang memiliki

pola hubungan partisipatif serta aspek kemandirian daerahnya tinggi, biasanya memiliki basis perekonomian di sektor perdagangan dan jasa, meski kontribusi sektor pertaniannya juga masih relatif tinggi khususnya di Kabupaten Tangerang seperti pada Tabel 4.

Sektor pertanian tetap terjaga dengan dukungan oleh pertumbuhan industri dan perdagangan yang dominan melalui pembangunan beberapa sentra kawasan industri terpadu. Peran swasta juga berkembang sangat pesat di daerah-daerah ini. Pola hubungan kerjasama pemerintah dan swasta yang berkembang ini pada gilirannya akan menciptakan dampak penyediaan infrastruktur yang handal yang pada akhirnya dapat memberikan efek berantai bagi pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi regional. Untuk daerah-daerah yang sudah memiliki pola kerjasama pemerintah dan swasta yang maju, peran pemerintah sudah bergeser bukan sebagai motor utama pembangunan namun justru lebih bersifat penyedia regulasi dan menjaga aturan main yang adil bagi pelaku usaha non-pemerintah.

Khusus untuk Provinsi Banten, kemandirian daerah yang diciptakan selama 2011-2015 memiliki pertumbuhan yang luar biasa sehingga mampu membentuk pola hubungan pemerintah yang bersifat delegatif. Sama seperti halnya yang terjadi di kabupaten atau kota, kemandirian provinsi yang begitu besar juga didorong oleh pembentukan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan swasta sekaligus pembentukan pola industrialisasi di beberapa wilayah. Tak lupa peran dan dukungan pajak-pajak provinsi yang rata-rata memberikan kontribusi secara signifikan kepada kas daerah baik melalui pos Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) maupun Pajak Bahan Bakar (PBB-KB).

Menariknya adalah Kabupaten Serang yang berada dikelas menengah atau sedang dilihat dari aspek kemandirian daerahnya. Kelas menengah atau sedang yang terjadi di Kabupaten Serang harus dimaknai sebagai peluang untuk dapat naik kelas menjadi tinggi dan partisipatif dengan pola kebijakan pemerintah daerah yang selaras dan mendukung pembangunan. Atau justru dapat turun ke kelas rendah dan instruktif jika pemerintah daerahnya justru tidak mampu memainkan peran yang diharapkan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Namun masih banyak tugas untuk lebih memajukan Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang yang secara rata-

rata masih berada di level kemandirian daerah sangat rendah dan bergantung kepada alokasi bantuan pemerintah pusat sepenuhnya. Dilihat dari konstruksi pembentukan sektoral ekonomi, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang memang masih bergantung kepada produk dasar agraris seperti pertanian dan perkebunan skala kecil menengah. Peran swasta juga masih sangat minim di kedua wilayah

tersebut sehingga penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan sebagai pemacu utama laju pembangunan masih sangat minim. Kondisi ini membutuhkan perhatian yang ekstra dari Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat bagaimana berbagai bantuan dan alokasi Transfer ke Daerah agar dapat lebih diprioritaskan kepada kedua daerah ini.

Tabel 4. Analisis Kemandirian Keuangan Provinsi Banten 2011-2015

Daerah	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata
Prov Banten	340,9 delegatif	334,5 delegatif	365,2 delegatif	422,4 delegatif	509,1 delegatif	394,0 delegatif
Kab. Lebak	10,0 instruktif	12,4 instruktif	11,8 instruktif	18,3 instruktif	20,2 instruktif	14,6 instruktif
Kab. Pandeglang	6,1 instruktif	4,8 instruktif	6,4 instruktif	10,2 instruktif	11,8 instruktif	7,9 instruktif
Kab. Serang	26,4 konsultatif	24,8 instruktif	37,6 konsultatif	37,4 konsultatif	46,0 konsultatif	34,4 konsultatif
Kab. Tangerang	53,9 partisipatif	51,2 partisipatif	67,6 partisipatif	83,8 delegatif	92,6 delegatif	69,8 partisipatif
Kota Cilegon	52,0 partisipatif	53,3 partisipatif	41,7 konsultatif	66,9 partisipatif	82,1 delegatif	59,2 partisipatif
Kota Tangerang	45,8 konsultatif	46,1 konsultatif	53,9 partisipatif	82,4 delegatif	88,3 delegatif	63,3 partisipatif
Kota Serang	8,5 instruktif	9,1 instruktif	9,8 instruktif	5,1 instruktif	13,0 instruktif	9,1 instruktif
Kota Tangsel	47,1 konsultatif	57,8 partisipatif	66,1 partisipatif	92,2 delegatif	102,9 delegatif	73,2 partisipatif

Sumber: Data Penelitian diolah (2017)

Tabel 5. Analisis Derajat Desentralisasi

Daerah	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata
Prov Banten	77,1 sgt tinggi	62,7 sgt tinggi	66,1 sgt tinggi	69,3 sgt tinggi	67,9 sgt tinggi	68,6 sgt tinggi
Kab. Lebak	7,9 sgt rendah	9,9 sgt rendah	9,2 sgt rendah	13,6 rendah	13,5 rendah	10,1 rendah
Kab. Pandeglang	4,6 sgt rendah	4,0 sgt rendah	5,2 sgt rendah	8,0 sgt rendah	8,0 sgt rendah	6,0 sgt rendah
Kab. Serang	16,4 rendah	17,1 rendah	23,6 sedang	23,1 sedang	25,2 sedang	21,1 sedang
Kab. Tangerang	29,9 sedang	31,6 cukup	35,2 cukup	42,6 tinggi	43,8 tinggi	36,6 cukup
Kota Cilegon	29,5 sedang	28,9 cukup	26,6 sedang	35,9 cukup	41,1 tinggi	33,0 cukup
Kota Tangerang	27,1 sedang	7,6 sedang	31,9 cukup	41,7 tinggi	43,6 tinggi	34,6 cukup
Kota Serang	6,0 sgt rendah	33,9 sgt rendah	7,5 sgt rendah	3,9 sgt rendah	10,0 rendah	7,0 rendah
Kota Tangsel	28,4 sedang	57,8 cukup	36,1 cukup	16,2 rendah	50,5 sgt tinggi	33,0 cukup

Sumber: Data Penelitian diolah (2017)

Derajat Desentralisasi Fiskal. Penciptaan pola hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang digambarkan melalui kemandirian keuangan daerah juga terefleksikan ke dalam derajat desentralisasi fiskal. Provinsi Banten yang memiliki kemandirian daerah sangat tinggi secara otomatis memiliki derajat desentralisasi fiskal yang juga sangat tinggi selama 2011-2015. Sementara Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon,

Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang memiliki derajat desentralisasi fiskal yang cukup. Ke depannya keempat daerah ini tentu wajib terus meningkatkan derajatnya hingga mencapai derajat desentralisasi fiskal yang tinggi. Untuk Pemerintah Banten dan juga empat daerah dengan derajat desentralisasi fiskal cukup, peran pemerintah lebih kepada regulator dan menciptakan aturan main yang adil kepada seluruh pelaku pembangunan non pemerintah.

Tabel 6. Efektivitas PAD

Daerah	2011	2012	2013	2014	2015	Rerata
Prov Banten	139,3 sgt efektif	113,9 sgt efektif	115,1 sgt efektif	104,7 sgt efektif	96,8 sgt efektif	113,9 sgt efektif
Kab. Lebak	112,5 sgt efektif	130,9 sgt efektif	109,9 sgt efektif	103,2 sgt efektif	124,1 sgt efektif	116,1 sgt efektif
Kab. Pandeglang	112,2 sgt efektif	84,7 sgt efektif	112,9 sgt efektif	126,2 sgt efektif	126,1 sgt efektif	112,4 sgt efektif
Kab. Serang	130,9 sgt efektif	127,5 sgt efektif	162,5 sgt efektif	125,9 sgt efektif	119,7 sgt efektif	133,3 sgt efektif
Kab. Tangerang	164,2 sgt efektif	166,7 sgt efektif	193,5 sgt efektif	137,4 sgt efektif	129,5 sgt efektif	158,3 sgt efektif
Kota Cilegon	120,4 sgt efektif	145,3 sgt efektif	140,2 sgt efektif	129,4 sgt efektif	131,1 sgt efektif	133,3 sgt efektif
Kota Tangerang	162,7 sgt efektif	160,3 sgt efektif	144,8 sgt efektif	116,1 sgt efektif	112,1 sgt efektif	139,2 sgt efektif
Kota Serang	145,5 sgt efektif	160,6 sgt efektif	126,4 sgt efektif	53,8 sgt efektif	131,1 sgt efektif	123,5 sgt efektif
Kota Tangsel	169,6 sgt efektif	157,5 sgt efektif	150,1 sgt efektif	127,9 sgt efektif	139,8 sgt efektif	148,9 sgt efektif

Sumber: Data Penelitian diolah (2017)

Tabel 7. Efektivitas Pajak Daerah

Daerah	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Prov Banten	138,4 sgt efektif	114,7 sgt efektif	114,0 sgt efektif	103,4 sgt efektif	94,8 sgt efektif	113,9 sgt efektif
Kab. Lebak	146,6 sgt efektif	155,4 sgt efektif	115,1 sgt efektif	169,0 sgt efektif	115,6 sgt efektif	140,3 sgt efektif
Kab. Pandeglang	115,4 sgt efektif	110,8 sgt efektif	117,8 sgt efektif	122,5 sgt efektif	135,8 sgt efektif	120,2 sgt efektif
Kab. Serang	135,6 sgt efektif	119,0 sgt efektif	175,7 sgt efektif	121,7 sgt efektif	112,5 sgt efektif	132,9 sgt efektif
Kab. Tangerang	212,6 sgt efektif	189,2 sgt efektif	221,0 sgt efektif	129,0 sgt efektif	127,5 sgt efektif	175,8 sgt efektif
Kota Cilegon	129,6 sgt efektif	92,4 sgt efektif	140,0 sgt efektif	137,3 sgt efektif	137,0 sgt efektif	127,2 sgt efektif
Kota Tangerang	160,0 sgt efektif	155,2 sgt efektif	141,4 sgt efektif	116,0 sgt efektif	110,0 sgt efektif	136,5 sgt efektif
Kota Serang	186,8 sgt efektif	186,9 sgt efektif	125,4 sgt efektif	12,6 sgt efektif	126,0 sgt efektif	127,6 sgt efektif
Kota Tangsel	177,8 sgt efektif	151,4 sgt efektif	146,3 sgt efektif	122,9 sgt efektif	122,1 sgt efektif	144,0 sgt efektif

Sumber: Data Penelitian diolah (2017)

Jangan sampai kebijakan yang dihasilkan justru bersifat kontraproduktif dan memberatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah ke depannya. Tantangan yang lebih besar diberikan kepada pemerintah Kabupaten Serang yang memiliki derajat desentralisasi fiskal sedang dan berpotensi untuk naik kelas atau justru terseret jatuh ke kelas yang lebih rendah. Leadership dari Kepala Daerah kemudian menjadi hal utama dalam menggerakkan pola perilaku aparat pemda. Fokus utama perhatian dan kebijakan provinsi serta pemerintah pusat tentu wajib dialamatkan untuk Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang yang memiliki derajat desentralisasi sangat minim. Bagaimana pemerintah provinsi dan pusat harus dapat mensinergikan arah kebijakan dan pola pembangunan serta alokasi Transfer ke Daerah untuk dapat diprioritaskan di ketiga daerah ini. Jangan sampai ke depannya kondisi ini terus terjadi dan justru semakin melebar karena ketimpangan yang muncul justru akan membahayakan perekonomian daerah secara

menyeluruh di Provinsi Banten nantinya serta perekonomian nasional secara umum.

Efektivitas PAD dan Pajak Daerah. Hal yang cukup menarik sebetulnya dilihat dari analisis berdasarkan efektivitas pemungutan PAD dan pajak daerah. Jika dilihat analisis berdasarkan aspek kemandirian dan ketergantungan daerah, terlihat mayoritas daerah di Provinsi Banten relatif bagus meskipun masih ada permasalahan di Kabupaten Lebak, Kab Pandeglang dan Kota Serang. Namun demikian, efektivitas pemungutan pajak dan PAD justru memperlihatkan rasio yang sangat efektif. Di seluruh daerah baik untuk efektifitas pemungutan PAD maupun pajak daerah semuanya memperlihatkan angka di atas 100% efektifitasannya. Angka pencapaian ini mungkin menjadi salah satu yang terbaik secara nasional. Seperti ada ketaatan luar biasa dari masyarakat sekaligus mencerminkan adanya *trust* yang begitu besar kepada aparat pemerintah daerah.

Jika dikaitkan dengan pajak daerah saja mungkin masih dapat dipahami secara teori. Namun jika dilihat angka efektivitas pemungutan PAD juga begitu besar artinya seluruh pemungutan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah dapat diterima dan dijalankan dengan sepenuh hati oleh masyarakat baik pajak daerah serta retribusi daerah maupun berbagai pungutan lainnya. Ke depannya jika realisasi PAD tersebut betul-betul dapat dimanfaatkan untuk APBD, sekiranya laju pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Banten diyakini akan melaju lebih cepat lagi.

Kondisi ini seharusnya dapat dijadikan modal terbesar bagi pemerintah daerah Provinsi Banten sebagai bentuk kearifan lokal (*modal social*) yang dapat menjadi alternative lain pembentukan modal capital bagi pembangunan daerah. *Modal social* yang begitu besar ini seharusnya dapat diolah dan dijadikan modal pembangunan ke depannya. Dipadukan dengan pola perencanaan pembangunan yang bagus sejatinya akan menciptakan keserasian yang harmonis yang pada akhirnya akan membentuk pola pembangunan daerah yang tinggi dan berkelanjutan di Provinsi Banten.

KESIMPULAN

Berdasarkan nilai rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah secara umum, daerah-daerah di Provinsi Banten dapat dikatakan sudah memiliki aspek kemandirian yang relatif memuaskan. Secara sektoral, daerah-daerah yang memiliki pola hubungan partisipasif serta aspek kemandirian daerahnya tinggi ini memiliki basis perekonomian di sektor perdagangan dan jasa, meski kontribusi sektor pertaniannya juga masih tinggi khususnya di Kabupaten Tangerang. Kelas menengah atau sedang yang terjadi di Kabupaten Serang harus dimaknai sebagai peluang untuk dapat naik kelas menjadi tinggi dan partisipasif dengan pola kebijakan pemerintah daerah yang selaras dan mendukung pembangunan. Sayangnya masih ada tugas dan beban untuk memajukan Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang yang masih berada di level kemandirian daerah sangat rendah dan bergantung kepada alokasi bantuan pemerintah pusat.

Provinsi Banten yang memiliki kemandirian daerah sangat tinggi secara otomatis memiliki derajat desentralisasi fiskal yang juga sangat tinggi. Sementara Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang memiliki derajat desentralisasi fiskal yang cukup. Keempat daerah ini tentu wajib terus meningkatkan derajatnya hingga mencapai derajat desentralisasi fiskal yang tinggi.

Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang yang memiliki derajat desentralisasi sangat minim. Kondisi ini terus terjadi dan justru semakin melebar karena ketimpangan yang membahayakan perekonomian daerah secara menyeluruh di Provinsi Banten nantinya serta perekonomian nasional secara umum.

Pada seluruh daerah baik untuk efektifitas pemungutan PAD maupun pajak daerah semuanya memperlihatkan angka di atas 100% efektivitasnya. Angka pencapaian ini mungkin menjadi salah satu yang terbaik secara nasional. Seperti ada ketaatan luar biasa dari masyarakat sekaligus mencerminkan adanya trust yang begitu besar kepada aparat pemerintah daerah. Jika dikaitkan dengan pajak daerah saja mungkin masih dapat dipahami secara teori. Namun hal ini juga berlaku untuk kasus pemungutan PAD yang didominasi oleh pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

REKOMENDASI

1. Mengingat bahwa rendahnya tingkat kemandirian keuangan Pemerintah, tingginya tingkat ketergantungan keuangan pemerintah dan rendahnya derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang maka pemerintah daerah sebaiknya terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah yang ada di tiga kabupaten yang masih tertinggal tersebut.
2. Adapun beberapa potensi yang seharusnya mampu dioptimalkan pengelolaannya oleh pemerintah daerah antara lain adalah pertanian, potensi pariwisata seperti jumlah hotel, rumah makan, sentra-sentra bisnis dan lainnya, jika berhasil mengoptimalkan pemanfaatan potensi tersebut, maka pajak dan retribusi yang merupakan penopang utama dalam meningkatkan PAD akan semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat dan Provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul & Damayanti, Theresia.2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Albasiah, Oesi Gustina.2013. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Volume 1(2) hal. 34-57.
- Bhinadi, Ardito. 2003. Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dan Luar Jawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 8(1) hal. 39-48.

- Bandiyah. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*. Volume 6(1) hal 1-25.
- Fambayun, Sonia. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Magetan (Tahun Anggaran 2009-2013). *Jurnal Mahasiswa UNESA*. Volume 2(3) hal 23-34.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hamid, Edy Suandi. 2005. *Formula Alternatif Dana Alokasi Umum (DAU): Upaya Mengatasi Ketimpangan Fiskal dalam Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Kumorotomo, W. 2008. *Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan 1994-2004*. Jakarta: Kencana Prenadia Media Group.
- Kharisma, Bayu. 2013. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume 14(2) hal 102-119.
- Laedy, Tamboto. 2014. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Pada Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Emba*. Volume 2(2) hal. 755-767.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Noordiawan dan Hertanti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhemi & Guruh Suryani. 2015. Dampak otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* Volume 18(2) hal.183-206.
- Rinaldi, Udin. 2012. Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal EKSOS*. Volume 8(2) hal. 105-113.
- Rahman, Nikmah, Amran Naukoko, Albert Londah. 2014. Analisis Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada Kota Manado dan Kota Bitung Tahun 2008-2012). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 14(3) hal. 56-70.
- Surakhmad, Winarno. 2005. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Solihin, Achmad & Niken Ajeng Lestari. 2010. Analisis Ketimpangan Fiskal di Indonesia Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. *Majalah Ekonomi*. Tahun XX (1) hal. 20-34.
- Swandewi, Anak Agung Istri Agung. 2014. Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Hal. 356-376.
- Simanjuntak, Kardin. 2015. Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*. Volume 7(2) hal. 111-129.
- Sambow, Daniel Frangky, George M. V. Kawung, Avriano Tenda. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 16(4) hal. 247-259.
- Tjahjono, Achmad & Rika Oktavianti. 2016. Pengaruh Rasio Efektivitas PAD, DAU dan DAK Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi DIY. *Jurnal Kajian Bisnis*. Volume 24(1) hal. 25-34.
- Wahyuni & Priyo Hari Adi. 2009. *Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah*. The 3rd National Conference UKWMS. Surabaya. hal. 1-23.
- Wurangin, Sanny. Daisy S.M. Engka Krest D. Tolosang. 2013. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Tomohon (Studi Kasus di Kota Tomohon Periode Tahun 2007-2015). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 17(01) hal 64-78.
- Yuwono, Sony. 2008. APBD dan Permasalahannya. [Online] Dari: <http://bpkad.natunakab.go.id/index.php/2014-05-21-00-44-45/64-anggaran/87->
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Hasil Penelitian

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RUMAH TANGGA UNTUK MENGAKSES LEMBAGA KEUANGAN FORMAL: STUDI KASUS SUSENAS 2015

(DETERMINANT FACTOR FOR HOUSEHOLD TO ACCESS FORMAL FINANCIAL INSTITUTION CASE STUDY: SUSENAS 2015)

Tri Achya Ngasuko

Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Gedung Radius Prawiro Lt.6 Komplek Kementerian Keuangan.
Jl Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat, 10710
email: ngasuko@gmail.com

Diterima: 10 April 2018; Direvisi: 2 Mei 2018; Disetujui: 14 Mei 2018

ABSTRAK

World Bank pada tahun 2014 melaporkan hanya 36% penduduk Indonesia memiliki akses ke lembaga keuangan formal, angka ini menunjukkan tingkat keuangan inklusif di Indonesia. Masih ada tugas yang harus dilakukan karena pemerintah Indonesia bertujuan meningkatkan tingkat keuangan inklusifnya menjadi 70% pada tahun 2019. Survei BPS, yaitu Susenas 2015, memiliki informasi baru tentang profil tabungan rumah tangga. Informasi ini tidak tersedia dalam survei Susenas sebelumnya. Studi ini adalah yang pertama yang menguji faktor-faktor yang berpengaruh untuk para kepala keluarga mengakses ke layanan keuangan formal, terutama tabungan, berdasarkan Susenas 2015. Hasil penelitian memberikan profil rumah tangga dan faktor yang berpengaruh untuk kepala rumah tangga untuk mengakses lembaga keuangan formal, khususnya tabungan. Analisis data menggunakan model *logit*, diperoleh probabilitas bagi rumah tangga untuk mempunyai tabungan di lembaga formal dipengaruhi secara positif oleh karakteristik demografi seperti usia, jumlah anggota keluarga, tanggungan orang tua kepala keluarga, kepala keluarga laki-laki, pekerjaan formal kepala keluarga, dan kepemilikan kredit para kepala keluarga. Sedangkan banyaknya tanggungan anak-anak, bidang pekerjaan kepala keluarga di sektor pertanian, dan lokasi tempat tinggal di pedesaan berpengaruh negatif terhadap kepemilikan rekening tabungan. Temuan penelitian ini sangat penting dalam memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan tingkat keuangan inklusif di Indonesia.

Kata kunci: keuangan inklusif, tabungan rumah tangga, Susenas 2015

ABSTRACT

World Bank in 2014 reported only 36% of Indonesians have access to formal financial institutions. This number shows the level of financial inclusion in Indonesia. There is still some task to do since Indonesian government has the goals 70% level of financial inclusion in 2019. The BPS survey, Susenas 2015, has new information on household saving profiles. This information is not available in the previous Susenas survey. This study is the first to examine influencing factors for heads of households accessing formal financial services, particularly savings, based on Susenas 2015. The results of this study provide household profiles and influencing factors for heads of households to access formal financial institutions, especially savings. Using the logit model, the probability for households to have savings in formal institutions is positively influenced by demographic characteristics such as age, number of family members, dependents of family head parents, male family heads, formal employment of heads of households, and credit ownership head of family. While the number of dependents of children, the field of work of the head of the family in the agricultural sector, and location of head of household in rural area negatively affect the ownership of savings accounts. The findings of this research are crucial in providing policy recommendations to improve the level of inclusive finance in Indonesia.

Keywords: financial inclusion, household saving, Susenas 2015

PENDAHULUAN

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa sejak akhir tahun 2010 sampai dengan Februari 2018 telah terjadi peningkatan dana simpanan masyarakat yang terkumpul di lembaga jasa keuangan formal dari sebelumnya 1.969 triliun rupiah menjadi 4.410 triliun rupiah. Dana ini tersimpan di bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Berbanding lurus dengan simpanan dana masyarakat, penyaluran kredit juga meningkat dari 1.522 triliun rupiah di akhir 2010 menjadi 4.060 triliun di bulan Februari 2018. Peningkatan yang sangat signifikan ini paling tidak menunjukkan dunia perbankan kita semakin dipercaya sebagai lembaga intermediasi keuangan di tanah air. Namun demikian, ternyata tidak semua lapisan masyarakat memanfaatkan lembaga jasa keuangan formal di bank. Suatu kondisi dimana masyarakat di suatu negara memanfaatkan dan mengakses lembaga jasa keuangan formal sering kita kenal dengan keuangan inklusif.

Survei tentang keuangan inklusif Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Kunt dkk telah melakukan survey pada tahun 2012 dan 2015 di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada tahun 2015, Indeks Keuangan Inklusif Indonesia hanya 36 persen jauh di bawah Indeks Keuangan Inklusif dunia yang mencapai 62 persen (Kunt dkk, 2015). Namun angka ini sudah lebih baik dari survei sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2012. Pada tahun 2012, hanya 20 persen dari populasi orang dewasa di Indonesia memiliki akses tabungan ke layanan keuangan formal (Kunt dkk, 2012). Dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asean, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, indeks keuangan inklusif Indonesia masih jauh tertinggal dimana secara berturut-turut indeks keuangan inklusif negara tersebut adalah 96, 81, dan 78 persen. Posisi Indonesia hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan Vietnam dan Filipina yang penduduk dewasanya memiliki akses ke layanan keuangan sebesar 31 persen (World Bank, 2015).

Upaya untuk meningkatkan akses ke layanan keuangan telah banyak dilakukan oleh Indonesia misalnya dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional untuk Keuangan Inklusif (SNKI) yang ditetapkan pada 1 September 2016. Presiden Joko Widodo telah meluncurkan sebuah gerakan untuk mencapai target keuangan inklusif pada tahun 2019. Presiden Joko Widodo mengharapkan bahwa 75 persen penduduk dewasa Indonesia sudah memiliki akses ke layanan keuangan kepada lembaga keuangan formal. SNKI berfungsi sebagai panduan bagi Menteri dan pemimpin lembaga

dalam membangun kebijakan sektoral yang terkait dengan peningkatan keuangan inklusif. Selain itu, SNKI adalah pedoman bagi gubernur dan bupati/ walikota dalam pembentukan kebijakan lokal terkait dengan peningkatan keuangan inklusif di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Untuk mengkoordinasi dan mensinkronisasikan pelaksanaan SNKI, Peraturan Presiden tersebut menginstruksikan untuk membentuk Dewan Nasional untuk Keuangan Inklusif (DNKI) yang salah satu tugasnya adalah mengarahkan dan membuat kebijakan dalam konteks penyelesaian masalah dan hambatan dalam pelaksanaan SNKI. Selain itu, DNKI juga diberi mandat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SNKI.

Dalam rangka mendukung tujuan Presiden Joko Widodo di mana tingkat keuangan inklusif akan mencapai 75% pada tahun 2019, kita perlu mengetahui faktor apa saja yang mungkin berpengaruh dalam pertimbangan masyarakat dalam pemanfaatan layanan jasa keuangan formal, khususnya tabungan. Keuangan inklusif adalah penggerak pertumbuhan ekonomi (Sharma, 2016). Survey yang dilakukan di India dengan menggunakan data periode 2001-2013 menunjukkan bahwa keuangan inklusif, yang ditunjukkan dengan penetrasi perbankan, mempunyai hubungan yang kuat dengan pertumbuhan. Iqbal dan Sami (2017) menambahkan bahwa selain jumlah cabang bank, ternyata rasio simpanan kredit juga berpengaruh signifikan terhadap PDB suatu negara.

Sejalan dengan penelitian diatas, Mordan dan Pontines (2014) berpendapat bahwa peningkatan porsi kredit untuk usaha kecil dan menengah (UKM) membantu stabilitas keuangan, terutama dengan mengurangi kredit macet (NPL) dan kemungkinan gagal bayar oleh lembaga keuangan. Namun demikian, jumlah bank yang banyakpun tidak menjamin level keuangan inklusif. Honohan (2008) menggarisbawahi bahwa keterbukaan akses kepada layanan keuangan formal berperan penting dalam rendahnya tingkat inequality yang ditunjukkan oleh tingkat gini ratio. Park dan Mercado (2015) menambahkan bahwa peraturan tentang pensiun, aturan hukum yang lebih kuat, termasuk penegakan kontrak keuangan dan pengawasan regulasi keuangan, akan memperluas inklusi keuangan, sehingga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang lebih rendah.

Melihat pentingnya suatu keuangan inklusif, banyak peneliti telah mengkaji penyebab tinggi atau rendahnya level keuangan inklusif suatu negara. Wang dan Guan (2017) mengungkapkan bahwa kedalaman sistem keuangan dan status

kesehatan perbankan adalah yang utama faktor yang utama. Faktor lain yang menjelaskan level keuangan inklusif adalah pendapatan, pendidikan dan penggunaan peralatan komunikasi. Zins dan Weill (2016) yang mempelajari keuangan inklusif di 37 negara afrika juga menjelaskan bahwa seorang dengan jenis kelamin pria, lebih kaya, lebih berpendidikan dan lebih tua merupakan faktor yang mendukung keuangan inklusif. Hal ini dikarenakan mereka dengan kriteria tersebut akan cenderung mempunyai pendidikan dan penghasilan yang lebih tinggi. Di sisi lain, kondisi berbeda terjadi dalam peningkatan keuangan inklusif di kalangan penduduk miskin. Menurut Swamy (2014), penyaluran program bantuan sosial melalui bank sebagai wujud peningkatan keuangan inklusif akan lebih berhasil apabila diberikan kepada wanita. Sementara itu, Vibriyanti (2014) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menabung di bank menyatakan bahwa tingkat pendidikan rata-rata anggota keluarga yang berusia produktif bersama dengan total pendapatan rumah tangga selalu signifikan. Temuan yang tak kalah penting lainnya adalah bahwa keluarga dengan kepala keluarga laki-laki cenderung tidak memiliki tabungan daripada rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan.

Inti dari keuangan inklusif adalah ketersediaan lembaga jasa keuangan formal, dalam hal ini bank, sehingga yang tak kalah berpengaruh dalam peningkatan keuangan inklusif adalah ketersediaan bank itu sendiri. Beck dkk (2015) menjelaskan bahwa di Afrika, ketersediaan lembaga jasa keuangan relatif rendah. Maka dari itu, mereka berpendapat bahwa bank-bank asing berkontribusi dalam penyediaan akses keuangan. Namun demikian, *cross border banking* yang akan berkontribusi dalam peningkatan keuangan inklusif adalah bank yang berasal dari negara-negara berkembang, bukan dari negara maju seperti eropa dan amerika. Membangun sistem keuangan yang inklusif merupakan sarana penting bagi sebagian besar negara.

Salah satu indikator dari keuangan inklusif adalah tingkat keikutsertaan masyarakat dalam menabung di lembaga jasa keuangan formal. Terdapat beberapa teori tentang tabungan. Vibriyanti (2014) membuat ringkasan teori tentang tabungan. Yang tertua adalah teori klasik yang muncul sebagai hasil bahwa tabungan dipengaruhi oleh tingkat bunga dan pendapatan, dan pada saat yang sama dipengaruhi secara negatif oleh tingkat konsumsi. Teori tabungan berikutnya adalah hipotesis pendapatan absolut dan hipotesis pendapatan relatif. Hipotesis penghasilan

absolut oleh Keynes menyebutkan bahwa tabungan dipengaruhi secara positif oleh pendapatan seseorang dan dipengaruhi secara negatif oleh tingkat konsumsi. Sedikit berbeda dari hipotesis pendapatan absolut, hipotesis pendapatan relatif meyakinkan kita bahwa tabungan tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan dan konsumsi, tetapi juga tingkat bunga, pendapatan yang diharapkan, tingkat pertumbuhan pendapatan, distribusi pendapatan, dan distribusi usia dalam rumah tangga.

Menurut Vibriyanti (2014) teori penghematan tabungan berikutnya adalah hipotesis pendapatan permanen oleh Milton Friedman. Penghasilan adalah faktor utama yang mempengaruhi tabungan. Tetapi pendapatan dibagi dua, pendapatan tetap dan pendapatan berulang. Hampir semua pendapatan digunakan untuk konsumsi. Orang hanya dapat melakukan penghematan dari pendapatan rutin bulanan, penghasilan yang tidak dapat diprediksi, kenaikan nilai aset, dll. Menurut hipotesis pendapatan tetap, tingkat konsumsi seseorang, pendapatan tingkat pertumbuhan, suku bunga, total aset, selera, tabungan asing, nilai tukar mata uang asing, inflasi, dan rasio keamanan dan penghasilannya menentukan penghematan. Vibriyanti (2014) juga merangkum teori penghematan *rational expectations* dari Mankiw (1997) yang menyatakan bahwa tingkat tabungan yang diambil oleh tidak hanya bergantung pada pendapatan mereka saat ini tetapi juga tergantung pada pendapatan yang diharapkan di masa depan.

Menyimpan adalah penting, terutama untuk keluarga berpenghasilan rendah. Moav dan Neeman (2012) menyatakan bahwa keluarga miskin di seluruh dunia membelanjakan sebagian besar pendapatan mereka untuk mengkonsumsi barang-barang yang tampaknya tidak mengurangi kemiskinan sambil menghemat dengan harga rendah. Mereka percaya bahwa individu peduli tentang status ekonomi dan menghabiskan lebih banyak konsumsi daripada menabung. Akhirnya, mereka akan terjebak dalam kemiskinan. Jauh sebelum itu, Muradoglu & Taskin (1996) menyatakan terdapat perbedaan perilaku menabung oleh rumah tangga di negara-negara industri dan negara-negara berkembang. Pembentukan pasar keuangan baru dan lebih canggih dan adaptasi instrumen baru sangat penting dalam meningkatkan tingkat tabungan di negara berkembang. Tiga faktor ditemukan sebagai penentu tingkat tabungan yang signifikan di negara-negara ini: rasio ketergantungan, keseimbangan riil, dan pendapatan. Mengadopsi program liberalisasi

keuangan untuk mempromosikan pembangunan akan membantu rumah tangga di negara-negara ini untuk menyalurkan tabungan ke instrumen keuangan dan meningkatkan tingkat tabungan.

Kibet dkk. (2009) juga mempelajari tentang faktor determinan yang mempengaruhi tabungan. Mereka menyatakan bahwa menabung di rumah tangga pedesaan tidak hanya berdasarkan pendapatan rumah tangga, tetapi juga dipengaruhi secara positif oleh gender dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Di sisi lain, akses kredit, usia, dan rasio ketergantungan secara negatif memengaruhi tabungan rumah tangga. Studi terbaru dari Beckman (2013) mengatakan bahwa keaksaraan secara positif dan signifikan terkait dengan tabungan dan investasi. Cole dkk. (2011) di Beckman (2013) juga melaporkan dua alasan untuk permintaan rumah tangga yang terbatas untuk layanan keuangan di pasar negara berkembang. Yaitu (i) biaya tetap yang terlalu tinggi untuk individu berpenghasilan rendah dan (ii) melek finansial yang terbatas, terutama bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Stix (2012) dalam Beckman (2013) juga menyebutkan bahwa hingga 25% rumah tangga yang memiliki tabungan di Rumania lebih suka memegang uang tunai daripada di rekening tabungan, bahkan jika mereka memiliki rekening bank.

Pakistan adalah salah satu negara berkembang. Khan & Hye (2010) mempelajari tentang tingkat simpanan di Pakistan. Mereka menyatakan bahwa liberalisasi keuangan memiliki dampak negatif pada tabungan rumah tangga dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penghematan rumah tangga dalam jangka pendek dipengaruhi oleh pendapatan per kapita, sektor pertanian, dan pengiriman uang, dalam jangka panjang, terhubung negatif dengan tingkat simpanan riil. Meskipun demikian, rasio ketergantungan juga berdampak negatif terhadap tabungan rumah tangga dalam jangka pendek. Jepang adalah contoh negara-negara berkembang. Iwaisako dkk. (2016) menyatakan bahwa penuaan penduduk di Jepang membuat tren penurunan tabungan tetapi dengan kecepatan yang lancar sehingga pergeseran portofolio mendadak yang terkait dengan guncangan merugikan untuk tabungan rumah tangga tidak mungkin.

Politik juga merupakan salah satu faktor penentu bagi sebuah keluarga untuk menabung. Abergee dkk. (2017) berpendapat bahwa lonjakan ketidakpastian politik menghasilkan peningkatan sementara yang signifikan dalam tabungan di kalangan rumah tangga perkotaan di Cina. Efek risiko terutama diberikan efek di

antara rumah tangga yang lebih tua, lebih kaya, dan lebih diuntungkan secara sosial.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis hasil survei Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015. Susenas 2015 terasa berbeda karena ada bagian baru dari survei terbaru yang isinya tentang akses keuangan. Di bagian itu, ada pertanyaan tentang bagaimana perilaku rumah tangga di Indonesia menyimpan uangnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagian survei tersebut memenuhi indikator keuangan inklusif yang ada di Susenas tahun sebelumnya, yaitu, berapa banyak rumah tangga yang sudah memiliki kredit dari bank. Dengan demikian, Susenas 2015 memungkinkan kita untuk melihat faktor yang mempengaruhi kepala keluarga dalam mengakses layanan keuangan formal. Berdasarkan pengetahuan penulis, makalah ini adalah m faktor yang mempengaruhi kepala keluarga dalam mengakses layanan keuangan formal berdasarkan survei Susenas 2015.

Survei World Bank menyatakan bahwa Indonesia memiliki tingkat simpanan yang rendah di lembaga keuangan formal. Penelitian ini hanya berfokus pada tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga Indonesia pada rekening jasa keuangan formal. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis karakteristik keluarga Indonesia yang memiliki rekening tabungan di lembaga keuangan formal. Jika Vibriyanti (2014) telah melakukan kajian sejenis menggunakan Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2007, penelitian ini juga mencoba menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku menabung pada tingkat rumah tangga berdasarkan Susenas 2015. Dari penjelasan di atas, pertanyaan penelitian adalah: 1) Bagaimana karakteristik orang yang mempunyai tabungan di Indonesia; dan 2) Variabel yang mempengaruhi sebagian besar rumah tangga untuk memiliki tabungan.

METODE

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Susenas 2015, kami menganalisis faktor penentu bagi rumah tangga untuk mengakses lembaga keuangan formal. Susenas adalah salah satu survei yang dilakukan oleh BPS secara rutin setiap tahun. Susenas mengumpulkan data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, kesuburan, keluarga berencana, perumahan dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Survei di Susenas 2015 diadakan dua kali dalam setahun, Maret dan September. Pada bulan Maret, pengumpulan data Susenas mencakup 300.000 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten / kota di Indonesia yang dicacah menggunakan kuesioner Konsumsi Inti

dan Pengeluaran. Survei Susenas kedua yang dilakukan pada bulan September termasuk 75.000 rumah tangga sampel yang terdaftar adalah tentang Modul Sosial Budaya dan Pendidikan Sosio Budaya (Modul Sosial Budaya dan Pendidikan / MSBP) dan Pengeluaran Pengeluaran (Konsumsi Pengeluaran / KP). Dalam studi ini, kami menggunakan hasil survei kedua, Survei Susenas September.

Dari total 75.000 sampel rumah tangga, kami hanya menggunakan data keluarga yang hanya memiliki uang ekstra untuk disimpan baik di lembaga tabungan keuangan formal atau lembaga keuangan informal. Setelah melalui proses pembersihan data, jumlah responden dalam penelitian ini menurun menjadi hanya 71,568 rumah tangga. Jumlah yang berkurang dari 75.000 hingga hanya 71.568 rumah tangga terutama berasal dari rumah tangga yang tidak memiliki tabungan.

Metodologi yang terinspirasi oleh Vibriyanti (2014) yang mempelajari faktor penentu tabungan rumah tangga menggunakan data IFLS 2007. Dalam penelitian ini, kami tidak menyelidiki semua tabungan rumah tangga melainkan hanya tabungan yang tersimpan di lembaga keuangan formal, dalam hal ini bank. Berbeda dengan Vibriyanti (2014) yang menggunakan data IFLS 2007, kami menggunakan data dari Susenas 2015.

Model pilihan kualitatif diperlukan untuk mengetahui apakah suatu rumah tangga mengakses lembaga keuangan formal yang berarti menentukan peluang bahwa rumah tangga dengan karakteristik tertentu akan memilih suatu pilihan tertentu dari alternatif yang tersedia. Dalam hal ini, pilihan tersebut adalah memilih memanfaatkan layanan keuangan formal atau memilih untuk tidak memanfaatkan layanan keuangan formal. Dalam hal pilihannya hanya ada dua alternatif maka disebut model pilihan biner. Terdapat tiga pilihan ekonometrika untuk menyelesaikan problem tersebut yaitu menggunakan model linear, model probit, dan model logit. Model linear mempunyai beberapa kelemahan yaitu *non-normality* dari *random error*, adanya *heteroskedasticity random error*, dan tidak memenuhi peluang antara 0 sampai dengan 1. Model probit mempunyai kelemahan yaitu bahwa untuk menduga parameter koefisiennya menggunakan *maximum likelihood nonlinear*. Selain itu, interpretasi koefisiennya agak terbatas. Dengan mempertimbangkan kelemahan model linear dan model probit, maka diambil keputusan untuk menggunakan model logit untuk menyelesaikan problem tersebut. Model yang diperkirakan seperti pada persamaan (1):

$$\begin{aligned} \text{Akun_tab} = & \alpha_0 + \alpha_1 \text{ umur} + \alpha_2 \text{ umur}^2 + \alpha_3 \text{ kel} + \alpha_4 \text{ pendidikan} + \alpha_5 \text{ t_anak} \\ & + \alpha_6 \text{ t_ortu} + \alpha_8 \text{ jk_kk} + \alpha_9 \text{ pek_kk} + \alpha_{10} \text{ bid_kk} \\ & + \alpha_{11} \text{ kred_kk} + \alpha_{12} \text{ lok_kk} + \varepsilon \end{aligned} \quad (1)$$

Dimana:

Akun_tab	= kepala rumah tangga yang memiliki rekening tabungan di bank
umur	= umur kepala rumah tangga
umur ²	= usia kuadrat kepala rumah tangga
kel	= total anggota keluarga yang tinggal di rumah yang sama
pend	= tingkat pendidikan
t_anak	= anggota rumah tangga di bawah 17 tahun atau belum menikah
t_ortu	= orang tua termasuk orang tua mertua yang tinggal di rumah yang sama dengan kepala rumah tangga
jk_kk	= jenis kelamin kepala rumah tangga (1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan)
pek_kk	= kepala bidang pekerjaan rumah tangga (1 untuk formal dan 0 untuk informal)
bid_kk	= kepala bidang pekerjaan rumah tangga (1 untuk pertanian dan 0 untuk non-pertanian)
kred_kk	= status hutang kepala rumah tangga (1 untuk pinjaman dari bank dan 0 karena tidak punya pinjaman dari bank)
lok_kk	= lokasi rumah tangga (1 untuk desa dan 0 untuk perkotaan)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik rumah tangga yang memiliki tabungan. Data Susenas tidak memberikan data tentang jumlah tabungan oleh masing-masing penduduk atau rumah tangga di Indonesia. Namun, dari Susenas kita dapat melihat apakah setiap rumah tangga memiliki tabungan atau tidak. Data susenas menunjukkan bahwa terdapat 62,98% rumah tangga yang

mempunyai kemampuan untuk menabung. Jumlah ini setara dengan 42,9 juta rumah tangga di Indonesia pada 2015. Sementara sisanya, 25,2 juta rumah tangga atau sekitar 37,02% sama sekali hidup tanpa kemampuan menyisihkan pendapatan mereka untuk ditabung. Studi ini berfokus pada seberapa banyak rumah tangga yang mempunyai kelebihan uang untuk ditabung akan menggunakan lembaga jasa keuangan

formal, terutama bank, sebagai media penyimpanan atas kelebihan uang tersebut.

Tabel 1 . Karakteristik Kepala Rumah Tangga yang Memiliki Rekening Tabungan

Variabel	Punya Tabungan (%)	Tidak Punya Tabungan (%)	
Kelompok Umur	15 – 25	3.96	3.53
	26 – 35	18.41	19.28
	36 – 45	27.47	26.64
	46 – 55	26.46	22.83
	56 – 65	16.25	16.83
	66+	7.46	10.90
	Total	100	100
Kelompok Jumlah Anak	1 – 3	41.82	46.63
	4 – 6	52.52	47.99
	7+	5.66	5.38
	Total	100	100
Kelompok Tingkat Pendidikan	Tidak punya ijazah	8.75	28.73
	Paket A	0.13	0.19
	SD	27.61	41.10
	Paket B	0.15	0.24
	SMP	12.05	13.68
	Paket C	0.48	0.47
	SMA	18.88	8.69
	SMK	11.83	4.81
	D1/D2	1.23	0.20
	D3	3.21	0.29
	D4/ S1	13.98	1.50
	S2	1.62	0.08
	S3	0.08	0.01
Total	100	100	
Tanggungan Orang Tua	Punya Tanggungan	94.05	93.36
	Tidak Punya tanggungan	5.95	6.64
	Total	100	100
Tanggungan Anak-Anak	1 – 3	97.36	96.44
	4 – 6	2.58	3.48
	7+	0.06	0.08
	Total	100	100
Jenis Kelamin Kepala Keluarga	Perempuan	12.74	14.94
	Laki-laki	87.26	85.06
	Total	100	100
Pekerjaan Kepala Keluarga	Non Formal	55.67	75.82
	Formal	44.33	24.18
	Total	100	100
Bidang Pekerjaan Kepala Keluarga	Bidang Non Pertanian	83.57	61.81
	Bidang Pertanian	16.43	38.19
	Total	100	100
Status Kredit Kepala Keluarga	Tidak memiliki hutang	95.91	97.87
	Punya hutang	4.09	2.13
	Total	100	100
Lokasi	Kota	68.43	40.63
	Desa	31.57	59.37
	Total	100	100

Sumber : Susenas 2015 (Data diolah)

Ternyata hanya 23,97 juta rumah tangga dari total 68,15 juta rumah tangga di Indonesia yang memiliki tabungan di lembaga keuangan formal. Angka ini setara dengan 35,18%. Jadi, angka ini lebih kecil dari survei World Bank pada 2015 yang menyatakan bahwa terdapat 36% penduduk Indonesia yang memiliki tabungan di lembaga keuangan formal.

Data Susenas 2015 yang ditampilkan pada Tabel 1 terlihat karakteristik 35,18% rumah tangga yang memiliki rekening tabungan di lembaga keuangan formal. Rumah tangga dengan tabungan didominasi oleh rumah tangga dengan kepala keluarga 36-55 tahun dan 46-55 tahun, baru kemudian diikuti oleh keluarga dengan rentang usia yang lebih muda yaitu 26-35 tahun. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya dari Vibriyanti (2014) yang menyebutkan bahwa kepala rumah tangga yang lebih muda, yaitu dengan rentang usia 25-34 tahun, akan cenderung memiliki tabungan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam usia yang relatif matang (usia 36-55 tahun) relatif memiliki pekerjaan yang layak sehingga mereka memiliki penghasilan yang cukup sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk menabung. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Wang dan Guan (2017) yang menyatakan bahwa salah satu faktor utama keuangan inklusif adalah dari adanya pendapatan. Selanjutnya, dalam Vibriyanti (2014) juga menyebutkan bahwa golongan rumah tangga yang tidak menggunakan rekening jasa keuangan formal terjadi pada rumah tangga dengan rentang usia yang lebih tua. Namun demikian, hal ini tidak terjadi dalam penelitian ini, Rumah tangga yang tidak menggunakan layanan jasa keuangan formal tampaknya relatif sama dengan golongan rumah tangga yang memanfaatkan lembaga jasa keuangan formal. Kami menduga bahwa mereka sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menabung akan tetapi secara sukarela memilih untuk tidak memanfaatkan lembaga jasa keuangan formal.

Jumlah anak juga menentukan kepala rumah tangga untuk memiliki tabungan. Sebanyak 52% kepala keluarga dengan jumlah anak banyak (4-6 anak) memiliki rekening keuangan formal. Sedangkan hanya 41% rumah tangga dengan anak sedikit (1-3 anak) yang memiliki rekening keuangan formal. Kondisi yang relatif sama dialami oleh kepala keluarga yang memilih tidak menggunakan rekening keuangan formal. Sekali lagi, kondisi ini bagi penulis merupakan fenomena bahwa beberapa kepala keluarga memilih untuk tidak memanfaatkan rekening keuangan formal secara sukarela. Jika melihat hasil penelitian ini, kondisi ini berkebalikan dari penelitian sebelumnya dari

Vibriyanti (2014) yang menyatakan bahwa justru kepala keluarga dengan sedikit anak (1-3 anak) cenderung mempunyai rekening tabungan dibandingkan dengan kepala keluarga dengan banyak anak (4-6 anak).

Tanpa diduga, orang tua dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) adalah mayoritas kelompok yang menggunakan bank sebagai media penyimpanan uang, diikuti oleh kelas orang tua dengan pendidikan sekolah menengah dan sarjana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara umum, rumah tangga yang memiliki tabungan merupakan rumah tangga dengan kepala keluarga yang lebih terdidik. Yang sedikit mengejutkan adalah fakta bahwa kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti S2 dan S3, ada yang tidak menggunakan tabungan di lembaga jasa keuangan formal sama sekali, meskipun sangat sedikit. Selanjutnya, seperti yang sama-sama kita perkirakan sebelumnya bahwa kelompok yang tidak menggunakan jasa keuangan formal adalah kepala keluarga tidak bersekolah. Namun yang mengejutkan adalah kepala rumah tangga dengan ijazah SD ternyata lebih mendominasi sebagai golongan yang tidak menggunakan jasa keuangan formal. Apabila hasil penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sejenis oleh Vibriyanti (2014), ternyata hasilnya berbeda. Menurut Vibriyanti (2014), level pendidikan tetap berpengaruh secara positif terhadap kepemilikan rekening tabungan. Penulis berpandangan perbedaan ini dikarenakan dalam penelitian ini yang menjadi tolak ukur adalah usia kepala rumah tangga, sedangkan dalam penelitian Vibriyanti(2014), tolak ukurnya adalah pendidikan para anggota keluarga yang produktif.

Tentang kepala keluarga yang masih mempunyai tanggungan, kami membagi dua kategori yaitu tanggungan anggota keluarga muda (<17 tahun) dan tanggungan yang terdiri dari orang tua. Dua golongan ini masih tinggal serumah dengan keluarga inti dan menjadi tanggungan kepala keluarga. Data menunjukkan bahwa kepala keluarga dengan tanggungan kurang dari empat orang anak yang belum menikah cenderung akan memiliki rekening bank dibandingkan dengan orang tua dengan lebih banyak anak. Di sisi lain, keluarga yang tidak mempunyai tanggungan orang tua cenderung mempunyai tabungan atau memanfaatkan layanan keuangan formal. Hal yang relatif sama disimpulkan oleh Vibriyanti (2014) dalam penelitian sebelumnya.

Jenis kelamin kepala rumah tangga juga memberikan pengaruh terhadap kepemilikan tabungan. Kepala rumah tangga laki-laki biasanya termasuk kelompok yang tidak

memiliki tabungan di bank. Selanjutnya, persentase rumah tangga leluhur laki-laki yang tidak memiliki tabungan lebih rendah daripada yang memiliki. Hasil ini sedikit berbeda dengan hasil dari Vibriyanti (2014) yang menyatakan persentase rumah tangga dengan kepala keluarga laki-laki yang tidak memiliki tabungan lebih tinggi daripada rumah tangga yang memilikinya.

Jenis pekerjaan kepala rumah tangga juga berkontribusi pada penelitian ini. Seperti yang sudah kita duga, kepala rumah tangga yang bekerja di sektor formal biasanya memiliki rekening tabungan di bank daripada mereka yang bekerja di sektor informal. Selain itu, kepala rumah tangga yang bekerja di sektor nonpertanian juga memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan jasa tabungan pada lembaga keuangan formal. Selain tabungan, bank sebagai lembaga jasa keuangan formal juga menyediakan layanan kredit. Rumah tangga Indonesia yang tidak memiliki kredit/ pinjaman cenderung tidak membuka rekening tabungan juga. Kondisinya sama dengan rumah tangga tanpa tabungan. Namun, persentase rumah tangga yang tidak memiliki kredit/ pinjaman di rumah tangga yang tidak memiliki tabungan lebih tinggi daripada yang memiliki tabungan. Akhirnya, lokasi rumah tangga juga berdampak pada milik rekening tabungan. Rumah tangga yang tinggal di daerah perkotaan cenderung memiliki rekening tabungan. Mayoritas rumah tangga yang tidak memiliki tabungan berasal dari keluarga yang tinggal di daerah pedesaan.

Faktor yang Mempengaruhi Kepala Rumah Tangga untuk Mengakses Lembaga Keuangan Formal. Dalam model *logit*, kita akan menginterpretasikannya dari koefisien *odds ratio*. Model dengan variabel dependen adalah kepemilikan tabungan, menunjukkan bahwa semua variabel sosio-demografi secara signifikan mempengaruhi kepemilikan tabungan rumah tangga. Namun demikian ada tiga variabel yang berpengaruh secara negatif terhadap kepemilikan jumlah tabungan yaitu banyaknya tanggungan anak-anak, bidang pekerjaan kepala keluarga di sektor pertanian, dan lokasi tempat tinggal di pedesaan berpengaruh negatif terhadap kepemilikan rekening tabungan seperti pada tabel 2. Secara lengkap, faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan rekening tabungan oleh kepala keluarga adalah sebagai berikut;

a. Usia kepala rumah tangga. Koefisien positif berarti sebagai kepala rumah tangga semakin tua, itu akan merangsang mereka untuk membuka rekening tabungan bank. Dari *odds ratio*, kita dapat melihat bahwa peningkatan satu tahun usia kepala rumah tangga akan

memiliki kemungkinan untuk membuka rekening tabungan bank 1,04 kali dibandingkan dengan yang lebih muda. Namun, koefisien kuadrat usia bernotasi negatif. Hal ini menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, kecenderungan untuk menabung dalam rekening layanan keuangan formal akan menurun. Hal ini berkebalikan dari penelitian Vibriyanti (2014) yang menyatakan bahwa usia kepala rumah tangga berpengaruh negatif terhadap kepemilikan tabungan.

b. Jumlah anggota keluarga juga mempengaruhi kepemilikan akun di lembaga jasa keuangan formal. Tanda koefisien positif berarti semakin banyak anggota rumah tangga, ada kecenderungan bagi kepala rumah tangga untuk membuka rekening tabungan bank. Angka dari *odds ratio* juga menunjukkan bahwa tambahan satu anggota keluarga memiliki kemungkinan kepala keluarga untuk membuka rekening bank 1,04 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih sedikit. Hal ini bertolak belakang dari penelitian Vibriyanti (2014) yang menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga berpengaruh negatif terhadap kepemilikan tabungan.

c. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Arah koefisien positif berarti tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang lebih tinggi akan meningkatkan kecenderungan kepala rumah tangga untuk membuka rekening bank. *Odds ratio* juga menunjukkan bahwa jika tingkat pendidikan meningkat satu tingkat, itu akan mendorong peningkatan kesempatan untuk membuka rekening bank sebesar 1,2 kali dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Dalam Vibriyanti (2014), menggunakan tingkat pendidikan anggota usia produktif sebagai variabel. Meskipun dalam penelitian ini yang menjadi variabel hanyalah tingkat pendidikan kepala keluarga saja, hasilnya mirip dengan penelitian sebelumnya oleh Vibriyanti (2014) yaitu bahwa tingkat pendidikan anggota rumah tangga yang produktif berpengaruh secara positif terhadap kepemilikan tabungan.

d. Anggota muda dari keluarga. Koefisien negatif berarti keberadaan anggota keluarga di bawah 17 tahun atau anak-anak yang belum menikah yang masih tinggal di rumah yang sama dengan kepala rumah tangga akan mengurangi kemungkinan kepala keluarga untuk memiliki tabungan di lembaga formal. Dan, kemungkinannya 0,7 kali lebih rendah

dibandingkan dengan kondisi apabila tidak memiliki tanggungan anak. Hal ini berkebalikan dari penelitian Vibriyanti (2014) yang menyatakan bahwa keberadaan anggota muda sebagai tanggungan hidup kepala rumah tangga berpengaruh negatif terhadap kepemilikan tabungan. Sebaliknya, keberadaan orang tua atau mertua yang tinggal dengan anak-anak mereka di masa tua akan meningkatkan kemungkinan kepala

keluarga untuk memiliki tabungan di bank. Kemungkinannya 1,08 lebih tinggi dibandingkan dengan kepala rumah tangga yang tidak merawat orang tua mereka di rumah mereka. Hal ini sejalan dari penelitian Vibriyanti (2014) yang menyatakan bahwa keberadaan anggota keluarga yang sudah tua sebagai tanggungan hidup kepala rumah tangga berpengaruh positif terhadap kepemilikan tabungan.

Tabel 2 . Hasil dari Regresi Logistik Biner dari variabel sosio-demografi pada Kepemilikan Rekening Tabungan

Kepemilikan Akun Tabungan	Koefisien	Odds Ratio	P>z
Umur Kepala Rumah Tangga	.0396 *** (0.004)	1.0404	0.000
Umur Kepala Rumah Tangga Kuadrat	-.0003 *** (0.000)	.9996	0.000
Jumlah Anggota Keluarga	.0446 *** (0.006)	1.0456	0.000
Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga	.1873 *** (0.004)	1.2060	0.000
Banyaknya Tanggungan Anak	-.3189 *** (0.040)	.7269	0.000
Banyaknya Tanggungan Orang Tua	.0845 ** (0.035)	1.0887	0.016
Jenis Kelamin Kepala Keluarga			
Laki-laki	.0849 *** (0.024)	1.0887	0.000
Perempuan			
Pekerjaan Kepala Keluarga			
Formal	.1714 *** (0.021)	1.1870	0.000
Non Formal			
Bidang Pekerjaan Kepala Keluarga			
Pertanian	-.2563 *** (0.019)	.7738	0.000
Non Pertanian			
Status Kredit Kepala Keluarga			
Punya Hutang	.6033 *** (0.058)	1.8282	0.000
Tidak Punya Hutang			
Lokasi			
Desa	-.3146 *** (0.019)	.7300	0.000
Kota			
Konstan	-1.0352 *** (0.102)		0.000

Jumlah Observasi 71,568 ; Standard errors dalam tanda kurung; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
 Sumber : Susenas 2015, data diolah

- e. Jenis kelamin kepala keluarga. Rumah tangga kepala laki-laki dapat menginduksi membuka rekening tabungan dibandingkan dengan perempuan. Ini menunjukkan dari koefisien regresi yang positif. Juga, peluangnya adalah 1,08 lebih tinggi dari kepala rumah tangga perempuan. Hal ini berkebalikan dari penelitian Vibriyanti (2014) yang menyatakan bahwa keberadaan kepala keluarga perempuan justru sebagai pendorong kepala keluarga untuk membuka rekening tabungan.
- f. Jenis pekerjaan kepala rumah tangga. Jika kepala rumah tangga bekerja sebagai pekerja formal, kemungkinan bagi mereka untuk membuka rekening tabungan lebih baik daripada jika mereka bekerja sebagai pekerja non-formal. Kepala keluarga dengan pekerjaan formal memiliki kesempatan untuk membuka rekening bank 1,18 kali lebih besar daripada kepala

keluarga yang bekerja non-formal. Hal ini sesuai dengan penelitian Vibriyanti (2014). Di sisi lain, sektor lapangan pekerjaan kepala rumah tangga juga menunjukkan alasan pembukaan rekening tabungan bank. Kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian memiliki 0,77 kali lebih kecil membuka rekening tabungan di bank daripada kepala rumah tangga yang bekerja di sektor non-pertanian. Sayangnya, hal ini berkebalikan dari penelitian Vibriyanti (2014).

- g. Kepemilikan kredit dalam rekening keuangan formal juga meningkatkan peluang mereka membuka rekening tabungan bank 1,8 kali lebih besar daripada kepala rumah tangga yang tidak mengambil layanan kredit perbankan sama sekali. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Vibriyanti (2014).
- h. Kepala rumah tangga yang tinggal di daerah pedesaan memiliki 0,73 kali lebih kecil daripada mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Vibriyanti (2014).

KESIMPULAN

Hasil penelitian memberikan profil rumah tangga dan mengidentifikasi faktor bagi rumah tangga untuk mengakses lembaga keuangan formal dalam membuat rekening tabungan. Dengan menggunakan metode model *logit*, probabilitas bagi rumah tangga untuk mendapatkan tabungan di lembaga formal dipengaruhi oleh karakteristik demografi seperti usia, anggota keluarga total, pemuda dan anggota lama yang tergantung dalam rumah tangga. Pendidikan, pekerjaan, dan sektor lapangan kepala rumah tangga, serta status kredit dan lokasi kepala rumah tangga sebagai faktor penentu bagi kepala keluarga untuk membuka rekening tabungan di lembaga keuangan formal.

REKOMENDASI

1. Kebijakan untuk meningkatkan tingkat keuangan inklusif di Indonesia perlu dipertimbangkan penyusunannya.
2. Studi ini merupakan konfirmasi atas studi sebelumnya tentang faktor penentu bagi rumah tangga untuk mengakses lembaga keuangan formal. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya sangat dimungkinkan mengingat penelitian sebelumnya sudah dilakukan sangat lama yaitu pada tahun 2007.

DAFTAR PUSTAKA

Aaerge, R., Liu, K., & Zhu, Y. (2017). Political uncertainty and household savings. *Journal of Comparative Economics*, 45(1), 154–170. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2015.12.011>

Badan Pusat Statistik. 2016. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2015. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Beck, T., Senbet, L., & Simbanegavi, W. (2015). Financial Inclusion and Innovation in Africa: An Overview. *Journal of African Economies*, 24, i3–i11. <https://doi.org/10.1093/jae/eju031>

Beckmann, E. (2013). Financial Literacy and Household Savings in Romania. *Financial Literacy and Household Savings in Romania*, 6(2), Article 9. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5038/1936-4660.6.2.9>

Demirgüç-Kunt, A., & Klapper, L. (2012). Measuring Financial Inclusion: The Global Findex Database. *World Bank Policy Research Working Paper*, 6025(April), 1–61. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9509-7>

Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Van Oudheusden, P. (2015). The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion around the World. *World Bank Policy Research Working Paper* 7255. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-7255>

Honohan, P. (2008). Cross-country variation in household access to financial services. *Journal of Banking and Finance*, 32(11), 2493–2500. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2008.05.004>

Iqbal, B. A., & Sami, S. (2017). Role of banks in financial inclusion in India. *Papel. Contaduria y Administracion*, 62, 644–656. <https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.01.00>

Iwaisako et. al. (2016). Impact of population aging on household savings and portfolio choice in Japan. *Real Estate Markets, Financial Crisis, and Economic Growth : An Integrated Economic Approach. Working Paper Series* No.61. <http://www.ier.hit-u.ac.jp/hit-refined/wp-content/uploads/2013/12/wp.061.pdf>

Khan, R. E. A., & Hye, Q. M. A. (2010). Financial sector reforms and household savings in Pakistan: An ARDL approach. *African Journal of Business Management*, 4(16), 3447–3456. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2567414

Kibet, L. K., Mutai, B. K., Ouma, D. E., Ouma, S. a, & Owuor, G. (2009). Determinants of household saving : Case study of smallholder farmers , entrepreneurs and teachers in rural areas of Kenya. *Journal of Development and Agricultural Economics*, 1(7), 137–143. Retrieved from <http://www.academicjournals.org/JDAE>

Moav, O., & Neeman, Z. (2012). Saving Rates and Poverty: The Role of Conspicuous Consumption and Human Capital. *Economic Journal*, 122(563), 933-956. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2012.02516.x>

Morgan, Peter and Pontines, Victor, Financial Stability and Financial Inclusion (July 9, 2014). ADBI Working Paper 488. Available at SSRN: <http://scihub.tw/https://ssrn.com/abstract=2464018> or <http://scihub.tw/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2464018>

Muradoglu & Taskin (1996). Differences In Household Savings Behavior: Evidence From Industrial And Developing Countries. *The Developing Economies*, XXXIV-2 (June 1996). https://www.researchgate.net/profile/Gulnur_Muradoglu/publication/229777758_Differences_in_Household_Savings_Behaviour_Evidence_From_Industrial_and_Developing_Countries/links/09e4150d1a777cdf69000000.pdf

Park, C.-Y., & Mercado, R. V. (2015). Financial Inclusion, Poverty and Income Inequality In Developing Asia. ADB Economics Working Paper Series, (426), 17.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)

Sharma, D. (2016). Nexus between financial inclusion and economic growth: evidence from the emerging Indian economy. *Journal of Financial Economic Policy*, 8(1), 13-36. <https://doi.org/10.1108/JFEP-01-2015-0004>

Swamy, V. (2014). Financial Inclusion, Gender Dimension, and Economic Impact on Poor Households. *World Development*, 56, 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.10.019>

Vibriyanti, D. (2014). The Effect of Socio-Demographic Variables on Household Saving in Indonesia (The Analysis of the 2007 IFLs Data). *Developing Country Studies*. Vol.4, No.1, 2014. ISSN 2224-607X (Paper) ISSN 2225-0565 (Online)

Wang, X., & Guan, J. (2017). Financial inclusion: measurement, spatial effects and influencing factors. *Applied Economics*, 49(18), 1751-1762. <https://doi.org/10.1080/00036846.2016.1226488>

WorldBank (2012). The Little Data Book on Financial Inclusion 12. World Bank Group.

WorldBank (2015). The Little Data Book on Financial Inclusion 15. World Bank Group.

Zins, A., & Weill, L. (2016). The determinants of financial inclusion in Africa. *Review of Development Finance*, 6(1), 46-57. <https://doi.org/10.1016/j.rdf.2016.05.001>.

Hasil Penelitian

DETERMINAN PARTISIPASI KELUARGA BERENCANA PADA KELUARGA PRA SEJAHTERA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN: SURVEI DEMOGRAFI DAN KESEHATAN INDONESIA

(DETERMINANT OF FAMILY PLANNING PARTICIPATION OF PRE- PROSPEROUS FAMILY IN SOUTH SUMATERA PROVINCE: DEMOGRAPHIC AND HEALTH SURVEY INDONESIA)

Dio Febria, M. Yazid, Nura Malahayati

Universitas Sriwijaya
Jalan Padang Selasa No. 524, Bukit Besar Palembang, Indonesia 30139
Telepon: 0711-354222, 352132 Fax: 0711-317202, 320310
email: diofebria@ymail.com

Diterima: 26 Maret 2018; Direvisi: 12 April 2018; Disetujui: 18 April 2018

ABSTRAK

Jumlah penduduk yang besar di Indonesia memberikan dampak negatif antara lain, masalah kesehatan, kemiskinan, pengangguran, dan kriminalisasi. Program Keluarga Berencana (KB) memiliki implikasi dalam menurunkan angka kelahiran untuk mensejahterakan masyarakat. Pada tahun 2012, angka partisipasi KB keluarga pra sejahtera di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 24 persen lebih besar dibandingkan keluarga sejahtera I, II, III, dan III+. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor apa saja yang menentukan partisipasi KB pada keluarga pra sejahtera di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini merupakan analisis kuantitatif, menggunakan data sekunder dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 dengan metode analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap partisipasi KB pada keluarga pra sejahtera yaitu jumlah anak dan usia suami, dengan nilai koefisien jumlah anak adalah positif yang berarti semakin banyak anak (> 2 anak) maka semakin tinggi peluang istri untuk berpartisipasi KB. Nilai koefisien usia suami adalah negatif yang artinya semakin muda usia suami maka semakin tinggi peluang istri untuk berpartisipasi KB. Sementara variabel lain yaitu: usia istri, pendidikan istri, partisipasi istri dalam bekerja, tempat tinggal, ukuran keluarga ideal, komunikasi suami istri, dan kunjungan petugas KB tidak secara signifikan menentukan tingkat partisipasi KB seorang istri. Pemerintah seharusnya mensosialisasikan program keluarga berencana sejak awal pernikahan, agar keluarga pra sejahtera berpartisipasi KB sebelum memiliki banyak anak. Selain itu, perlu penelitian lebih lanjut terkait efektivitas alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan (pil dan suntik KB) pada keluarga pra sejahtera.

Kata Kunci: keluarga berencana, keluarga pra sejahtera, jumlah anak, usia suami

ABSTRACT

The great number of the population in Indonesia could create several negative impacts such as: health, poverty, unemployment, and crime problems. Family Planning program (FP) has implication in decreasing natality rate in order to enhance social wealth. In 2012, FP participation rate of pre-prosperous family in South Sumatera Province (24%) is greater than that of the prosperous I, II, III, and III+ family. Thus, the purpose of this research is analyzing which factors determining FP participation rate of pre-prosperous family in South Sumatera Province. The research is a quantitative analysis using secondary data from Demographic and Health Survey (DHS) of Indonesia 2012, analysed by logistic regression. The result shows that two variables significantly affecting FP participation rate are the number of children and age of the husband. The number of children is a positive coefficient meaning that number of children (> 2 children), the higher probability of a wife to participate in family planning. Age of husband is a negative coefficient meaning that the younger the husband's age, the higher probability of a wife to participate in family planning. In contrast, other variables, namely: age of wife, education of

wife, wife's participation in work, residence, size of the ideal family, communication between wife and husband, and number of visits of FP officer do not significantly affect the FP participation rate of wife. Government should socialize FP program for early stage of marriage, so that the pre-prosperous family would participate in the FP program before they have many children. In addition, further research is needed on the effectiveness of the most used contraception (pill and contraceptive injection) on the pre-prosperous family.

Keywords: family planning, pre-prosperous family, number of children, age of husband

PENDAHULUAN

Secara garis besar masalah-masalah pokok di bidang kependudukan yang dihadapi di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi, penyebaran penduduk yang tidak merata dan tingkat sosial ekonomi rendah (Sanusi, 2003). Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sebesar 255.587.921 jiwa (Hasbullah, 2018). Jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan sebesar 1,49 persen per tahun (Badan Pusat Statistik, 2010). Jumlah penduduk yang besar di Indonesia tentunya memberikan berbagai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari jumlah penduduk yang besar adalah penyediaan tenaga kerja, mempertahankan keutuhan negara, dan lain sebagainya (Dwidagdo, 2012), sedangkan dampak negatif dari jumlah penduduk yang besar antara lain, masalah kesehatan, pendidikan, kemiskinan, pengangguran, kriminalisasi, dan konflik lainnya (Muqorobinagungnugroho, 2013).

Program Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang kependudukan memiliki implikasi yang tinggi dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan penurunan angka kelahiran total yang bermanfaat untuk pengembangan dan peningkatan taraf hidup masyarakat (Suratun, 2008). Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan Staf Peneliti Lembaga Demografi Universitas Indonesia (2000) mengenai salah

satu faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran antara lain adalah kontrasepsi (pencegahan pembuahan). Keluarga Berencana merupakan tindakan yang bertujuan untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur jarak di antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga dengan menggunakan metode kontrasepsi (WHO, 2007).

Program KB memiliki manfaat yang besar diantaranya adalah menurunkan resiko penyakit reproduksi pada wanita seperti kanker rahim, mencegah penularan penyakit berbahaya seperti HIV, mengurangi angka kematian ibu dan bayi lahir (Dinas Kesehatan, 2016). Manfaat KB sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dengan agenda untuk mencapai akses kesehatan masyarakat agar hidup sehat dan sejahtera (UCLG, 2016). Menurut Shah et al. (2011), program KB berhubungan erat dengan status ekonomi keluarga. Wanita usia subur (WUS) yang memiliki status ekonomi tinggi lebih banyak yang menjalankan program KB dibandingkan WUS dengan status ekonomi rendah. Hal ini juga diperkuat oleh Pastuti dan Wilopo (2007), hubungan yang signifikan antara status ekonomi dengan partisipasi KB. Status ekonomi tinggi (sangat kaya) memiliki peluang yang lebih besar untuk membatasi kelahiran dibandingkan dengan responden yang berada pada status ekonomi rendah (sangat miskin).

Tabel 1. Partisipasi KB Berdasarkan Status Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012

Status Ekonomi	Partisipasi KB (menggunakan kontrasepsi)					Total	Persen (%)
	Pil	IUD	Suntikan	Implan	dan lain-lain		
Pra Sejahtera	19	2	119	17	8	165	24
Sejahtera I	23	1	106	13	12	155	23
Sejahtera II	22	1	104	14	10	151	22
Sejahtera III	20	7	64	6	21	118	17
Sejahtera III+	12	5	43	5	28	93	14
Jumlah	96	16	436	55	79	682	100

Sumber: SDKI, 2012

Gakidou dan Vayena (2007) menyebutkan bahwa penggunaan kontrasepsi modern oleh orang miskin mutlak tetap rendah, di Amerika Latin kesenjangan penggunaan kontrasepsi modern jauh lebih besar antara orang miskin dengan rata-rata nasional. Selanjutnya Nielsen et al. (2012) juga menyatakan hal yang demikian, bahwa hambatan penggunaan kontrasepsi modern adalah biaya serta ketersediaan kontrasepsi modern. Berdasarkan penelitian di atas, dapat diasumsikan bahwa status ekonomi rendah selalu menjadi kendala WUS untuk ikut berpartisipasi KB. Namun lain halnya yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, angka partisipasi KB WUS dengan status ekonomi rendah (keluarga pra sejahtera) memiliki kontribusi yaitu sebesar 24 persen (SDKI, 2012). Persentase partisipasi KB pada keluarga pra sejahtera lebih tinggi dibandingkan keluarga sejahtera I, II, III, dan III+ di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Menurut Bertrand (1980) faktor-faktor yang menentukan partisipasi KB berkaitan erat dengan penggunaan kontrasepsi dikelompokkan menjadi 3, yaitu faktor sosio-demografi, sosio-psikologi, dan faktor pelayanan kesehatan. Faktor sosio-demografi diukur melalui indikator usia, pendidikan, pendapatan keluarga, dan status pekerjaan. Faktor sosio-psikologi diukur melalui indikator ukuran keluarga ideal, pentingnya anak laki-laki, komunikasi suami istri, persepsi terhadap kematian anak. Beberapa faktor yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan antara lain keterlibatan dalam kegiatan yang berhubungan dengan keluarga berencana, pengetahuan tentang sumber kontrasepsi, jarak ke pusat pelayanan, keterlibatan dengan media massa (Cau, 2015). Wanita yang berusia 30 - 49 tahun lebih kecil kemungkinan untuk menggunakan metode kontrasepsi modern dibanding kelompok umur 15 - 29 tahun (Sumini et al., 2009). Latar belakang karakteristik sosio demografi seperti umur memiliki hubungan dengan pemakaian alat kontrasepsi. Umur wanita memiliki pengaruh yang sangat signifikan dengan partisipasi KB (Pastuti dan Wilopo, 2007).

Berdasarkan faktor sosial budaya yaitu tingkat pendidikan responden memiliki hubungan dengan kelangsungan pemakaian kontrasepsi (Sistri, 2008). Tingkat pendidikan mempengaruhi seseorang dalam menentukan kontrasepsi yang digunakan (Wang, 2012). Seorang perempuan yang menempuh pendidikan lebih lama mampu merencanakan program keluarga berencana secara lebih matang (Alam et al., 2003). Wanita dengan tingkat pendidikan yang tinggi secara signifikan meningkatkan peluang penggunaan metode

kontrasepsi modern (Cau, 2015). Pendidikan, status ekonomi, penyerapan informasi KB, layanan KB, jarak kelahiran memiliki hubungan dengan pemakaian alat kontrasepsi dalam menurunkan angka kelahiran (Sumini et al., 2009). Status pekerjaan responden memiliki hubungan dengan kelangsungan pemakaian kontrasepsi (Sistri, 2008). Paritas memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan partisipasi KB (Pastuti dan Wilopo, 2007). Wanita yang mempunyai satu anak memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk menggunakan metode kontrasepsi modern (Cau, 2015). Jumlah wanita usia subur (WUS) yang mengikuti program KB baik di kota maupun di desa memiliki proporsi yang sama (Siahaan et al., 2011). Pemakaian alat kontrasepsi pada responden yang tinggal di desa lebih mampu menekan angka kelahiran secara signifikan dibanding yang tinggal di kota (Sumini et al., 2009). Seseorang yang tinggal di kota cenderung lebih banyak menggunakan kontrasepsi modern seperti kondom daripada yang tinggal di desa (Wang, 2012).

Faktor-faktor yang memilih metode kontrasepsi salah satunya adalah faktor usia pasangan (Hartanto, 2004). Jumlah anak yang diinginkan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dengan partisipasi KB (Pastuti dan Wilopo, 2007). Keinginan suami yang mendominasi dalam hal ukuran keluarga ideal mempengaruhi seorang istri untuk ikut berpartisipasi KB (Memon dan Jonker, 2018). Seorang suami sangat mempengaruhi istri untuk mengambil keputusan termasuk dalam menentukan KB (Ackerson dan Zielinski, 2017). Interaksi dengan petugas KB memiliki peluang yang besar bagi wanita untuk ikut berpartisipasi KB (Shafii et al., 2014). Dari beberapa hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor apa saja yang menentukan partisipasi KB pada keluarga pra sejahtera di Provinsi Sumatera Selatan, dilihat dari faktor sosio demografi, sosio-psikologi, dan faktor yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan.

METODE

Penelitian menggunakan analisis kuantitatif. Pelaksanaan SDKI 2012 dilakukan di 33 Provinsi di Indonesia pada bulan Mei sampai dengan Juli 2012. Populasi dan sampel pada SDKI 2012, dimana populasi ialah rumah tangga biasa yang bertempat tinggal di blok sensus biasa, sementara sampel adalah daftar blok sensus pada PSU (Primary Sampling Unit) terpilih yang dilengkapi dengan informasi jumlah rumah tangga hasil listing Sensus Penduduk 2010. Sampel penelitian ditentukan sesuai tujuan

penelitian, dengan karakteristik responden wanita usia subur berusia 15 – 49 tahun pada keluarga pra sejahtera di Provinsi Sumatera Selatan, berstatus kawin, menggunakan kontrasepsi/berpartisipasi KB atau tidak menggunakan kontrasepsi/tidak berpartisipasi KB. Jumlah sampel WUS kategori keluarga pra sejahtera di Sumatera Selatan adalah 296. Selanjutnya wanita berstatus kawin sebanyak 240, sedangkan 3 sampel adalah wanita menopause. Data yang hilang terdapat pada variabel ukuran keluarga ideal sebanyak 18 sampel dan usia suami sebanyak 1 sampel. Sehingga hasil akhir sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 218 responden, terdiri dari berpartisipasi KB (154 responden) dan tidak berpartisipasi KB (64 responden).

Penelitian menggunakan data sekunder dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 dengan instrumen kuesioner daftar pertanyaan wanita melalui wawancara langsung. Pengumpulan data dilakukan oleh BKKBN, BPS, Kementerian Kesehatan, Measure DHS, dan ICF International. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi KB berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang terkait, selanjutnya disesuaikan dengan data mentah yang ada pada SDKI 2012. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi logistik diolah menggunakan komputer dengan program Statistical Program and Service Solution (SPSS). Model persamaan pada penelitian yaitu:

$$\ln \frac{Y}{1-Y} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \beta_9 X_9$$

Dimana:

- Y = Peluang seorang istri pada keluarga pra sejahtera (1= berpartisipasi KB; 0= tidak berpartisipasi KB)
- β_0 = Konstanta
- β_{1-9} = Parameter dugaan (koefisien logistik)
- X = Variabel bebas disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel	Nama Variabel	Definisi Operasional
Variabel terikat	Partisipasi KB	Menggunakan atau tidak alat/cara KB untuk menunda/ mencegah kehamilan
Variabel bebas	Usia istri (X ₁)	Ulang tahun terakhir istri saat survey
	Pendidikan istri (X ₂)	Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/ sedang diduduki oleh istri
	Partisipasi istri dalam bekerja (X ₃)	Istri yang bekerja atau tidak bekerja
	Jumlah anak (X ₄)	Jumlah anak sebelum menggunakan kontrasepsi pertama kali
	Tempat tinggal (X ₅)	Wilayah daratan yang ditinggali responden
	Usia suami (X ₆)	Ulang tahun terakhir suami saat survey
	Ukuran keluarga ideal (X ₇)	Jumlah anak yang diinginkan tanpa memperhatikan jenis kelamin
	Komunikasi suami istri (X ₈)	Diskusi antara suami istri mengenai KB
	Kunjungan petugas KB (X ₉)	Kedatangan petugas KB ke rumah responden selama 12 bulan terakhir sebelum survei SDKI dilakukan

Sumber: SDKI (2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

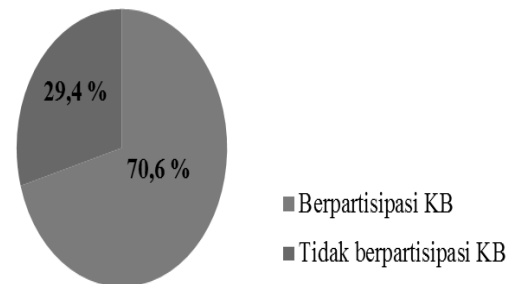
Partisipasi atau tidak berpartisipasi KB, berkaitan erat dengan menggunakan atau tidak menggunakan kontrasepsi pada saat survei SDKI 2012 dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang diperoleh menunjukkan 70,6 persen responden berpartisipasi KB, sedangkan sisanya adalah 29,4 persen responden tidak berpartisipasi KB. Distribusi frekuensi variabel terikat dapat dilihat pada Gambar 1. Distribusi frekuensi variabel bebas dapat disajikan pada Tabel 3. Diketahui distribusi usia istri yang paling banyak berpartisipasi KB pada keluarga pra sejahtera di Provinsi Sumatera Selatan adalah istri yang berusia 21 – 35 tahun yaitu sebesar 72,7 persen. Istri yang berpartisipasi KB paling banyak menempuh tingkat pendidikan rendah < SMP yaitu mencapai 73,2 persen.

Istri yang berpartisipasi KB dengan status pekerjaan selain mengurus rumah tangga memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan istri yang berstatus ibu rumah tangga. Status pekerjaan istri selain mengurus rumah tangga yang dominan adalah sebagai tenaga usaha pertanian dan tenaga produksi dengan masing-masing persentase yaitu sebesar 38,3 dan 19,5. Hasil distribusi frekuensi juga menunjukkan bahwa partisipan KB pada keluarga pra sejahtera yang memiliki lebih dari 2 anak yaitu sebesar 77,2 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan partisipan KB yang memiliki kurang dari sama dengan 2 anak yaitu sebesar 68,3 persen. Partisipan KB yang tinggal di kota lebih sedikit dibandingkan partisipan KB yang tinggal di desa. Hal ini dikarenakan partisipan yang dikategorikan keluarga pra sejahtera paling banyak menetap di pedesaan.

Usia pasangan partisipan KB pada penelitian ini paling banyak yang berusia muda dengan kisaran 19 – 20 tahun yaitu sebesar 75,0 persen. Partisipan KB yang menginginkan lebih dari 2 anak memiliki proporsi yaitu sebesar 73,1 persen lebih besar dibandingkan partisipan KB yang memiliki keinginan kurang dari sama dengan 2 anak yaitu sebesar 69,3 persen. Istri yang berpartisipasi KB melakukan komunikasi bersama suami memiliki persentase yang lebih tinggi sebanyak 12,4 persen dibandingkan istri yang berpartisipasi KB tanpa komunikasi bersama suami. Selisih antara partisipan KB yang dikunjungi petugas KB dengan tidak dikunjungi petugas KB adalah 7,5 persen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap partisipasi KB yaitu jumlah anak dan usia suami dengan nilai signifikansi 0,01 dan 0,001 dapat dilihat pada Tabel 4. Variabel jumlah anak menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan, yang berarti banyak atau sedikit anak sangat

mempengaruhi seorang istri pada keluarga pra sejahtera untuk ikut berpartisipasi KB. Nilai koefisien jumlah anak bertanda positif yang berarti semakin banyak anak maka semakin besar probabilitas seorang istri untuk berpartisipasi KB.



Gambar 1. Frekuensi Variabel Terikat

Nilai Odds Ratio jumlah anak adalah sebesar 2,039, artinya kecenderungan istri yang mempunyai banyak anak berpartisipasi KB 2,039 kali lebih besar daripada istri yang mempunyai sedikit anak. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Islam et al., 2017), jumlah anak yang hidup mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan kontrasepsi, signifikannya bertambahnya jumlah anak maka semakin meningkatnya partisipasi KB oleh WUS. Koefisien positif jumlah anak terhadap penggunaan kontrasepsi, semakin banyak jumlah anak maka semakin tinggi peluang wanita untuk menggunakan kontrasepsi (Rashad, 2000).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia suami memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi KB. Nilai koefisien usia suami adalah negatif, artinya semakin muda usia suami maka semakin tinggi peluang seorang istri untuk ikut berpartisipasi KB. Nilai Odds Ratio usia suami adalah sebesar 0,949, artinya usia suami yang muda memiliki kecenderungan seorang istri untuk ikut berpartisipasi KB 0,949 kali lebih besar daripada usia suami yang lebih tua. Hasil penelitian ini sejalan dengan Hartanto (2004) usia suami merupakan salah satu faktor yang menentukan wanita untuk ikut berpartisipasi KB. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara usia istri dengan partisipasi KB pada keluarga pra sejahtera di Provinsi Sumatera Selatan.

Usia muda atau tua seorang istri tidak memiliki pengaruh terhadap partisipasi KB. Variabel ini tidak bermakna karena dipengaruhi oleh sebagian besar responden berusia 21–35 tahun sebanyak 72,7 persen, dimana (Hartanto, 2004) menyatakan bahwa pada usia tersebut

adalah usia yang paling baik untuk hamil dan melahirkan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sistri (2008), tidak terdapat hubungan antara umur ibu dengan kelangsungan pemakaian kontrasepsi di Indonesia dalam periode waktu 1997–2002.

Tingkat pendidikan yang pernah ditempuh oleh seorang istri ternyata tidak mempengaruhi partisipasi KB seorang istri, dimana latar belakang pendidikan istri dengan tingkat pendidikan rendah atau pendidikan tinggi tidak memiliki hubungan dengan seorang istri yang berpartisipasi KB. Variabel pendidikan istri tidak bermakna dikarenakan oleh jumlah responden dengan tingkat pendidikan rendah pada keluarga pra sejahtera mencapai 73,2 persen. Hasil analisis tersebut bertentangan dengan temuan Cau (2015), dimana wanita

dengan tingkat pendidikan yang tinggi secara signifikan meningkatkan peluang penggunaan metode kontrasepsi modern.

Partisipasi istri dalam bekerja pada penelitian ini menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap partisipasi KB seorang istri. Jumlah responden selain mengurus rumah tangga yang ikut berpartisipasi KB maupun yang mengurus rumah tangga berpartisipasi KB proporsinya yang paling tinggi. Demikian pula istri yang tidak bekerja berpartisipasi KB atau tidak berpartisipasi KB proporsinya sama tinggi. Oleh sebab itu, bekerja atau tidak bekerja seorang istri tidak mempengaruhi partisipasi KB. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sistri (2008) yang menyatakan bahwa status pekerjaan ibu mempengaruhi kelangsungan pemakaian kontrasepsi.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Sampel

Variabel Bebas	Partisipasi KB	Tidak berpartisipasi KB
	Persentase (%)	Persentase (%)
Usia istri (X ₁)		
15 - 20 tahun	55,0	45,0
21 - 35 tahun	72,7	27,3
36 - 49 tahun	71,2	28,8
Pendidikan istri (X ₂)		
< SMP	73,2	26,8
SMP	63,8	36,2
≥ SMA	72,2	27,8
Partisipasi istri dalam bekerja (X ₃)		
Tidak bekerja	65,0	35,0
Bekerja	73,9	26,1
Jumlah anak (X ₄)		
≤2	68,3	31,7
>2	77,2	22,8
Tempat tinggal (X ₅)		
Kota	68,0	32,0
Desa	71,0	29,0
Usia suami (X ₆)		
19 - 20 tahun	75,0	25,0
21 - 35 tahun	69,9	30,1
36 - 71 tahun	71,4	28,6
Ukuran keluarga ideal (X ₇)		
≤2	69,3	30,7
>2	73,1	26,9
Komunikasi suami istri (X ₈)		
Tidak	69,4	30,6
Ya	81,8	18,2
Kunjungan petugas KB (X ₉)		
Tidak	70,3	29,7
Ya	77,8	22,2

Sumber: Data SDKI yang diolah, 2017

Tabel 4. Hasil Regresi Logistik

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I.for	
						EXP(B)	Lower	Upper
**** Usia istri (X ₁)	-.005	.036	.016	1	.898	.995	.927	1.069
Pendidikan istri (X ₂)	-.055	.303	.033	1	.856	.947	.522	1.715
Partisipasi istri dalam bekerja (X ₃)	.403	.332	1.473	1	.225	1.496	.781	2.866
Jumlah anak (X₄)	.713	.164	18.784	1	.000**	2.039	1.478	2.815
Tempat tinggal (X ₅)	-.045	.502	.008	1	.929	.956	.357	2.558
Usia suami (X₆)	-.053	.020	7.230	1	.007*	.949	.913	.986
Ukuran keluarga ideal (X ₇)	-.121	.135	.800	1	.371	.886	.680	1.155
Komunikasi suami istri (X ₈)	.629	.593	1.124	1	.289	1.875	.586	5.998
Kunjungan petugas KB (X ₉)	-.332	.885	.141	1	.708	.717	.126	4.068
Constant	1.783	1.377	1.677	1	.195	5.949		

Keterangan: signifikansi *(p < 0,01) dan ** (p < 0,001)
 Sumber: Data SDKI diolah (2017)

Tempat tinggal tidak mempunyai hubungan dengan partisipasi KB. Hal ini dikarenakan oleh jumlah responden yang lebih banyak tinggal di desa yaitu sebesar 71,0 persen. Situasi ini terjadi karena distribusi keluarga pra sejahtera masih banyak terjadi di wilayah pedesaan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Pastuti dan Wilopo (2007), yang menunjukkan pengaruh status tempat tinggal terhadap penggunaan IUD.

Analisis statistik menunjukkan jumlah anak yang diinginkan tidak memiliki pengaruh terhadap partisipasi KB seorang istri. Hal ini disebabkan oleh jumlah responden yang menginginkan banyak anak maupun keinginan mempunyai sedikit anak, memiliki selisih yang tidak jauh berbeda yaitu sebesar 3,8 persen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Khraif et al. (2017), yang menunjukkan bahwa jumlah anak yang diinginkan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan penggunaan kontrasepsi. Komunikasi suami istri adalah diskusi antara suami dan istri tentang KB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada relevansi antara komunikasi suami istri dengan partisipasi KB seorang istri. Hasil penelitian ini bertentangan dengan (Ackerson dan Zielinski, 2017) yang menyatakan bahwa wanita yang ikut berpartisipasi KB dipengaruhi oleh suami dan anggota keluarganya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh kunjungan petugas KB terhadap partisipasi KB. Hasil penelitian ini sejalan dengan analisis Sumini et al. (2007) yang menyatakan bahwa kunjungan petugas KB tidak

memiliki hubungan dengan penggunaan alat kontrasepsi. (Ackerson dan Zielinski, 2017) Persepsi WUS tentang penyedia layanan kesehatan yang tidak memenuhi syarat, berakibat pada ketidakpercayaan WUS untuk ikut berpartisipasi KB. Konseling KB dipengaruhi oleh faktor sosial budaya, agar konseling berjalan efektif, diperlukan pelatihan guna melahirkan petugas KB yang berkualitas untuk menciptakan kepercayaan peserta KB menggunakan kontrasepsi yang tepat (Vara-Salazar et al., 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan data SDKI 2012 menunjukkan bahwa angka partisipasi KB pada keluarga pra sejahtera di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 24 persen lebih besar dibandingkan keluarga sejahtera I, II, III, III+. Berdasarkan faktor sosio demografi; jumlah anak dan usia suami berpengaruh signifikan terhadap partisipasi KB. Semakin banyak anak, maka semakin tinggi peluang istri untuk ikut berpartisipasi KB, sementara semakin muda usia suami maka semakin tinggi peluang seorang istri untuk ikut berpartisipasi KB. Sementara untuk usia istri, pendidikan istri, partisipasi istri dalam bekerja, dan tempat tinggal tidak berpengaruh terhadap partisipasi KB. Berdasarkan faktor sosio-psikologis; ukuran keluarga ideal dan komunikasi suami istri tidak mempengaruhi istri untuk ikut berpartisipasi KB. Di samping itu, faktor yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan; kunjungan petugas KB tidak memiliki relevansi terhadap partisipasi KB seorang istri.

REKOMENDASI

Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meskipun angka partisipasi KB pada kategori keluarga pra sejahtera sudah cukup tinggi, akan tetapi hasil penelitian menunjukkan partisipasi KB pada keluarga pra sejahtera terjadi setelah pasangan memiliki anak lebih dari 2 orang. Oleh sebab itu, perlu perhatian khusus untuk lebih mensosialisasikan program keluarga berencana sejak awal pernikahan, baik melalui media cetak, media elektronik maupun interaksi secara langsung.
2. Diharapkan dinas terkait dapat bekerja sama dengan tenaga medis untuk memberikan dukungan dan menyediakan alat kontrasepsi yang lebih efektif agar tercapai tujuan program KB.
3. Hendaknya kesadaran masyarakat keluarga pra sejahtera juga perlu ditingkatkan untuk merencanakan pentingnya membatasi jumlah anak sejak awal pernikahan agar kesehatan reproduksi tetap terjaga dan hidup menjadi lebih sehat. Hal ini berguna untuk menciptakan keluarga bahagia sejahtera serta berkualitas.
4. Sebaiknya diperlukan pelatihan yang berkualitas kepada petugas KB agar dapat menampung dan menerima konsultasi peserta KB secara lebih dekat, sehingga peserta KB merasa lebih nyaman dan cocok menggunakan alat kontrasepsi yang dibutuhkan.
5. Perlu perhatian penggunaan kontrasepsi pada keluarga pra sejahtera, Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menganalisis efektivitas alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan pada keluarga pra sejahtera (suntikan dan pil KB).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Ir. M. Yazid, M.Sc., Ph.D dan Ibu Ir. Nura Malahayati, M.Sc. Ph.D., Ibu Dr. Dra. Nengyanti, M.Hum, Bapak Prof. Dr. Didik Susetyo, M.Si, Ibu Dr. Azizah Husin, M.Pd, Bapak Dr. Bambang Suprihatin, M.Si, serta Ibu Dr. Novrikasari, S.K.M., M.Kes.

DAFTAR PUSTAKA

Ackerson, K., dan Zielinski, R. 2017. Factors Influencing Use of Family Planning in Women Living in Crisis Affected Areas of Sub Saharan Africa: A Review of The Literature. *Journal of Midwifery* [Online]. Dari: <http://cyber.sci-hub.tw/MTAuMTAxNi9qLm1pZHcuMjAxNy4wNy4wMjE=/10.1016%40j.midw.2017.07.021.pdf> [Diakses: 7 Maret 2018].

Alam, S., Ahmed, M. H., dan Butt, M. S. 2003. The Dynamics of Fertility, Family Planning and Female Education in Pakistan. *Journal of Asian Economics* [Online] Edisi 14. Dari: [https://sci-hub.tw/https://doi.org/10.1016/S1049-0078\(03\)00037-X](https://sci-hub.tw/https://doi.org/10.1016/S1049-0078(03)00037-X) [Diakses: 2 Maret 2018].

Badan Pusat Statistik. 2010. *Laporan Penduduk Indonesia Menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota Sensus Penduduk 2010* [Online]. Dari: https://sp2010.bps.go.id/files/ebook/populasi_indonesia_20101017/index.html [Diakses: 18 Januari 2017].

Badan Pusat Statistik. 2013. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012*. Jakarta.

Bertrand, J. T. 1980. *Audience Research for Improving Family Planning Communication Programs*. United States of America: The Community and Family Study Center, hal 5-11.

BKKBN, BPS, Kementerian Kesehatan, Measure DHS, dan ICF International. 2013. *Laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012* [Online]. Dari: <http://chnrl.org/pelatihan-demografi/SDKI-2012.pdf> [Diakses: 29 Februari 2016].

BPS, BKKBN, Kementerian Kesehatan, Measure DHS, dan ICF International. 2012. *Kuesioner SDKI 2012 Daftar Pertanyaan Wanita* [Online]. Dari: <https://sirusa.bps.go.id/webadmin/kuesioner/SDKI12-WUS.pdf> [Diakses: 2 Oktober 2016].

Cau, B. M. 2015. Community Influences on Contraceptive Use in Mozambique. *Journal of Health & Place* [Online]. Dari: <http://cyber.sci-hub.tw/MTAuMTAxNi9qLmhlYWx0aHBsYWwNlJlJwMTQuMTAuMDA2/10.1016%40j.healthplace.2014.10.06.pdf> [Diakses: 24 Maret 2017].

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tengah. 2016. 9 Manfaat KB bagi Keluarga [Online]. Dari: <https://pkmsribhawono.files.wordpress.com/2016/05/keluarga-sehat-manfaat-kb.pdf> [Diakses: 16 Maret 2018].

Dwidagdo, G. 2012. Permasalahan Pertumbuhan Penduduk [Online]. Dari: <https://imahagiregion3.wordpress.com/2012/06/04/permasalahan-pertumbuhan-penduduk/> [Diakses: 10 Maret 2018].

Gakidou, E. dan Vayena, E. 2007. Use of Modern Contraception by The Poor is Falling Behind. *Journal of Plos Medicine* [Online] Edisi 2. Dari: <http://cyber.sci-hub.tw/MTAuMTM3MS9qb3VybmFsLnBtZWQuMDA0MDAzMQ==/10.1371%40journal.pmed.0040031.pdf> [Diakses: 1 Mei 2017].

Hartanto, H. 2004. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Hasbullah, M. S. 2018. Pentingnya Data Statistik dan Analisis Kependudukan untuk Perencanaan Pembangunan. *Kuliah Tamu Program Studi Kependudukan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya*. Palembang, 15 Maret 2018.
- Islam, A. Z., Rahman, M., dan Mostofa, M. G. 2017. Association between Contraceptive Use and Socio-Demographic Factors of Young Fecund Women in Bangladesh. *Sexual & Reproductive Healthcare* [Online]. Dari: <http://cyber.sci-hub.tw/MTAuMTAxNi9qLnNyaGMuMjAxNy4wNS4wMDE=/10.1016%40j.srhc.2017.05.001.pdf> [Diakses: 2 Maret 2018].
- Khraif, R., Salam, A. A., Al-Mutairi, A., Elsegaey, I., dan Ajumah, A. 2017. Dynamics of Contraceptive Use: A Study of King Saud University Women Staff, Riyadh. *Middle East Fertility Society Journal* [Online] Edisi 1. Dari: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110569016300954> [Diakses: 2 Maret 2018].
- Memon, F., dan Jonker, L. 2018. Educational Level and Family Planning Among Pakistani Women: A Prospective Explorative Knowledge, Attitude and Practice Study. *Middle East Fertility Society Journal* [Online]. Dari: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110569017302133> [Diakses: 2 Maret 2018].
- Muqorobinangunugroho. 2013. Dampak Negatif dan Positif Pertumbuhan Penduduk [Online]. Dari: <https://muqorobinangunugroho.wordpress.com/2013/10/31/dampak-negatif-dan-positif-pertumbuhan-penduduk/> [Diakses: 10 Maret 2018].
- Nielsen, K. K., Nielsen, S. M., Butler, R., dan Lazarus, J. V. 2012. Key Barriers to The Use of Modern Contraceptives among Women in Albania: A Qualitative Study. *Journal of Reproductive Health Matters* [Online] Edisi 40. Dari: <http://cyber.sci-hub.tw/MTAuMTAxNi9zMDk2OC04MDgwKDEyKTQwNjgxLTQ=/10.1016%40s0968-8080%2812%2940681-4.pdf> [Diakses: 24 Maret 2017].
- Pastuti, R. dan Wilopo, S. A. 2007. Determinan Penggunaan Metode Kontrasepsi IUD di Indonesia Analisis Data SDKI 2002 – 2003. *Berita Kedokteran Masyarakat* [Online] Edisi 2. Dari: <https://journal.ugm.ac.id/bkm/article/view/3627> [Diakses: 6 April 2017].
- Rashad, H. 2000. Demographic Transition in Arab Countries: A New Perspective. *Journal of Population Research* [Online] Edisi 1. Dari: <http://cyber.sci-hub.tw/MTAuMTAwNy9iZjAzMDI5NDQ5/10.1007%40bf03029449.pdf> [Diakses: 14 Maret 2018].
- Sanusi, S. R. 2003. Masalah Kependudukan di Negara Indonesia [Online]. Dari: <http://library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-sri%20rahayu.pdf> [Diakses: 14 April 2017].
- Shafii, T., Hoopes, A. J., Benson, S. K., Ko, L. K., Morrison, D. M., Buesseler, H. M., Golden, M. R., dan Holmes, K. K. 2014. How Does The Provider-Patient Interaction Shape The Experience of Sexual Health Communication? A Qualitative Study of Adolescents and Young Adults. *Journal of Adolescent Health* [Online] Edisi 2. Dari: <http://cyber.sci-hub.tw/MTAuMTAxNi9qLmphZG9oZWf5dGGuMjAxMjY4xMC4wNDg=/10.1016%40j.jadohealth.2013.10.048.pdf> [Diakses: 17 Maret 2018].
- Shah, N. M., Wang, W., dan Bishai, D. M. 2011. Comparing Private Sector Family Planning Services to Government and Ngo Services in Ethiopia and Pakistan: How Do Social Franchises Compare Across Quality, Equity and Cost?. *Journal of Health Policy and Planning* [Online] Edisi 1. Dari: <http://cyber.sci-hub.tw/MTAuMTA5My9oZWfwb2wvY3pyMDI3/10.1093%40heapol%40czzr027.pdf> [Diakses: 1 Mei 2017].
- Sistri, S. 2008. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kelangsungan Pemakaian Kontrasepsi di Indonesia (Studi Analisis SDKI 2002 – 2003). Tesis, Universitas Indonesia.
- Staf Peneliti Lembaga Demografi Universitas Indonesia. 2000. Dasar-dasar Demografi. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sumini, Tsalatsa, Y., dan Kuntohadi, W. 2009. *Analisis Lanjut SDKI 2007 Kontribusi Pemakaian Alat Kontrasepsi terhadap Fertilitas*. Jakarta: Puslitbang KB dan Kesehatan Reproduksi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
- Suratun. 2008. Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi. Jakarta: Trans Info Media.
- United Cities and Local Governments. 2016. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan [Online]. Dari: <https://www.uclg.org/sites/default/files/tujuan-sdgs.pdf> [Diakses: 2 Maret 2018].
- Vara-Salazar, E. D., Suárez-López, L., Rivera, L., dan Lazcano-Ponce, E. 2018. Providers Perspective and Geographic and Institutional Factors Associated with Family Planning Counseling. *Sexual & Reproductive Healthcare* [Online]. Dari: <http://cyber.sci-hub.tw/MTAuMTAxNi9qLnNyaGMuMjAxOC4wMS4wMDU=/10.1016%40j.srhc.2018.01.005.pdf> [Diakses: 2 Maret 2018].
- Wang, C. 2012. Trends in Contraceptive Use and Determinants of Choice in China: 1980–2010. *Journal of Contraception* [Online] Edisi 6. Dari: <http://cyber.sci-hub.tw/MTAuMTAxNi9qLmNvbnRyYWNlcHRpb24uMjAxMS4xMC4wMTQ=/10.1016%40j.contraception.2011.10.014.pdf> [Diakses: 2 Maret 2017].
- World Health Organization. 2007. Family Planning a Global Handbook for Providers [Online]. Dari: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44028/1/9780978856373_eng.pdf [Diakses: 31 Januari 2017].

Hasil Penelitian

ASPEK INOVASI DAN TEKNOLOGI DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN DANAU TOBA DI KABUPATEN SAMOSIR

(INNOVATION AND TECHNOLOGY ASPECTS IN REGENCY OF SAMOSIR ON THE DEVELOPMENT OF THE TOBA LAKE ZONE)

Anton Parlindungan Sinaga

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
Jl. Sisingamangaraja No. 198 Medan 20126
email: antonsinaga94@gmail.com

Diterima: 16 April 2018 ; Direvisi: 30 April 2018; Disetujui: 18 Mei 2018

ABSTRAK

Danau Toba merupakan salah satu kawasan yang termasuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2010-2025. Kabupaten Samosir merupakan salah satu dari tujuh Kabupaten di Kawasan Danau Toba. Dalam upaya pengembangan Danau Toba sebagai kawasan wisata terdapat enam isu dan permasalahan, yaitu : pelestarian sumber daya air, perikanan dan lingkungan, pertanian dan perkebunan, budaya, pariwisata, serta infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis inovasi, teknologi, dan sarana prasarana yang dibutuhkan Kabupaten Samosir dalam mendukung pengembangan pariwisata.. Pengambilan data menggunakan metode wawancara dengan penyebaran kuisioner pada populasi sampel. Sampel penelitian terdiri dari: wisatawan, penduduk setempat, pelaku usaha, pemerintah daerah dan stakeholders terkait. Dari hasil penelitian diperoleh untuk Kabupaten Samosir dibutuhkan inovasi sosial, inovasi dan teknologi pengolahan air Danau Toba, inovasi dan teknologi IPAL, inovasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan, inovasi infrastruktur (homestay), inovasi kuliner, inovasi produk tenun ulos, inovasi dan teknologi pengolahan kopi, kacang dan bawang, inovasi transportasi air, inovasi harga, inovasi pengelolaan cagar budaya, inovasi koordinasi kolaboratif, inovasi infrastruktur (rambu-rambu wisata), inovasi dan teknologi pengolahan daging kerbau, serta inovasi toilet yang berstandar internasional.

Kata kunci: pariwisata, Danau Toba, Kabupaten Samosir, inovasi

ABSTRACT

Lake Toba is one area that belongs to the National Tourism Strategic Area (KSPN) as Government Regulation Number 50 Year 2011 on Master Plan of Tourism Development Year 2010-2025. Samosir regency is one of seven districts in the area of Lake Toba. In the effort to develop Lake Toba as a tourist area there are six issues and problems, namely: conservation of water resources, fisheries and environment, agriculture and plantation, culture, tourism, and infrastructure. This study aims to analyze the types of innovation, technology, and infrastructure needed by Samosir Regency in supporting tourism development. Data collection using interview method with questionnaires distribution in sample population. The study sample consisted of: tourists, local people, business actors, local government and related stakeholders. From the research results obtained for Samosir District needed social innovation, innovation and water treatment technology of Lake Toba, innovation and technology of WWTP, policy innovation and governance, innovation infrastructure (homestay), culinary innovation, ulos weaving product innovation, , beans and onions, water transport innovations, price innovations, cultural heritage management innovations, collaborative coordination innovations, infrastructure innovations, buffalo meat processing innovations and technologies, and innovation of international standard toilets.

Keywords: tourism, Lake Toba, Samosir District, innovation

PENDAHULUAN

Danau Toba merupakan salah satu kawasan yang termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2010-2025. Danau Toba merupakan danau tektonik-vulkanik yang menempati kaldera dari sebuah supervulkano dengan ukuran panjang sekitar 100 km, lebar 30 km dan kedalaman hingga 505 m yang di tengahnya terdapat Pulau Samosir. Danau Toba terdiri dari badan danau, Daerah Tangkapan Air (DTA), Cekungan Air Tanah (CAT) dan daratan yang dikelilingi oleh 7 kabupaten dan 28 kecamatan, yakni 1 kecamatan di Kabupaten Karo, 7 kecamatan di Kabupaten Simalungun, 8 kecamatan di Kabupaten Toba Samosir, 1 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara, 2 kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan, 8 kecamatan di Kabupaten Samosir, dan 1 kecamatan di Kabupaten Dairi. Debit keluaran (outflow) Danau Toba sekitar 100 m³/dt sehingga diperkirakan waktu tinggal (retention time) atau waktu yang diperlukan untuk membilas seluruh volume danau mencapai 81 tahun yang merupakan cukup panjang dibandingkan dengan danau-danau lain di Indonesia (Nontji, 2016).

Terdapat enam isu dan permasalahan dalam upaya pengembangan Danau Toba sebagai kawasan wisata, yaitu: pelestarian sumber daya air, perikanan dan lingkungan, pertanian dan perkebunan, budaya, pariwisata, dan infrastruktur. Pada pelestarian sumber daya air di Kawasan Danau Toba terdapat empat isu utama, yaitu: 1) luntarnya nilai-nilai kearifan lokal budaya suku Batak yang membuat fungsi Danau Toba sebagai sumber air kehidupan mulai menurun, dimana dahulu Danau Toba dikenal sebagai raja dari segala danau sehingga masyarakat sangat menghormati dan menjaga kualitas airnya; 2) perilaku masyarakat dan dunia usaha yang membuang limbah domestik dan limbah cair ke badan air Danau Toba; 3) meningkatkan kegiatan Kerambah Jaring Apung (KJA) yang menyebabkan terjadinya peningkatan pencemaran air Danau Toba; serta, 4) terbatasnya sumber air bersih yang memenuhi syarat kesehatan karena selama ini masyarakat dan pelaku usaha pariwisata hanya memanfaatkan Danau Toba sebagai sumber air tanpa proses pengolahan lebih lanjut.

Pada subsektor perikanan dan lingkungan ada lima isu permasalahan yang ditemui, yaitu: 1) kondisi perairan Danau Toba yang telah mengalami pencemaran sehingga kualitas air danau menurun; 2) ikan endemik terdapat di Danau Toba yang terancam punah sebagai

akibat kegiatan budidaya ikan dengan sistem KJA sebanyak 5.612 unit yang menghasilkan limbah organik cukup tinggi dan pada akhirnya menghasilkan proses nitrifikasi; 3) minimnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan sarana prasarana kebersihan; 4) meningkatnya lahan yang kritis yang sudah mencapai lebih dari 65% dari luas DTA yang mencapai sebesar 133.351,83 ha; dan, 5) kehilangan kawasan hutan mencapai 16.000 ha akibat eksplotasi industri *pulp* dan kebakaran hutan.

Adapun isu utama dalam pembangunan pariwisata di Kawasan Danau Toba terbagi lima, yaitu: 1) memiliki potensi wisata panorama alam akibat proses geologi dan wisata budaya; 2) terjadinya penurunan jumlah wisatawan; 3) sebagai salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas dalam KSPN untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara menjadi 1 juta orang pada tahun 2019; 4) keterkaitan destinasi pariwisata Danau Toba dengan Kota Medan dan daerah *hinterland* dengan infrastruktur jaringan jalan yang masih banyak dengan kondisi rusak dan sempit; dan, 5) adanya pesta adat yang dikenal dengan nama Pesta Danau Toba yang diikuti etnik batak (Angkola-Mandailing, Karo, Pakpak-Dairi, Simalungun, dan Toba).

Berbagai promosi wisata yang dilakukan belum secara signifikan dapat meningkatkan kunjungan wisata di Kawasan Danau Toba dan bahkan pada akhir-akhir ini telah terjadi kecenderungan penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Permasalahan ini terjadi sebagai akibat kurangnya dilakukan penataan oleh pemerintah dan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku wisata di Kawasan Danau Toba. Pembangunan pariwisata Danau Toba yang seharusnya dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan beberapa daerah kabupaten dalam satu kawasan selama ini hanya dilakukan secara parsial, sehingga keterpaduan dan dukungan berbagai infrastruktur di bidang pariwisata belum memadai mulai dari hulu hingga hilir.

Pada sektor infrastruktur terdapat empat isu utama, yaitu: 1) akses jalan untuk kegiatan wisata panorama Danau Toba yang padat, masih banyak yang rusak dan sempit; 2) prasarana bandar udara dan dermaga penyeberangan kurang memadai untuk mendukung kegiatan wisata; 3) minimnya pasokan listrik di sekitar Kawasan Danau Toba sebagai akibat potensi panas bumi di Pusuk Buhit dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sigura-gura yang tidak maksimal untuk memenuhi kebutuhan listrik di sekitar kawasan Danau Toba; dan, 4) keterbatasan infrastruktur pendukung pariwisata seperti air bersih, sarana kebersihan,

pengolahan limbah dan lain-lain sebagai layaknya sebuah kawasan destinasi wisata. Pembelajaran berkelanjutan dan akuisisi pengetahuan dari wisatawan menjadi penting karena inovasi produk pariwisata adalah transformasi dalam berbagai bidang (Ismayanti, 2015).

Pengembangan Kawasan Danau Toba yang berdaya saing, diperlukan perencanaan, program dan kegiatan dalam berbagai bentuk. Dalam produk wisata terdapat alat ukur yang berbeda salah satunya adalah kepuasan. Sebelum memasuki pembahasan tentang strategi pengembangan produk, perlu sekali untuk diketahui konsep perencanaan karena rencana merupakan langkah awal untuk membangun (Martina dan Adimulya, 2013). Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan yaitu melalui pemanfaatan dan pengembangan inovasi dan teknologi yang berorientasi pada kondisi objektif sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor unggulan yang dimiliki masing-masing daerah di kawasan tersebut. Melalui pemanfaatan dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi diharapkan akan dapat mempercepat peningkatan pembangunan pariwisata di Kawasan Danau Toba melalui nilai tambah yang diberikan. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengembangan inovasi dan teknologi perlu diarahkan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan solusi bagi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pariwisata Danau Toba. Freeman (2004) menganggap inovasi merupakan upaya perusahaan melalui penggunaan teknologi dan informasi untuk mengembangkan, memproduksi dan memasarkan produk yang baru untuk industri. Dengan kata lain inovasi adalah modifikasi atau penemuan ide untuk perbaikan secara terus-menerus dan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Menurut Ahmed dan Shepherd (2010), inovasi perusahaan dapat dihasilkan melalui *Research and Development (R and D)*, dimana produksi dan pemasaran pada akhirnya akan menghasilkan komersialisasi inovasi. Dengan kata lain inovasi adalah proses mewujudkan ide baru yang berbeda dengan sebelumnya melalui cara produksi, dimana inovasi termasuk generasi evaluasi, konsep baru dan implementasi. Perkembangan kebutuhan inovasi dan teknologi yang cukup pesat pada era saat sekarang ini, dapat digunakan sebagai acuan untuk menetapkan kebutuhan inovasi dan teknologi yang diperlukan guna untuk memajukan pembangunan kawasan Danau Toba. Adapun inovasi dan teknologi yang

dibutuhkan di kawasan Danau Toba berdasarkan permasalahan yang ada adalah di bidang infrastruktur, produk unggulan daerah dan sumberdaya manusia selaku pelaku wisata yang diarahkan untuk membangun daya saing yang pada akhirnya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Inovasi dan teknologi muncul sebagai pemicu utama pembangunan, hal ini diperlukan karena inovasi dan teknologi merupakan salah satu faktor penggerak utama keberhasilan dalam memenangkan persaingan global saat ini.

Karakteristik inovasi yang mempengaruhi cepat atau lambat penerimaan informasi menurut Rogers (2003) terdiri dari keunggulan relatif, kompatibilitas, kerumitan, kemampuan diujicobakan dan kemampuan untuk diamati. Kebutuhan akan inovasi dan teknologi terhadap kemajuan suatu negara merupakan salah satu faktor kebutuhan mendasar bagi pertumbuhan ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat dengan menciptakan mutu dan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing. Pemerintah telah menetapkan UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat dijadikan landasan untuk memajukan inovasi dan teknologi tersebut. Pasal 21 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berperan mengembangkan instrumen kebijakan dalam bentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program iptek, dan pembentukan lembaga.

Berbagai kebijakan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan berperan dalam meningkatkan pembangunan pariwisata di Kawasan Danau Toba melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Sejalan hal tersebut, untuk mengetahui kebutuhan akan inovasi dan teknologi guna mendukung pembangunan pariwisata di kawasan Danau Toba, maka perlu dilakukan kegiatan penelitian tentang Analisis Kebutuhan Inovasi dan Teknologi Untuk Mendukung Pengembangan Pariwisata di Kawasan Danau Toba. Menurut Sumitro Djojohadikusumo dalam Erwinsyah (2015), sifat teknologi ada 3 (tiga) macam, yaitu: Teknologi maju (*advance technology*), Teknologi adaptif (*adaptive technology*) dan Teknologi protektif (*protective technology*).

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kajian-kajian Lainnya Bidang Inovasi dan Teknologi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi diharapkan pembangunan

pariwisata di kawasan Danau Toba akan menjadi semakin berkembang dan memiliki daya saing serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis inovasi, teknologi, dan sarana prasarana yang dibutuhkan Kabupaten Samosir dalam mendukung pengembangan pariwisata.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik Observasi Lapangan, Focus Group Discussion (FGD), Wawancara, Angket atau Kuisisioner, Studi Dokumentasi, Studi Pustaka. Populasi adalah seluruh pelaku yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pariwisata di kawasan Danau Toba yang termasuk dalam daerah Kabupaten Samosir, diantaranya adalah wisatawan, penduduk setempat, pelaku usaha, pemerintah daerah dan stakeholders terkait lainnya. Penentuan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, sedangkan penentuan jumlah sampel dengan metode kuota.

Pengumpulan data primer melibatkan sampel yang berasal dari: masyarakat, pelaku usaha, wisatawan, Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Provinsi dan Kabupaten Samosir (Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Koperasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan). Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi literatur dari buku dan referensi serta dari media cetak maupun instansi yang terkait dengan kegiatan kajian dalam bentuk hasil kajian dan laporan yang terkait dengan pariwisata, inovasi dan teknologi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat. Penilaian persepsi masyarakat terkait akan kebutuhan inovasi dan teknologi dalam upaya untuk pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba diperoleh melalui wawancara kepada masyarakat yang berada di kawasan tersebut. Dari analisis yang dilakukan diperoleh hasil penilaian persepsi masyarakat terhadap kebutuhan inovasi dan teknologi di lokasi-lokasi wisata yang berada pada daerah kabupaten Samosir yang masih

pada daerah kawasan Danau Toba selengkapnya sebagaimana pada Tabel 1.

Inovasi Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan. Kebutuhan akan inovasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan untuk pengembangan kawasan Danau Toba, diperoleh tanggapan responden bervariasi dengan 62,30% responden sangat setuju; 24,60% setuju; 8,50% netral dan 3,10% tidak setuju serta 1,30 sangat tidak setuju akan adanya inovasi kebijakan dan tata kelola pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai besar masyarakat di kawasan Danau Toba sangat membutuhkan berbagai inovasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan guna untuk pengembangan kawasan Danau Toba, terutama berupa perbaikan sistem koordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah di daerah kabupaten, antar pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat.

Dukungan terhadap keberhasilan program pengembangan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata nasional memerlukan komitmen yang tegas dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Karenanya penetapan Rencana Induk Kepariwisataaan Kawasan Danau Toba yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten yang harus dilaksanakan oleh masing-masing tingkatan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Rencana Induk Kepariwisataaan Kawasan Danau Toba diperlukan agar pembangunan pariwisata di kawasan danau Toba dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan serta sesuai dengan tata ruang wilayah.

Inovasi Sosial. Inovasi sosial yang dibuat akan berlaku bagi masyarakat lokal dan pelaku usaha yaitu berupa peningkatan keramahtamahan dan kejujuran masyarakat setempat melalui program sosialisasi, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, pemerintah pusat maupun lembaga-lembaga lainnya. Sebagian besar responden menyatakan sangat setuju dengan adanya inovasi sosial yaitu 57,70 %, 36,90% menyatakan setuju dan 5,40% netral. Hal ini berarti bahwa para wisatawan sangat membutuhkan keramahtamahan dan kejujuran masyarakat dan pelaku wisata lainnya yang merupakan nilai tambah untuk sebuah daerah destinasi wisata. Salah contohnya adalah dalam hal menjual makanan yang dilakukan harus dengan pelayanan yang ramah dan jujur serta dilengkapi dengan label halal sesuai standar halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim.

Permasalahan ketidakramahan dan ketidakjujuran yang terjadi selama ini menjadikan kekecewaan bagi wisatawan karena merasa dibohongi yang pada akhirnya akan

dapat menurunkan jumlah wisatawan dan frekuensi kunjungan wisata di kawasan Danau Toba.

Tabel 1. Persentase Jawaban Responden Terhadap Kebutuhan Inovasi dan Teknologi di Kawasan Danau Toba

No	Inovasi dan Teknologi	Persentase Jawaban Responden				
		SS	S	N	TS	STS
1	Inovasi Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan	62,30	24,60	8,50	3,10	1,50
2	Inovasi Sosial	57,70	36,90	5,40	0,00	0,00
3	Inovasi Harga	46,90	43,80	8,50	0,80	0,00
4	Inovasi Infrastruktur	43,10	40,80	15,40	0,80	0,00
5	Inovasi Pengelolaan Cagar Budaya	51,50	28,50	19,20	0,80	0,00
6	Inovasi Transportasi	29,20	60,80	10,00	0,00	0,00
7	Inovasi dan Teknologi Pengolahan Produk Unggulan	28,50	51,50	19,20	0,80	0,00
8	Inovasi dan Teknologi Pengolahan Limbah dan Sampah	24,60	55,40	19,20	0,80	0,00
9	Inovasi dan Teknologi Informasi	44,60	30,80	24,60	0,00	0,00
10	Inovasi Hukum dan Kelembagaan	30,00	37,70	31,50	0,80	0,00
11	Inovasi Kuliner	21,50	57,70	18,50	2,30	0,00

Sumber: Data penelitian (2017)

Keterangan: SS = Sangat Setuju; S = Setuju; N= Netral; TS = Tidak Setuju; STS = Sangat Tidak Setuju

Inovasi Harga. Inovasi harga yang dibutuhkan untuk pengembangan pariwisata di kawasan wisata Danau Toba adalah adanya keseragaman dalam hal harga terhadap barang atau produk dengan kualitas yang sama yang dijual, keseragaman biaya redistribusi masuk objek wisata dan redistribusi parkir yang perlu didukung dengan kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Bupati. Dari hasil wawancara diperoleh sebanyak 46,90% menyatakan sangat setuju, 43,80% setuju, 8,50% netral dan 0,80% tidak setuju. Dengan adanya keseragaman harga berarti adanya jaminan kepastian harga terhadap barang/produk yang dijual/ditawarkan sehingga menjadikan para wisatawan tidak ragu-ragu untuk membeli berbagai produk yang dijual di kawasan wisata Danau Toba. Kepastian harga ini secara langsung akan dapat meningkatkan jumlah dan frekwensi pembelian wisatawan dan sekaligus berdampak kepada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan wisata. Melalui adanya kepastian harga ini akan menjadikan wisatawan tidak perlu lagi membawa makanan dari rumah atau tempat asalnya.

Inovasi Infrastruktur. Inovasi infrastruktur yang dibutuhkan di kawasan Danau Toba berupa *homestay* yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang nyaman sangat dibutuhkan wisatawan. Dari hasil penilaian terhadap persepsi masyarakat diperoleh 43,10% sangat setuju, 40,80% setuju, 15,40% netral dan 0,80% tidak setuju. Untuk inovasi *homestay* ini memang masih memerlukan sosialisasi di masyarakat, hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat belum paham dengan sistem *homestay*. *Homestay* diperlukan karena sebagian wisatawan membutuhkan suasana yang asri dan berbau dengan masyarakat yang sangat berbeda dengan suasana penginapan di hotel. *Homestay* yang dibangun harus memenuhi standar dalam hal kelengkapan fasilitas dan kebersihan sebagaimana layaknya sebuah *homestay* yang sesuai dengan standar kebutuhan wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Dengan tersedianya *homestay* diharapkan akan dapat meningkatkan tingkat kenyamanan wisatawan dan sekaligus dapat memperpanjang waktu kunjungan di kawasan Danau Toba.

Inovasi Pengelolaan Cagar Budaya. Pengembangan kawasan wisata Danau Toba memerlukan inovasi pengelolaan cagar budaya

dengan menampilkan berbagai wisata budaya yang cukup banyak dimiliki guna untuk dapat menarik minat wisatawan untuk menikmatinya. Inovasi cagar budaya yang diperlukan berupa perbaikan dan pemeliharaan terhadap berbagai objek cagar budaya yang dimiliki dengan cara menampilkannya secara lebih menarik. Pendanaan secara berkesinambungan diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan cagar budaya yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas publik di sekitar cagar budaya dan retribusi yang wajar. Hasil penilaian terhadap persepsi masyarakat menunjukkan bahwa 51,50% sangat setuju, 28,50% setuju, 19,20% netral dan 0,80% tidak setuju. Inovasi cagar budaya ini diperlukan dikarenakan banyaknya cagar budaya yang ada di kawasan Danau Toba namun tidak tertata dan terkelola secara baik.

Inovasi Transportasi. Inovasi transportasi yang dibutuhkan di kawasan Danau Toba berupa tersedianya fasilitas jalan raya yang memadai, rute alternatif menuju kawasan Danau Toba guna untuk menghindari kemacetan, tersedianya alat transportasi yang layak dan nyaman menuju objek wisata serta adanya pengembangan pelabuhan penyeberangan dan bandar udara Silangit dan Sibisa. Sebagian responden menyatakan sangat setuju yaitu 29,20% dan 60,80% setuju serta 10,00% netral, artinya bahwa sebagian besar responden membutuhkan fasilitas transportasi yang nyaman dan bebas dari kemacetan yang panjang. Kemacetan merupakan permasalahan yang selalu dihadapi para wisatawan untuk akses ke kawasan Danau Toba.

Teknologi Pengolahan Produk Unggulan. Diperlukan untuk pengolahan berbagai produk unggulan yang memiliki ciri khas yang dapat digunakan sebagai kuliner dan cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan Danau Toba. Teknologi pengolahan yang dibutuhkan tersebut dalam bentuk teknologi tepat guna atau teknologi terapan guna untuk memberikan nilai tambah dan daya saing berbagai produk unggulan daerah serta sekaligus akan memberikan tambahan pendapatan masyarakat setempat. Adapun teknologi tepat guna yang diperlukan kawasan Danau Toba adalah teknologi mengatasi hama tanaman budidaya (kopi, jeruk, mangga dan lain-lain), teknologi pembuatan *souvenir* khas daerah dan teknologi industri berbasis pertanian dan perkebunan. Hasil penilaian persepsi masyarakat terhadap kebutuhan teknologi pengolahan produk unggulan diperoleh bahwa sebanyak 51,50% menyatakan setuju, 28,50% sangat setuju, 19,23% netral dan 0,80% tidak setuju. Dengan demikian untuk menghasilkan produk dengan berkualitas tinggi

dibutuhkan teknologi yang tepat, dimana dengan adanya teknologi memungkinkan untuk memproduksi produk dalam skala besar dengan kualitas terjamin.

Inovasi dan Teknologi Pengolahan Limbah dan Sampah. Penanganan limbah dan sampah merupakan salah satu permasalahan prioritas yang harus dituntaskan oleh pemerintah dalam pembangunan kawasan Danau Toba. Untuk itu diperlukan berbagai inovasi dan teknologi pengolahan air Danau Toba guna untuk mengatasi permasalahan pencemaran air dan lingkungan aktivitas Kerambah Jaring Apung (KJA), enceng gondok, rumah tangga dan hotel serta pengolahan sampah di kawasan tersebut. Dari hasil penilaian persepsi masyarakat terhadap kebutuhan inovasi dan teknologi pengolahan limbah dan sampah diperoleh sebesar 55,40% responden sangat setuju, 24,60% sangat setuju, 19,20% netral dan 0,80% tidak setuju. Dengan teratasinya permasalahan limbah dan sampah serta pencemaran lingkungan, akan meningkatkan keasrian kawasan wisata Danau Toba dan sekaligus kenyamanan wisatawan.

Inovasi dan Teknologi Informasi. Merupakan salah satu kebutuhan mendasar pembangunan saat ini. Kebutuhan akan inovasi dan teknologi informasi juga menjadi prioritas dalam pembangunan pariwisata di kawasan Danau Toba guna untuk mempromosikan berbagai potensi yang dimiliki sehingga dapat mudah diakses oleh wisatawan. Inovasi dan teknologi informasi tersebut berupa data dan informasi berbagai potensi wisata dan budaya dari masing-masing objek wisata tersebut dapat diakses melalui android sehingga informasinya dapat terpublikasi dan terinformasikan dengan baik dalam bentuk website, sosial media, media cetak dan elektronik, film dokumenter, leaflet dan lain-lain guna untuk mempromosikan potensi wisata dan melestarikan berbagai budaya yang ada agar tidak luntur atau hilang dan bahkan menjadi terkenal, dimana hal ini juga merupakan bagian dari inovasi sosial yang ditawarkan.

Kebutuhan akan inovasi dan teknologi informasi dibuktikan dengan pernyataan responden, dimana sebanyak 44,60% sangat setuju, 30,80% setuju dan 24,60% netral. Hal ini menunjukkan bahwa suksesnya suatu aktivitas atau kegiatan wisata apabila ada informasi yang akurat dan mudah diperoleh. Dengan terinformasinya berbagai event di kawasan Danau Toba melalui inovasi dan teknologi informasi akan meningkatkan keinginan wisatawan untuk berkunjung. Salah satunya adalah berupa informasi atraksi budaya Batak Kuno *Horja Bius* yang akan dapat meningkatkan

rasa keingintahuan wisatawan sehingga menjadi berkunjung ke Danau Toba.

Inovasi Hukum dan Kelembagaan.

Inovasi hukum dan kelembagaan diperlukan guna untuk mempercepat pembangunan pariwisata di kawasan Danau Toba. Inovasi hukum dan kelembagaan yang dibutuhkan tersebut dalam bentuk berbagai peraturan dan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah (pusat dan daerah) guna untuk memberikan kepastian dan jaminan bagi kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan kawasan Danau Toba. Berdasarkan hasil penilaian persepsi masyarakat terhadap kebutuhan inovasi hukum dan kelembagaan di kawasan Danau Toba menunjukkan bahwa 37,70% sangat setuju, 31,50 netral, 30% setuju, dan 0,80 % tidak setuju. Adapun berbagai peraturan yang dibutuhkan tersebut akan berlaku untuk seluruh daerah kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba dalam bentuk pengaturan dan penertiban terhadap bentuk pelanggaran yang terjadi seperti pelanggaran pembangunan di pinggiran Danau Toba, peningkatan koordinasi antar instansi dan antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pembuatan *masterplan* dan lain-lain.

Inovasi Kuliner. Inovasi kuliner yang dibutuhkan berupa makanan yang merupakan ciri khas kawasan Danau Toba dan makanan yang berlabel halal untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim serta pengaturan lokasi-lokasi untuk penjualan kuliner halal. Berdasarkan penilaian responden menyatakan bahwa 57,70 % menyatakan setuju, 21,50% sangat setuju, 18,50% netral dan 2,30% tidak setuju. Hal ini berarti bahwa dengan adanya kuliner khas daerah wisata akan membuat wisatawan datang berkunjung tidak hanya menikmati indahnya pemandangan tetapi juga kenikmatan kuliner khas daerah wisata kawasan Danau Toba. Dengan adanya makanan dengan label halal akan menambah kenyamanan bagi wisatawan dalam memilih makanan.

Menurut Suardana (2006), terdapat 16 hal yang menjadi standar kelayakan minimal bagi suatu daerah yang akan dijadikan daerah tujuan wisata yaitu: 1) Objek, terdapat salah satu dari unsur alam, sosial, atau budaya; 2) Akses, adanya jalan, adanya kemudahan rute, tempat parkir, dan harga parkir yang terjangkau; 3) Akomodasi, adanya pelayanan penginapan (hotel, wisma, losmen, dan lain-lain); 4) Adanya fasilitas perbelanjaan, pusat informasi, salon, fasilitas kesehatan, pemadam kebakaran, hydrant, *Tourism Information Center* (TIC), *guiding* (pemandu wisata), plang informasi, dan petugas yang memeriksa untuk masuk keluarnya wisatawan; 5) Transportasi, adanya

transportasi lokal yang nyaman dan variatif yang menghubungkan akses masuk ke daerah tujuan wisata; 6) *Catering Service*, adanya pelayanan makanan dan minuman (restoran dan rumah makan, warung nasi dan lain-lain); 7) Aktifitas rekreasi, terdapat sesuatu yang dilakukan di lokasi wisata, seperti berenang, terjun payung, berjemur, berselancar, jalan-jalan dan lain-lain; 8) Pasar, adanya tempat pembelian barang-barang umum; 9) Komunikasi, adanya televisi, telepon umum, radio, sinyal telepon seluler, penjual *voucher* (isi ulang pulsa seluler), dan internet akses; 10) Sistem perbankan, adanya bank (beberapa jumlah dan jenis bank dan ATM beserta sebarannya); 11) Fasilitas kesehatan (poliklinik), poli umum/jaminan ketersediaan pelayanan yang baik untuk penyakit yang mungkin diderita wisatawan; 12) Keamanan, adanya jaminan keamanan (petugas khusus keamanan, polisi wisata, pengawas pantai, rambu-rambu perhatian dan pengarah kepada wisatawan; 13) Kebersihan tempat, tempat pembuangan dan pengolahan sampah serta rambu-rambu peringatan tentang kebersihan; 14) Sarana ibadah, terdapat salah satu sarana ibadah bagi wisatawan; 15) Sarana pendidikan, terdapat salah satu sarana pendidikan formal; dan 16) Sarana olahraga, terdapat alat dan perlengkapan untuk berolahraga.

Berdasarkan persentase jawaban responden sebagaimana pada Tabel 1 menggambarkan bahwa sebagian besar responden menjawab sangat setuju dan setuju akan kebutuhan inovasi dan teknologi guna untuk mendukung pembangunan pariwisata di kawasan danau Toba. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh indeks jawaban responden akan kebutuhan inovasi dan teknologi di kawasan Danau Toba sebanyak 9 penilaian dengan kategori sangat setuju dan 2 penilaian dengan kategori setuju. Adapun 9 penilaian akan kebutuhan inovasi dan teknologi di kawasan Danau Toba tersebut, yaitu: 1) inovasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan; 2) inovasi sosial; 3) inovasi harga; 4) inovasi infrastruktur; 5) inovasi pengelolaan cagar budaya; 6) inovasi transportasi; 7) inovasi dan teknologi pengolahan produk unggulan; 8) inovasi dan teknologi pengolahan limbah dan sampah; serta, 9) inovasi dan teknologi informasi.

Sedangkan kedua inovasi dan teknologi lainnya dengan kriteria setuju yaitu : (1) inovasi hukum dan kelembagaan; dan (2) inovasi kuliner. Indeks jawaban responden terhadap kebutuhan inovasi dan teknologi di kawasan Danau Toba disajikan pada Tabel 2.

Nilai indeks jawaban responden ini menunjukkan bahwa hal utama yang harus

dilakukan oleh kabupaten Samosir adalah dengan melakukan inovasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan dengan indeks jawaban responden sebesar 88,15%. Persepsi masyarakat terhadap kebutuhan inovasi sosial memiliki nilai indeks jawaban responden sebesar 86,96%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih sangat diperlukan upaya untuk merubah *mindset* masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan,

terutama perubahan sosial masyarakat terkait dengan perilaku dan keramahtamahan, serta kejujuran pelaku usaha di sekitar daerah wisata. Sebagai contoh masih adanya para pedagang yang nakal yang menjual dengan cara memaksa wisatawan dan tidak jujur dengan membuat papan merek halal pada tempat usahanya, namun setelah diselidiki ternyata penjual tersebut bukan seorang muslim.

Tabel 2. Indeks Jawaban Responden Terhadap Kebutuhan Inovasi dan Teknologi di Kawasan Danau Toba

No	Inovasi dan Teknologi	Indeks Jawaban Responden (%)	Kriteria
1	Inovasi Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan	88,15	Sangat Setuju
2	Inovasi Sosial	86,69	Sangat Setuju
3	Inovasi Harga	85,19	Sangat Setuju
4	Inovasi Infrastruktur	84,38	Sangat Setuju
5	Inovasi Pengelolaan Cagar Budaya	83,31	Sangat Setuju
6	Inovasi Transportasi	82,90	Sangat Setuju
7	Inovasi dan Teknologi Pengolahan Produk Unggulan	81,59	Sangat Setuju
8	Inovasi dan Teknologi Pengolahan Limbah dan Sampah	81,45	Sangat Setuju
9	Inovasi Informasi dan Teknologi	81,23	Sangat Setuju
10	Inovasi Hukum dan Kelembagaan	79,85	Setuju
11	Inovasi Kuliner	79,38	Setuju

Sumber: Data penelitian (2017)

Pada urutan berikutnya adalah inovasi harga dengan indeks jawaban responden sebesar 85,19%. Kepastian, jaminan dan keseragaman harga terhadap produk sejenis dengan kualitas yang sama pada suatu tempat wisata akan mendorong wisatawan untuk akan datang kembali berkunjung. Adapun upaya kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan penerapan kebijakan harga jual tertinggi terhadap produk-produk sejenis dengan kualitas yang sama yang berlaku untuk di seluruh wilayah wisata di kawasan Danau Toba dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Bupati. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan menetapkan harga jual produk makanan dan minuman serta kuliner olahan laut melalui baliho-baliho di lokasi wisata.

Kebutuhan akan inovasi infrastruktur memiliki nilai indeks sebesar 84,38%, dimana dengan adanya infrastruktur yang lengkap dan baik akan meningkatkan kenyamanan wisatawan. Adapun kebutuhan inovasi infrastruktur yang diperlukan berupa sarana dan prasarana jalan raya yang dapat memperlancar perjalanan wisatawan, fasilitas penginapan berupa homestay yang dilengkapi

berbagai fasilitas air bersih dan MCK, fasilitas bermain anak-anak, fasilitas kebersihan berupa tempat pembuangan sampah, fasilitas tempat penjualan kuliner dan cenderamata yang layak dan nyaman, dan fasilitas umum lainnya seperti tempat ibadah, toilet umum yang akan membuat wisatawan menjadi nyaman dan betah untuk berkunjung ke kawasan Danau Toba.

Kebutuhan akan inovasi infrastruktur memiliki nilai indeks sebesar 84,38%, dimana dengan adanya infrastruktur yang lengkap dan baik akan meningkatkan kenyamanan wisatawan. Adapun kebutuhan inovasi infrastruktur yang diperlukan berupa sarana dan prasarana jalan raya yang dapat memperlancar perjalanan wisatawan, fasilitas penginapan berupa homestay yang dilengkapi berbagai fasilitas air bersih dan MCK, fasilitas bermain anak-anak, fasilitas kebersihan berupa tempat pembuangan sampah, fasilitas tempat penjualan kuliner dan cenderamata yang layak dan nyaman, dan fasilitas umum lainnya seperti tempat ibadah, toilet umum yang akan membuat wisatawan menjadi nyaman dan betah untuk berkunjung ke kawasan Danau Toba.

Inovasi pengelolaan cagar budaya memiliki nilai indeks sebesar 83,31%, hal ini diperlukan guna untuk memperkenalkan berbagai budaya

batak yang cukup banyak ditemui di kawasan Danau Toba. Pengelolaan cagar budaya yang merupakan bagian dari wisata budaya, diperlukan agar berbagai sejarah budaya yang dimiliki tersebut tidak hilang dan bahkan dapat terus lestari dengan cara diperkenalkan kepada generasi muda dan wisatawan mancanegara. Permasalahan yang dihadapi selama ini bahwa berbagai cagar budaya yang dimiliki tersebut tidak terawat dan tertata dengan baik. Untuk itu, pemerintah daerah kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba perlu berkerjasama dengan ahli-ahli, misalnya saja dengan cara dikemas lebih baik agar dapat menarik minat wisatawan untuk melihat dan mengetahui berbagai cagar budaya yang dimiliki tersebut.

Kebutuhan akan inovasi transportasi memiliki nilai indeks sebesar 82,90%, hal ini sangat diperlukan karena transportasi merupakan salah satu sarana utama untuk mendukung keberhasilan pembangunan pariwisata di kawasan Danau Toba. Inovasi transportasi diperlukan guna untuk memperlancar perjalanan wisatawan selama berada di kawasan Danau Toba. Kebutuhan inovasi transportasi ini berupa jalan yang lebar dan lancar, jalan alternatif guna untuk mengatasi kemacetan, pelabuhan untuk penyeberangan yang dilengkapi dengan kapal ferry, bandar udara/*airport*, angkutan umum yang nyaman dan rambu-rambu lalu lintas yang lengkap dan lain-lain.

Inovasi dan teknologi pengolahan produk unggulan memiliki nilai indeks sebesar 81,59%, hal ini diperlukan guna untuk memberikan nilai tambah terhadap berbagai produk-produk unggulan daerah yang dihasilkan masyarakat pada masing-masing daerah kabupaten di kawasan Danau Toba. Inovasi dan teknologi pengolahan produk unggulan ini diperlukan untuk menghasilkan berbagai produk souvenir, cenderamata dan oleh-oleh yang memiliki ciri khas masing-masing daerah. Untuk itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dengan industri kreatif guna untuk mengembangkan berbagai industri kreatif yang berbasis produk unggulan daerah. Teknologi tepat guna sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pengembangan produk unggulan daerah di kawasan Danau Toba seperti hama tanaman budidaya (kopi, jeruk, mangga dan lain-lain) dan teknologi pengolahan berbasis pertanian dan perkebunan. Selain itu, diperlukan inovasi dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk pengembangan berbagai produk unggulan daerah berupa Indikasi Geografis (IG) terhadap komoditas kopi, jeruk dan lain-lain yang

memiliki ciri khas daerah guna untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai tawar petani akan produk-produk pertanian yang dihasilkannya.

Kebutuhan akan inovasi dan teknologi pengolahan limbah dan sampah memiliki nilai indeks sebesar 81,45%, dimana berbagai inovasi dan teknologi diperlukan untuk mengatasi berbagai pencemaran yang terjadi di kawasan Danau Toba akibat aktivitas Kerambah Jaring Apung (KJA), pariwisata dan berbagai aktivitas lainnya yang terjadi selama ini. Inovasi dan teknologi dibutuhkan berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu untuk mengatasi pencemaran air akibat limbah KJA, limbah perhotelan dan limbah masyarakat yang selama ini dibuang langsung ke Danau Toba tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut. Selain itu diperlukan inovasi dan teknologi untuk pengolahan sampah yang dihasilkan dari aktivitas pariwisata agar dapat didaur ulang untuk menjadi produk-produk souvenir yang memiliki ciri khas daerah dan sebagai sumber energi alternatif serta pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA).

Inovasi dan teknologi informasi memiliki nilai indeks sebesar 81,23%, hal ini diperlukan guna untuk meningkatkan promosi dan penyebaran informasi terkait dengan pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba. Inovasi dan teknologi informasi ini diperlukan dalam bentuk sistem informasi dalam berupa website, sosial media, media cetak elektronik dan lain-lain yang menampilkan berbagai potensi pariwisata di kawasan Danau Toba secara lebih menarik sehingga dapat menggugah para wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung. Pemerintah daerah yang berada di kawasan Danau Toba perlu menjalin kerjasama dengan berbagai ahli Informasi Teknologi (IT) dan berbagai lembaga lainnya termasuk perguruan tinggi untuk pengembangan IT pariwisata Danau Toba. Selain itu, perlu dikembangkan pemasaran pariwisata "Go Danau Toba" berbasis android dalam bentuk paket perjalanan mengelilingi seluruh destinasi wisata di kawasan Danau Toba.

Hal yang menarik dari hasil penelitian ini adalah terdapat 2 (dua) inovasi dan teknologi lainnya dengan kriteria setuju yaitu inovasi hukum dan kelembagaan dengan nilai indeks sebesar 79,85 dan inovasi kuliner dengan nilai indeks sebesar 79,38. Inovasi hukum dan kelembagaan yang dimaksudkan adalah penegakan hukum yang tegas terhadap bentuk pelanggaran yang terjadi, serta adanya lembaga koordinasi bersama dan adanya masterplan pengembangan pariwisata Danau Toba di seluruh daerah kabupaten yang berada di

kawasan Danau Toba. Kondisi ini menunjukkan ada beberapa responden yang tidak terlalu antusias terhadap penegakan peraturan, dimana hal ini sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap penerapan hukum yang terjadi selama ini seperti membangun di pinggir Danau Toba.

Tidak semua responden membutuhkan kuliner halal, terutama wisatawan non muslim, inovasi kuliner diperlukan untuk pengolahan berbagai produk-produk kuliner yang memiliki ciri khas daerah yang cukup banyak yang selama ini tidak berkembang. Pemerintah daerah di kawasan Danau Toba perlu bekerjasama dengan ahli pangan/gizi dan industri kreatif guna untuk menghasilkan berbagai produk-produk kuliner yang memiliki ciri khas daerah yang dapat digunakan sebagai cenderamata. Inovasi kuliner lainnya berupa tersedianya makanan halal guna untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Pemerintah daerah kabupaten di kawasan Danau Toba dapat bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk penerbitan sertifikat kuliner halal dan membuat peraturan kepala daerah/Bupati yang mengatur para penjual agar membuat label halal pada tempat-tempat penjualannya dan membuat lokasi khusus untuk tempat penjualan kuliner halal di sekitar kawasan Danau Toba serta penertiban terhadap para pedagang yang menjual produknya yang tidak sesuai dengan standard harga yang telah ditetapkan. dan kawasan khusus kuliner halal.

Objek-objek wisata yang dimiliki Kabupaten Samosir yang memiliki keunggulan yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kawasan Danau Toba, yaitu: Tomok, Tuktuk Siadong, Pusuk Buhit, Simanindo, dan Batu Guru.

Tomok merupakan pusat wisata belanja di Pulau Samosir dengan berbagai cinderamata dan oleh-oleh khas daerah seperti ulos, gelang, kalung, pakaian berciri khas batak dan masih banyak lainnya. Wisatawan di Tomok dapat menikmati tarian patung Sigale-Gale yang telah melegenda dan makam Raja Sidabutar yang dahulunya merupakan penguasa di Tanah Batak. Tomok sendiri merupakan pelabuhan penghubung dari Ajibata Parapat dan sebagai tempat wisatawan untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi pilihan lainnya di kawasan Danau Toba.

Tuktuk Siadong merupakan semenanjung kecil di tepian Danau Toba dengan daratan yang menjorok dan terlihat begitu mengagumkan bila dilihat dari ketinggian. Di Tuktuk Siadong selain terdapat Museum Batak yang menampilkan pembuatan ulos, juga terdapat cafe-cafe yang bernuansa etnis daerah dan air terjun yang mengagumkan dilihat dari kejauhan. Tidak jauh dari Tuktuk Siadong terdapat peradaban Batak yang berada di Desa Siallagan yang terkenal dengan Batu Parsidangan. Objek wisata lainnya yang tidak kalah menarik adalah Taman Doa Getsemami Ambarita bagi wisatawan yang ingin berwisata religi.

Pangururan. Wisatawan di Kota Pangururan dapat mengunjungi *open stage* bernuansa Batak, berburu kuliner khas Batak atau sekedar menikmati pemandangan Danau Toba. Selain itu, wisatawan dapat berbelanja dengan mengunjungi berbagai gerai yang tertata di sekitar Pangururan dan menikmati beberapa obyek wisata lainnya yang menarik seperti Pantai Batu Hoda, Pantai Indah Situngkir dan tempat pemandian air panas Aek Rangat.

Tabel 3. Prioritas Kebutuhan Inovasi dan Teknologi di Kabupaten Samosir

No	Kebutuhan Inovasi dan Teknologi	Prioritas
1	Inovasi Sosial	I
2	Inovasi dan Teknologi Pengolahan Air Danau Toba	I
3	Inovasi dan Teknologi IPAL	II
4	Inovasi Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan	III
5	Inovasi Infrastruktur (<i>Homestay</i>)	IV
6	Inovasi Kuliner	IV
7	Inovasi Produk Tenun Ulos	IV
8	Inovasi dan Teknologi Pengolahan Kopi, Kacang dan Bawang	IV
9	Inovasi Transportasi Air	IV
10	Inovasi Harga	V
11	Inovasi Pengelolaan Cagar Budaya	V
12	Inovasi Koordinasi Kolaboratif	V
13	Inovasi Infrastruktur (Rambu-Rambu Wisata)	V
14	Inovasi dan Teknologi Pengolahan Daging Kerbau	VI
15	Inovasi Toilet Internasional	VI

Sumber: Data penelitian (2017)

Pusuk Buhit. Merupakan asal muasal suku Batak secara mitologi, dimana para pendaki dapat menghabiskan waktu di dataran tinggi ini untuk camping dan menikmati lanskap Danau Toba yang dilengkapi dengan beberapa obyek wisata lainnya seperti pemandian air panas, mata air 7 rasa, desa budaya, jabu parsaktian dan air terjun Naisonggop. Pusuk Buhit sangat dijaga kesakralannya oleh penduduk setempat sehingga setiap pengunjung diharapkan dapat menjaga tingkah dan perilaku selama berada di objek wisata ini.

Simanindo. Kawasan ini terkenal dengan wisata sejarah dan budayanya, hal ini dapat dilihat dari ritual mangalahat horbo atau ritual Batak lainnya di Museum Simanindo. Objek wisata lainnya yang tidak kalah menarik adalah Pantai Pasir Putih yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Tuktuk dan Makam Tua Raja Sidabutar.

Batu Guru berada di Kecamatan Nainggolan terkenal dengan keunikan batu besar yang berada di Danau Toba, dimana para penduduk setempat mengatakan bahwa batu tersebut kerap berpindah-pindah tempat. Batu Guru dikaitkan dengan falsafah Suku Batak "Dalihan Natolu" menjadi pegangan erat dalam menjalani siklus kehidupan.

Selain produk wisata, Kabupaten Samosir juga menghasilkan berbagai produk pertanian unggulan yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan wisata di daerah ini. Adapun berbagai produk unggulan yang dihasilkan di daerah ini adalah: kopi arabika, bawang merah, dan padi. Kopi Arabika merupakan komoditi unggulan Kabupaten Samosir yang sangat potensial untuk dikembangkan, karena didukung oleh kondisi geografisnya yang terletak pada wilayah dataran tinggi. Jenis tanaman kopi yang terkenal di Kabupaten Samosir adalah Sigarar Utang yang merupakan varietas unggul kopi Arabika dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 205/Kpts/SR.120/4/2005 tentang Penetapan Varietas Kopi Sigarar Utang sebagai Varietas Unggul.

Meskipun kopi merupakan salah satu komoditi yang sudah berkembang, namun para petani dalam budidaya kopi di daerah menghadapi berbagai hambatan, antara lain berupa: pengelolaan kopi yang masih bersifat sederhana, tingkat kemampuan petani dalam penggunaan teknologi yang masih rendah seperti pohon pelindung yang masih kurang, kurangnya pemeliharaan berupa pemangkasan dan pemasarannya yang sangat ditentukan oleh pedagang yang bukan berasal dari Kabupaten Samosir sehingga menjadikan petani tidak mempunyai posisi tawar dalam hal harga yang

membuat petani hanya mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang kecil. Luas perkebunan kopi di Kabupaten Samosir tahun 2015 sebesar 4.533,35 Ha dengan produksi 3.099,45 ton (BPS Kabupaten Samosir, 2016).

Kabupaten Samosir pernah berjaya sebagai salah satu daerah penghasil bawang merah di Inonesia. Hal ini terjadi dikarenakan kualitas dari bawang merah yang dihasilkan Kabupaten Samosir sangat baik dari segi rasa, warnanya yang lebih merah, rasanya lebih pedas dan memiliki aroma yang sangat tajam (wangi). Namun saat ini petani bawang merah di daerah ini mengalami permasalahan serangan jamur yang menyebabkan tanaman busuk sebelum masa panen. Luas area panen tanaman bawang di Kabupaten Samosir pada tahun 2015 mencapai 210 ha dengan produksinya 1.352,7 ton ditahun 2015, dimana produksinya menurun dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 1.387,8 ton. Hasil produksi bawang merah tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan hasil panen mencapai 2.420 ton dan area panen 419 Ha (BPS Kabupaten Samosir, 2016).

Daerah penghasil padi di Kabupaten Samosir adalah Kecamatan Pangururan, Palipi, Nainggolan, Onan Runggu dan Harian. Petani padi di daerah ini menanam padi saat musim hujan akibat belum adanya sistem irigasi di daerah ini. Kendala lain yang dihadapi petani padi di daerah ini adalah serangan hama Blas yang menyebabkan buah padi hampa atau kosong.

Hambatan dan Kelemahan Dalam Pengembangan Wisata di Kabupaten Samosir. Berdasarkan hasil wawancara dan FGD, ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kelemahan dalam pengembangan wisata daerah Kabupaten Samosir, yaitu: 1) Tingkat kebersihan di kawasan wisata baik wisata alam maupun budaya masih kurang mendukung; 2) Keseragaman harga yang tidak sama bagi pengunjung dalam hal makanan, souvenir dan penginapan; 3) Sarana infrastruktur yang belum memenuhi standar kenyamanan wisatawan; 4) Masih sedikitnya jenis/variasi kuliner/jajanan yang dapat dinikmati wisatawan; 5) Belum adanya teknologi pengolahan produk unggulan berbasis masyarakat; dan, 6) Kurangnya koordinasi antar daerah kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba.

Kebutuhan Inovasi dan Teknologi di Kabupaten Samosir. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil FGD diperoleh berbagai kebutuhan inovasi dan teknologi untuk pengembangan wisata di Kabupaten Samosir, yaitu: inovasi social, inovasi harga, inovasi homestay, inovasi kuliner, inovasi cagar budaya, inovasi pengolahan air Danau Toba, inovasi

produk tenun, inovasi dan teknologi pengolahan hasil perkebunan (kopi) dan pertanian (kacang dan bawang) serta peternakan (kerbau), inovasi infrastruktur), serta, inovasi pembuatan IPAL.

Inovasi sosial yang diperlukan untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten samosir berupa penerapan murah senyum kepada wisatawan yang masih dirasakan sangat kurang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat dalam melayani wisatawan. Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat Batak yang memiliki karakter keras sehingga diperlukan pembinaan karakter masyarakat lokal terutama di daerah yang bersinggungan langsung dengan tujuan wisata. Keramahtamahan merupakan kunci utama daya tarik wisatawan karena akan dapat berimbas pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata.

Inovasi Harga. Keceragaman harga dan jaminan kepastian harga bagi wisatawan sangat dibutuhkan untuk menjaga kenyamanan wisatawan berkunjung dan berbelanja di Samosir. Tidak adanya keceragaman dan jaminan kepastian harga akan menyebabkan penurunan tingkat konsumsi wisatawan selama berada di samosir. Dengan kata lain potensi wisata daerah yang dimiliki daerah hanya sebagai tempat singgah sesaat bagi wisatawan tanpa dapat memberikan tambahan pendapatan lokal. Untuk itu, dibutuhkan inovasi dalam hal keceragaman dan jaminan harga penginapan, kuliner dan produk-produk cenderamata, sistem redistribusi baik yang dikelola masyarakat lokal, pemerintah, maupun swasta yang diatur dalam bentuk kebijakan pemerintah daerah.

Inovasi Homestay. Mengatasi biaya penginapan yang relatif mahal akibat keuangan wisatawan domestik maupun mancanegara yang terbatas, diperlukan inovasi dengan membangun homestay yang memiliki nuansa etnis lokal. Dengan adanya homestay diharapkan wisatawan dan masyarakat dapat menjalin komunikasi lebih baik sehingga wisatawan dapat mengenal budaya lokal secara lebih mendalam dan diharapkan dapat mempanjang masa kunjungannya. Homestay di Kabupaten Samosir selama ini sudah ada, hanya saja belum memenuhi standar kenyamanan bagi wisatawan lokal maupun mancanegara karena tidak dilengkapi dengan berbagai fasilitas standar sebagaimana yang ditetapkan layaknya untuk penginapan wisatawan.

Inovasi Kuliner. Wisatawan yang datang ke Samosir pada umumnya didominasi wisatawan domestik yang beragama Islam. Untuk itu dibutuhkan adanya inovasi kuliner

berupa makanan halal yang direkomendasikan oleh pemerintah daerah yang memiliki ciri khas daerah dan berbagai produk kuliner lainnya yang dibutuhkan wisatawan. Sejalan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir perlu membuat kebijakan tentang kuliner atau makan halal yang dapat dilakukan dengan memberi label halal pada produk-produk yang dijual di kawasan wisata di bawah pengawasan pemerintah daerah.

Inovasi Cagar Budaya. Kabupaten Samosir memiliki potensi cagar budaya yang cukup banyak yang dapat digunakan untuk pengembangan wisata daerah. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan inovasi cagar wisata dalam hal pengelolaan cagar budaya berupa pemeliharaan, perbaikan, ketersediaan sarana dan prasarana publik guna untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.

Inovasi Pengolahan Air Danau Toba. Danau Toba memiliki cadangan air dimanfaatkan untuk menjadi sumber air minum dan kebutuhan air bersih masyarakat serta perhotelan. Untuk itu, diperlukan teknologi dan inovasi pengolahan air yang dilakukan melalui kerjasama antara pihak pemerintah daerah dengan perusahaan pengolahan air minum. Selain itu, diperlukan survei hidrologi untuk mencari titik-titik sumber air bersih dan teknologi pengolahan air bersih untuk pemenuhan air masyarakat dan wisatawan di lokasi-lokasi objek wisata yang jauh dari sumber air Danau Toba.

Inovasi Produk Tenun. Tenun dan ulos yang merupakan produk kerajinan unggulan yang dihasilkan di daerah ini masih kurang diminati wisatawan. Kurang berkembangnya tenun dan ulos ini terjadi dikarenakan model dan corak yang tidak variatif serta bahan baku yang sangat sulit didapatkan menyebabkan produk unggulan ini kurang diminati. Untuk itu dibutuhkan adanya inovasi dalam hal bahan baku ulos dan corak ulos yang lebih variatif dengan tetap mempertahankan ciri khas dari ulos Samosir. Hal ini penting dilakukan guna untuk meningkatkan kualitas produksi kerajinan ulos seperti kemeja, peralatan rumah tangga, dan lain-lain serta sekaligus untuk meningkatkan ketertarikan wisatawan terhadap ulos Samosir.

Inovasi dan Teknologi Dalam Pengolahan Hasil Perkebunan (Kopi) dan Pertanian (Kacang dan Bawang) serta Peternakan (Kerbau). Kopi Samosir, kacang dan bawang merupakan produk unggulan daerah yang memerlukan inovasi dan teknologi dalam hal pengolahan produk, pengemasan dan labeling (eco labeling) yang dapat menjadi icon pariwisata Kabupaten Samosir dengan konsep

agrowisata. Kabupaten Samosir sebagai penghasil daging kerbau kedua terbesar di Sumatera Utara memerlukan inovasi dan teknologi dalam pengolahan daging untuk menjadikannya sebagai produk olahan yang bernilai ekonomis yang memiliki ciri khas daerah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kuliner wisatawan dan sekaligus sebagai salah satu oleh-oleh khas daerah (dendeng daging kerbau) yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan masyarakat.

Inovasi Infrastruktur. Inovasi infrastruktur yang dibutuhkan Kabupaten Samosir adalah sarana dan prasarana untuk peningkatan kenyamanan wisatawan seperti transportasi jalan yang masih banyak rusak dan dermaga atau pelabuhan untuk penyeberangan yang masih belum memadai. Inovasi pembangunan toilet berstandar internasional untuk meminimalisir pencemaran air Danau Toba.

Inovasi pembuatan IPAL untuk mengakomodir limbah rumah tangga dan perhotelan yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan teknologi berbasis bioteknologi (menggunakan agen biologi/mikroorganisme pengurai).

Kebutuhan Inovasi dan Teknologi Prioritas Dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Danau Toba. Berdasarkan hasil FGD dan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat 15 (lima belas) inovasi dan teknologi yang dibutuhkan dalam upaya peningkatan pariwisata di Kabupaten Samosir dan kawasan Danau Toba. Kebutuhan akan inovasi dan teknologi prioritas di Kabupaten Samosir berupa inovasi sosial dan inovasi teknologi pengolahan air Danau Toba dengan tingkat prioritas I. Inovasi sosial yang menjadi prioritas utama dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Samosir berupa penerapan murah senyum dan ramah dalam melayani wisatawan yang masih sangat kurang ditemui pada masyarakat di daerah ini. Hal ini diperlukan karena keramahmatan merupakan kunci utama daya tarik wisatawan. Untuk itu, diperlukan adanya pembinaan karakter secara terus menerus kepada masyarakat lokal khususnya di lokasi-lokasi wisata yang bersinggungan langsung dengan kawasan wisata Danau Toba baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir maupun lembaga-lembaga terkait lainnya terutama lembaga swadaya masyarakat.

Keterbatasan pasokan air bersih di Kabupaten Samosir menjadi permasalahan yang belum teratasi sehingga menjadikannya sebagai salah satu prioritas permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Samosir. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan inovasi teknologi pengolahan air Danau Toba yang memiliki cadangan air yang cukup banyak yang berpotensi untuk dimanfaatkan menjadi sumber air baku berupa air minum, air bersih untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari dan perhotelan yang cukup banyak ditemui di daerah ini. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan pengolahan air minum, perguruan tinggi maupun berbagai lembaga litbang yang ada di daerah maupun di pusat guna untuk pemenuhan air bersih di daerah ini melalui pemanfaatan berbagai teknologi terapan atau teknologi tepat guna untuk pengolahan air Danau Toba menjadi air bersih (minum). Selain itu, diperlukan survei hidrologi guna untuk mencari titik-titik sumber air dan teknologi pengolahan air bersih terutama untuk lokasi-lokasi wisata yang tidak bersinggungan langsung atau lokasinya jauh dari Danau Toba. Nilai skor kepentingan terhadap kebutuhan inovasi dan teknologi di Kabupaten Samosir sebagaimana pada Tabel 3.

KESIMPULAN

Kebutuhan jenis-jenis inovasi dan teknologi serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan pariwisata pada Kabupaten Samosir, berupa : inovasi sosial, inovasi dan teknologi pengolahan air Danau Toba, inovasi dan teknologi IPAL, inovasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan, inovasi infrastruktur (homestay), inovasi kuliner, inovasi produk tenun ulos, inovasi dan teknologi pengolahan kopi, kacang dan bawang, inovasi transportasi air, inovasi harga, inovasi pengelolaan cagar budaya, inovasi koordinasi kolaboratif, inovasi infrastruktur (rambu-rambu wisata), inovasi dan teknologi pengolahan daging kerbau, dan inovasi toilet internasional.

REKOMENDASI

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat dan pelaku usaha pariwisata lainnya dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan regional melalui pembagian tugas dan tanggungjawab secara jelas dan tegas agar berbagai program dan kegiatan yang dilakukan terkait dengan pembangunan pariwisata terintegrasi dalam suatu sistem kawasan pembangunan pariwisata untuk mendukung keberhasilan pembangunan kawasan Danau Toba.

2. Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten di kawasan Danau Toba khususnya Pemerintah Kabupaten Samosir agar dalam melakukan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata mengacu pada standar sebagaimana dibutuhkan sebagai suatu kawasan pariwisata, berupa: infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, pemasaran, dan pengembangan kelembagaan pariwisata, seperti akses jalan, kualitas dan lebar jalan, sarana transportasi, bandar udara, pelabuhan penyeberangan, instalasi pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, pengolahan sampah, pengelolaan lingkungan, *homestay*, pelayanan wisata, promosi dan lain-lain. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk mendukung optimalisasi pembangunan pariwisata di kawasan Danau Toba guna menjadi destinasi unggulan wisata nasional,
3. Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Samosir dapat memanfaatkan dan mengembangkan berbagai inovasi dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di Kabupaten Samosir melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lembaga lainnya serta memberikan dukungan fasilitasi dalam bentuk inovasi dan teknologi terkait dengan pembangunan pariwisata. Sehingga dapat mempercepat pembangunan pariwisata di kawasan Danau Toba,
4. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Samosir agar mengembangkan industri kreatif berbasis teknologi dan inovasi dalam upaya memanfaatkan dan mengembangkan berbagai produk unggulan daerah (pertanian, perkebunan, industri) guna untuk menghasilkan berbagai produk pendukung pariwisata, seperti: kuliner/makanan, cenderamata dan lain-lain yang memiliki ciri khas daerah kawasan Danau Toba.
5. Perlu membuat Peraturan Kepala Daerah/Bupati tentang Standar Harga Produk dan Pelayanan Hotel, serta Produk Kuliner Halal guna untuk menjamin kepastian harga, pelayanan dan kenyamanan para wisatawan.
6. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Samosir bersama-sama biro perjalanan dan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dalam mempromosikan pariwisata Dana Toba khususnya di daerah Kabupaten

Samosir agar membuat paket wisata “Go Danau Toba” berupa paket perjalanan wisata dengan melintasi seluruh objek-objek wisata di Kabupaten Samosir.

7. Pemerintah Kabupaten Samosir agar melakukan kajian tentang inovasi sosial guna untuk merubah *mainset* aparatur pemerintah daerah, masyarakat dan para pelaku wisata lainnya dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan wisata dan pembangunan pariwisata di kawasan Danau Toba.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara yang memberikan anggaran dana untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya, kepada dewan redaksi & mitra bestari Jurnal Inovasi Balitbang Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bersedia untuk menerbitkan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, K. and Shepherd, C.D., 2010. *Innovation Management*. Pearson Education, Inc., New Jersey.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir, 2016. *Samosir Dalam Angka 2016*.

Erwinsyah, A., 2015. *Pemahaman Mengenai Teknologi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran*. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Volume 3 Nomor 1 Februari 2015. Hal 12-19. [www. Portalgaruda.org](http://www.portalgaruda.org).

Freeman, R.E., 2004. *A Stakeholder Theory of Modern Corporations*. Ethical Theory and Business, 7thed.

Ismayanti, 2015. *Inovasi Produk Bagi Keberlanjutan Kepariwisataaan*. <http://jejakwisata.com/tourism-studies/planning-and-development/294-inovasi-produk-bagi-keberlanjutan-kepariwisataaan.html>.

Martina, S. dan Adimulya, R.P., 2013. *Strategi Inovasi Produk Wisata Dalam Upaya Meningkatkan Minat Berkunjung Wisatawan Ke Grama Tirta Jatiluhur Purwakarta*. Jurnal Khasanah Ilmu Vol. 4 No. 2.

Nontji A., 2016. *Danau Toba*. http://www.limnologi.lipi.go.id/file/file_nonji/DANAU%20TOBA.pdf

Roggers, E.M., 2003. *Diffusion Of Innovation*. 5th Ed., New York A Divison of Simon and Schuster, Inc.

Suardana, I.W., 2006. *Analisis Kebijakan Pengembangan Pariwisata (Intervensi Melalui Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan di Bali)*. Program Studi Industri Perjalanan Pariwisata Universitas Udayana, Bali.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi.
[http://risbang.ristekdikti.go.id/regulasi/uu-18-
2002.pdf](http://risbang.ristekdikti.go.id/regulasi/uu-18-2002.pdf)

Prabowo, Dani, 2017. Toilet Canggih di Danau Toba
Lebih Murah Ketimbang Impor. [online] Available at
[https://properti.kompas.com/read/2018/03/23/170
000321/toilet-canggih-di-danau-toba-lebih-murah-
ketimbang-impor](https://properti.kompas.com/read/2018/03/23/170000321/toilet-canggih-di-danau-toba-lebih-murah-ketimbang-impor).

Hasil Penelitian

KEARIFAN LOKAL BATAK TOBA DALAM MENDUKUNG SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN SAMOSIR

(LOCAL WISDOM OF BATAK TOBA ON SUPPORTING TOURISM SECTOR IN REGENCY OF SAMOSIR)

Dumora Jenny Margaretha Siagian

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
Jln. Sisingamangaraja No. 198 Medan
email : jenny79.siagian@gmail.com

Diterima: 04 Mei 2018; Direvisi: 21 Mei 2018; Disetujui: 22 Mei 2018

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisa kearifan lokal masyarakat Batak Toba yang bermanfaat dan dapat mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Samosir. Sebagai sebuah pulau yang indah yang ditempati oleh umumnya etnis Batak Toba, Samosir bukan hanya memiliki pemandangan alam yang indah, namun juga memiliki budaya dan kearifan lokal yang dapat menarik minat wisatawan untuk mempelajarinya. Namun begitu, Samosir belum menjadi destinasi wisata yang nyaman bagi para wisatawan, terutama bagi mereka yang pada awalnya tertarik dengan budaya Batak Toba. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menjelaskan secara deskriptif kearifan lokal masyarakat Batak Toba yang dapat dibangun kembali untuk menarik wisatawan berkunjung ke pulau Samosir. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, serta penelusuran dokumen dan hasil penelitian terdahulu. Analisa dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian adalah bahwa kearifan lokal Batak Toba menjadi potensi penting dalam membentuk karakter orang Batak yang bisa bergaul dan bersosialisasi dengan wisatawan. Sehingga para wisatawan dapat nyaman berada di tengah – tengah masyarakat adat. Sehingga kearifan lokal perlu dihidupkan dan diberdayakan kembali, selain untuk menyambut wisatawan, juga untuk melestarikan kearifan lokal yang telah diajarkan nenek moyang untuk dipedomani oleh generasi-generasi berikutnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sekitar objek wisata. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya koordinasi antara pemerintah dan pemuka adat dalam meng-inventarisasi, me-revitalisasi dan mengembangkan kearifan lokal bagi pelajar di sekolah dan masyarakat di sekitar objek wisata yang dapat mendukung sektor pariwisata.

Kata kunci: kearifan lokal, budaya, Batak Toba, pariwisata, Samosir

ABSTRACT

This study aims to explore and analyze the local wisdom of Batak Toba community that is useful and can support the tourism sector in Samosir regency. As a beautiful island occupied by generally ethnic Batak Toba, Samosir not only has beautiful natural scenery, but also has a culture and local wisdom that can attract tourists to learn it. However, Samosir has not become a comfortable tourist destination for tourists, especially for those who were initially interested in the Toba Batak culture. This research is a qualitative research which describes descriptively local wisdom of Toba Batak society that can be rebuilt to attract tourists to visit Samosir Island. Data collection is done through observation, interview, and trace of documents and previous research results. The analysis is done descriptively. The result of research is that Batak Toba local wisdom becomes an important potential in shaping the character of Batak people who can socialize with tourists. So that the tourists can be comfortable in the midst of indigenous peoples. So local wisdom needs to be revived and re-empowered, in addition to welcoming tourists, as well as to preserve the local wisdom that the ancestors have taught to be guided by the next generations. This can be done through education and socialization to schools and community groups around the tourist attraction. Recommendations that can be given are the need for coordination between government and traditional leaders in inventoring, revitalizing and developing local wisdom for students in schools and communities around tourism objects that can support the tourism sector.

Keywords: *local wisdom; culture; Batak Toba; tourism; Samosir*

PENDAHULUAN

Permasalahan pariwisata saat ini, tidak hanya pada kurangnya pengembangan potensi objek wisata, namun juga minimnya pemberdayaan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengembangan industri pariwisata di daerahnya. Padahal saat ini, tidak dipungkiri lagi, industri pariwisata menjadi peluang yang penting dalam pengembangan ekonomi dan meningkatkan mata pencaharian penduduk di negara - negara berkembang. Sarinen dan Manwa (2008) menyatakan bahwa pariwisata berperan dalam meningkatkan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat. Selain aspek ekonomi, pengembangan pariwisata juga perlu memperhatikan aspek kelestarian alam dan masyarakat lokal (Chafid Fandeli, 2000).

Dalam prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan, pemerintah mengemukakan suatu strategi perencanaan pengembangan kepariwisataan suatu daerah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan peran dan partisipasi masyarakat lokal secara arif dan bijaksana, yang dikenal dengan istilah Community-Based Tourism Development (CBT). Sunaryo (2013) mengatakan bahwa prinsip konsep CBT ini merupakan salah satu gagasan yang penting dalam perkembangan pariwisata modern berbasis keunikan komunitas lokal. Hal ini berarti bahwa unsur penggerak utama kegiatan pariwisata itu adalah pada sumber daya dan keunikan komunitas lokal, baik berupa fisik maupun nonfisik (tradisi atau budaya). Sehingga sudah semestinya kepariwisataan dipandang sebagai kegiatan yang berbasis pada komunitas setempat atau biasa disebut berbasis kearifan lokal masyarakat setempat. Dewasa ini, daya tarik lokalitas menjadi penting dalam menarik minat para wisatawan berkunjung ke suatu objek wisata, karena adanya kebosanan terhadap budaya massa yang dibawa oleh kapitalisme global. Globalisasi tersebut menjadi alasan bagi kebangkitan kembali budaya lokal di berbagai belahan dunia (Anthony Gidden, 2001). Banyak objek wisata yang dikemas berdasarkan sumber daya dan kearifan lokal masyarakat setempat menjadi objek yang terkenal dan menumbuhkan keinginan wisatawan untuk kembali ke tempat tersebut, seperti di Indonesia ada Yogyakarta, Tanah Toraja, Bali, dll.

Indonesia yang merupakan Negara kepulauan, memiliki potensi budaya yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Dengan keberagaman budaya yang dimiliki, Indonesia harus bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk mengembangkan pariwisata

berbasis kearifan lokal. Pengembangan pariwisata berbasis kebudayaan dan kearifan lokal ini telah dilakukan oleh Bali dan terbukti berhasil menarik minat wisatawan untuk selalu berkunjung ke Bali. Hal ini terbukti dengan jumlah wisatawan yang meningkat tiap tahunnya. Dari data BPS, jumlah wisatawan yang datang ke Bali mencapai 4.927.937 orang pada tahun 2016, dan mengalami pertumbuhan sebesar 23,14% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kesanggupan dan kemampuan masyarakat Bali dalam mengakomodir kearifan lokal dan budaya yang mengemuka dalam kehidupan masyarakat Bali menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Peranan budaya dalam masyarakat Bali memang sangat kuat. Kekuatan keagamaan dan budaya bersatu sama kuat dalam setiap sisi kehidupan masyarakatnya dan menjadi inspirasi daya tarik wisata. Kebudayaan Bali sangat menentukan dan mempunyai pengaruh sangat penting dalam kesuksesan kepariwisataannya. Kebiasaan/rutinitas budaya keseharian masyarakat Bali dalam keluarga, masyarakat, pemerintah Bali langsung dirasakan seluruh wisatawan. Budaya yang diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama (Malik, 2016).

Pengalaman dan tindakan masyarakat dalam memperlihatkan bagaimana Bali dapat mempertahankan budayanya dalam beradaptasi dengan jumlah kunjungan wisatawan asing yang tinggi tersebut hendaknya menjadi masukan kepada daerah-daerah lain untuk melakukan pengembangan wisata melalui penguatan budaya dan kearifan lokal yang mempunyai ciri ke Indonesian dan identitas budaya yang kuat. Menurut Walker dan Diana (1996), penggunaan kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata dapat memberikan manfaat dalam bidang ekonomi, fisik, maupun sosial budaya di lokasi setempat, yakni:

1. ekonomi, antara lain tersedianya kesempatan kerja, terciptanya keragaman lapangan pekerjaan, serta peningkatan pendapatan penduduk maupun daerah;
2. fisik lingkungan, antara lain mempertahankan bangunan bersejarah dan pusaka budaya/alam, menciptakan peningkatan infrastruktur, peningkatan upaya konservasi flora fauna dan ekosistemnya; dan
3. sosial budaya, antara lain terciptanya upaya menjaga nilai-nilai budaya setempat, meningkatkan kebanggaan warga, terjadi peningkatan kesempatan akan pendidikan yang lebih tinggi, dan membantu warga

memahami diri sendiri (siapa, dimana, dan keunikan yang dimiliki).

Samosir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang lokasinya berada di tengah – tengah Danau Toba. Sedangkan Danau Toba adalah salah satu danau vulkanik yang terkenal di dunia dengan sejarah letusannya yang maha dasyat sekitar 75.000 tahun yang lalu. Saat ini, Danau Toba menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) destinasi pariwisata unggulan di Indonesia. Sebagai daerah yang dipercaya menjadi asal muasal etnik Batak, selain memiliki kekayaan alam secara alamiah, Samosir juga memiliki kekayaan budaya yang diwariskan dari nenek moyang dan menjadi sumber ketertarikan bagi orang yang tinggal di luar Samosir. Namun dari data BPS, hingga saat ini, jumlah wisatawan yang datang ke Samosir belum bisa menandingi jumlah wisatawan yang datang ke Bali. Pada tahun 2016, jumlah wisatawan yang datang ke Samosir hanya mencapai 190.728 orang saja.

Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir, kurang berkembangnya kepariwisataan di daerah ini, diakibatkan beberapa hal seperti minimnya pembangunan infrastruktur dan transportasi, kurang berkembangnya atraksi dan objek wisata, kurangnya kepedulian masyarakat dan pihak-pihak tertentu dalam memelihara objek wisata, kondisi masyarakat yang belum siap dengan kebudayaan asing yang masuk ke daerahnya sehingga menimbulkan prspektif yang salah dan sulitnya mengubah pola pikir masyarakat yang masih kental dengan budaya adat setempat, serta kurangnya pengelolaan kekayaan alam dan budaya yang dapat menjadi daya tarik wisatawan.

Kekayaan budaya inilah yang perlu digali, dilestarikan dan dikembangkan untuk menarik wisatawan berkunjung ke Pulau Samosir. Karena wisata budaya adalah jenis wisata yang paling populer di negeri kita. Bukti-bukti telah menunjukkan bahwa wisata jenis inilah yang menjadi pilihan utama bagi wisatawan mancanegara yang ingin mengetahui kebudayaan dan kesenian kita serta segala sesuatu yang berhubungan dengan adat istiadat dan kehidupan seni budaya kita (Pendit, 2006). Munawaroh (1999) juga menyatakan bahwa dalam perspektif budaya, aktivitas kepariwisataan merangsang tumbuh kembangnya kreasi seni budaya yang dapat diperkenalkan kepada para wisatawan. Sedemikian pentingnya kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat dan mengembangkan pariwisata, sehingga kebudayaan, termasuk kearifan lokal tersebut perlu digali, dikembangkan, bahkan dilestarikan. Penelitian

dilakukan untuk menggali dan menganalisa kearifan lokal masyarakat Batak Toba yang bermanfaat dan dapat mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Samosir.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menggambarkan kearifan lokal masyarakat Batak Toba yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Samosir. Cakupan penelitian ini hanya pada kearifan lokal intangible (nilai, petuah, kidung) yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Batak Toba, namun sudah mulai pudar karena perkembangan jaman. Penelitian ini dilaksanakan pada Masyarakat Batak Toba di Kabupaten Samosir.

Pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran dokumen, berupa buku – buku mengenai Batak Toba, sejarah Batak Toba, hasil penelitian dan jurnal terdahulu, wawancara kepada tokoh adat, masyarakat dan guru seni budaya atau aksara batak di sekolah, serta observasi atau pengamatan terhadap kehidupan masyarakat Batak Toba di Kabupaten Samosir. Data yang diperoleh akan dianalisa secara deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan kearifan lokal intangible yang berkembang di masyarakat dan dapat mendukung pariwisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di tengah globalisasi dan modernisasi yang menimbulkan kesibukan dalam keseharian masyarakat, pariwisata menjadi obat penting bagi relaksasi dan obat yang menyegarkan tubuh dan pikiran manusia. Kebutuhan manusia akan pariwisata, menumbuhkan berbagai bentuk tempat wisata yang dikelola dan dikemas untuk mendatangkan kenyamanan bagi wisatawan. Menurut Astina (1999), Daya Tarik Wisata (DTW) dapat dibagi ke dalam 5 kategori, yakni (1) daerah tujuan wisata alam, (2) daerah tujuan wisata kebudayaan, (3) daerah tujuan wisata transportasi, (4) daerah tujuan wisata ekonomi, dan (5) daerah tujuan wisata ekonomi.

Daerah Tujuan Wisata (DTW) kebudayaan saat ini terus tumbuh dan berkembang di berbagai tempat, dan menjadi salah satu potensi masyarakat lokal yang penting dalam pengembangan wisata. Pengembangan wisata budaya bertujuan untuk memperkenalkan budaya masyarakat yang menjadi identitas daerah mereka kepada dunia nasional maupun internasional, sekaligus untuk melestarikan budaya tersebut, serta sebagai sarana dalam peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Salah satu kebudayaan masyarakat lokal yang perlu dilestarikan adalah kearifan lokal. Sumarmi dan

Amiruddin (2014) menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan di dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Kearifan lokal juga merupakan hasil budaya kebijaksanaan lokal dan kecendekiaan lokal yang didalamnya mengandung nilai-nilai peradaban dengan tujuan untuk pelestarian lingkungan dan demi untuk kesejahteraan masyarakat.

Kearifan lokal yang menjadi fokus penelitian adalah kearifan lokal yang *intangibile*, yakni kearifan lokal yang tidak dapat diraba atau disentuh, dapat berupa nilai, petuah, atau kidung yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Batak Toba. Masyarakat Batak Toba merupakan salah satu suku besar yang cukup dikenal di Indonesia. Menurut silsilahnya, orang batak berasal dari Pusuk Buhit yang ada di Samosir, dan menyebar ke seluruh daerah ke tempat dimana sekarang terdapat kampung – kampung masyarakat Batak yang dinamakan Bona Pasogit. Masyarakat Batak Toba memiliki sistem budaya dan persatuan yang kuat. Dimanapun mereka berada, mereka masih tetap berusaha mempertahankan dan menjalankan adat dan budaya yang diwariskan dari nenek moyangnya, termasuk kearifan – kearifan lokal yang memang sudah dari dulu diajarkan pada mereka. Dalam hidup sehari-hari, orang Batak Toba sangat tergantung pada kaidah moral utama kearifan lokal tersebut untuk mencapai kebahagiaan.

Masyarakat Batak Toba dari awal sudah dibekali kemampuan penyesuaian diri yang sangat besar, sehingga mereka bisa merantau kemanapun dan bersosialisasi dengan masyarakat lokal di tempat perantauannya. Hal ini dapat dilihat dari salah satu kearifan lokal tersebut yang dibuat oleh Raja Batak dan permaisurinya untuk dipedomani oleh rakyatnya. Kearifan lokal tersebut dinamakan Hatopan/Passa Uluan/Panca uluan atau lima sabda pokok, yakni:

*Pangintubu do ahu, painundun halak do
Pantun hangoluan, tois hamagoan
Didia pansur, disi do paridian
Didia solup, disi do parsuhatan
Ditoru tangan namangido*

Hatopan ini memiliki pengertian bahwa setiap masyarakat Batak Toba harus memiliki perilaku yang sopan, santun, dan ramah untuk memperoleh kehidupan yang damai sejahtera (pantun hangoluan). Jika mereka berperilaku

acuh tak acuh terhadap orang, maka akan menerima bencana (tois hamagoan). Hatopan tersebut juga mengajarkan bahwa masyarakat Batak Toba harus pintar beradaptasi dengan lingkungan (Didia pansur, disi do paridian dan Didia solup, disi do parsuhatan) serta memiliki sifat yang rendah hati (Ditoru tangan namangido).

Kearifan lokal lainnya yang didapat dari observasi di lokasi penelitian adalah konsep dan nilai Dalihan Na Tolu atau Tungku Nan Tiga. Nilai ini berfungsi sebagai pedoman yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada tata laku (perilaku) dan perbuatan (sikap atau pola tindak) orang Batak Toba. Konsep Dalihan Na Tolu ini adalah: “Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubu, dan Elek Marboru”, yang melambangkan pranata tata hubungan interaksi sekaligus landasan pola tingkah laku terhadap sesama manusia yang menjadi budaya, jati diri, dan peradaban yang diwariskan oleh nenek moyang (Raja Batak) hingga ke generasi-generasi berikutnya yang tertata rapi.

Nilai yang terkandung dalam Dalihan Na Tolu ini adalah Hula-hula (Sebutan bagi keluarga dari pihak istri) harus kita Somba (hormati) agar selalu mendapatkan berkat, keselamatan dan kesejahteraan. Dongan tubu (teman/saudara semarga) harus kita hargai (Manat), hati-hati, tetap menjaga etika persaudaraan agar terhindar dari segala perselisihan. Dan Elek Marboru (Selalu mengasihi saudara perempuan) agar damai dan berkat selalu menaungi keluarga masing-masing. Karena pentingnya konsep ini, nilai yang terdapat dalam Dalihan Na Tolu dijadikan tatanan hidup dan sekaligus menjadi sumber motivasi berperilaku. Menurut Harahap dan Siahaan (1987), Orang Batak Toba menghayati Dalihan Na Tolu sebagai satu sistem nilai budaya yang memberi pedoman bagi orientasi, persepsi, dan definisi terhadap kenyataan atau realitas. Konsep dan nilai yang terdapat dalam Dalihan Na Tolu masih dipedomani masyarakat Batak Toba hingga sekarang. Hal ini bisa terlihat pada tiap acara adat maupun dalam lingkungan masyarakat Batak Toba.

Armaidly Armawi (2008) dalam tulisannya berjudul Kearifan Lokal Batak Toba *Dalihan Na Tolu* Dan Good Governance Dalam Birokrasi Publik, menyatakan bahwa *Budaya Dalihan Na Tolu* mengatur dan mengendalikan kehidupan orang Batak Toba tidak hanya dalam konteks ikatan adat saja, tetapi juga dalam bidang ekonomi, agama, politik, bahkan birokrasi. Nilai ini pun seharusnya bisa digunakan dalam berhubungan dan menyambut wisatawan. Wisatawan dianggap *hula – hula, dongan tubu,*

dan *boru* yang harus dihormati, dihargai, serta disayangi. Jika ada anggapan yang demikian dalam masyarakat Batak Toba, maka tanah batak seperti Samosir akan menjadi tempat yang aman dan ramah bagi para wisatawan dan mereka dapat merasa seperti di rumah sendiri (*feels home*).

Kearifan lokal Batak Toba lainnya adalah '*bohi ni huta – dalam, bohi ni jabu – alaman.*' Ini berarti bahwa pentingnya menjaga kebersihan bagi masyarakat Batak Toba, baik kebersihan lingkungan dan juga kebersihan rumah sendiri. Berdasarkan observasi yang dilakukan di objek – objek wisata di Kabupaten Samosir, sekarang ini pedoman tersebut tidak lagi dilakukan orang batak. Malah saat ini, orang Batak dikenal dengan kejojokannya. Padahal mereka telah memiliki falsafah hidup yang berasal dari nenek moyangnya, namun hal itu sudah mulai pudar. Karenanya penting menghidupkan kembali falsafah tersebut, agar masyarakat Batak dapat menjaga kebersihan lingkungannya, terutama kebersihan objek – objek wisata untuk membuat wisatawan nyaman berlama – lama menikmati tempat tersebut.

Eksplorasi terhadap kekayaan luhur budaya bangsa sangat perlu untuk dilakukan, sekaligus berupaya untuk mengkritisi eksistensinya terkait dengan keniscayaan adanya perubahan budaya, ruang eksplorasi dan pengkajian kearifan lokal menjadi tuntunan tersendiri bagi eksplorasi khasanah budaya bangsa pada umumnya. Keunggulan lokal merupakan segala sesuatu yang merupakan ciri khas kedaerahan yang mencakup aspek ekonomi, budaya, komunikasi, ekologi, agama, dan lain-lain. Keunggulan lokal adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia atau lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah (Ahmadi, 2012). Joko Sutarto (2012) dalam jurnalnya berjudul Menggagas Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal mengatakan bahwa potensi budaya dan kearifan lokal dalam bidang pariwisata masih tinggi bahkan menjadi kecenderungan potensi wisata di masa depan. Oleh karena itu perlu digagas pola pengembangan wisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik wisata yang lebih estetis (*edipeni*) dan etis (*adiluhung*).

Dewasa ini, banyak kearifan lokal yang sudah mulai dilupakan, terkikis oleh zaman dan budaya asing, bahkan hampir punah, tidak terkecuali budaya dan kearifan lokal masyarakat Batak Toba. Padahal kearifan lokal tersebut menjadi potensi unggulan yang bisa diberdayakan oleh masyarakat lokal dalam menarik wisatawan berkunjung ke daerahnya. Dalam hubungannya dengan pariwisata,

masyarakat batak Toba seharusnya bisa menggunakan kearifan lokal yang ada di objek – objek wisata. Jika masyarakat Batak Toba melestarikan *Hatopan*, konsep *Dalihan Na Tolu* dan falsafah lainnya dalam beradaptasi dan berkomunikasi dengan wisatawan, maka para wisatawan akan dapat merasa nyaman. Pandangan orang terhadap *image* masyarakat Batak pun bisa berubah, tidak lagi dikatakan kasar, tetapi menjadi masyarakat Batak yang sopan dan santun.

Seluruh tatanan nilai adat dan budaya tersebut sebenarnya dianggap suci oleh orang Batak Toba. Hal ini juga terungkap dalam petuah adat yang mereka dapat dari leluhurnya, yakni '*martagan sipiliton, maransimun so bolaon, adat ni ama dohot ompu tokka siuban.*' Nilai yang terkandung dalam petuah adat ini mengisyaratkan adanya satu kepatuhan dan ketaatan kepada leluhur bahwa adat yang telah diwarisi oleh leluhur sesungguhnya tidak dapat diubah. Jadi sudah seharusnya kearifan lokal yang ada di-revitalisasi untuk membentuk karakter masyarakat Batak Toba seperti yang diajarkan oleh nenek moyang. Anggapan bahwa kearifan lokal tersebut mempunyai nilai sakralitas dalam membangun hubungan sosial bagi kehidupan, harus tetap dilestarikan dan dilaksanakan. Karena ada petatah-petitih orang Batak yang mengatakan '*omputta na di jolo martungkot siala gundi, adat na pinukka ni parjolo ingkon ihuthonon ni parpudi,*' yang berarti apa yang telah menjadi warisan budaya nenek moyang akan dilestarikan dan dilanjutkan generasi berikutnya.

Namun, di era globalisasi ini, terjadi pergeseran orientasi orang Batak, bahwa adat dan budaya sudah kuno, tidak perlu dipedomani lagi. Dari observasi yang dilakukan, seringkali kearifan lokal tersebut hanya dipedomani saat ada acara – acara adat saja. Namun, di dalam kehidupan sehari – harinya, masyarakat Batak Toba sudah mulai berubah, dan tidak mempraktekkan kearifan lokal tersebut. Dapat dilihat, terutama saat menyambut dan melayani wisatawan, orang batak lebih mementingkan keuntungan yang didapat dari wisatawan tersebut, bukan memikirkan bagaimana agar wisatawan tersebut merasa nyaman dan mau kembali lagi ke daerah mereka. Saat dilakukan observasi di daerah Tomok, masyarakat Batak yang menjadi pelaku usaha disana tidak lagi memiliki kesabaran dan kesantunan dalam melayani wisatawan. Banyak yang menjadi marah, misalnya, jika barang dagangannya hanya dipegang dan tidak jadi dibeli oleh wisatawan. Terlihat juga masyarakat Batak tidak lagi melakukan perilaku rendah hati seperti yang diajarkan nenek moyang. Masyarakat batak

Toba belum menjadikan *Dalihan Na Tolu* sebagai pedoman dalam berhubungan dengan wisatawan.

Karenanya perlu masyarakat Batak Toba diingatkan kembali akan nilai dan kearifan lokal yang telah diwariskan nenek moyangnya, untuk membentuk karakter orang Batak Toba yang disukai oleh wisatawan. Pelestarian dan pengembangan kearifan lokal masyarakat untuk menunjang pariwisata dapat dilakukan melalui sosialisasi di sekolah dan di dalam masyarakat sendiri. Pendidikan kearifan lokal di sekolah sebenarnya telah masuk pada kurikulum muatan lokalnya. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir saat ditanyakan apakah pendidikan kearifan lokal telah diberikan kepada siswa-siswi saat dilakukan wawancara:

..... ya itu muatan lokal, termasuk pariwisata dan kebudayaan. Jadi tidak hanya ekstra kurikuler saja yang ada di sekolah. Muatan lokal terkait pariwisata dan kebudayaan sudah ada. Memang kita buat di extra kurikuler tapi juga sudah ada dalam pembelajaran.

Materi muatan lokal di tingkat SD dan SMP sudah sampai pada Umpasa Batak (petuah-petuah Batak) dan Aksara Batak. Kita programkan anak harus tamat Aksara Batak di SD dan di SMP Umpasa Batak. Selain itu, pelajaran adat Batak misalnya cara memakai Ulos Batak untuk kebutuhan pesta atau adat lainnya juga diajarkan di sekolah. Kita mau mengajarkan dan menawarkan budaya Batak.

Jadi sebenarnya, sekolah telah mengakomodasi siswa-siswi untuk mengetahui kearifan lokalnya sendiri karena banyak yang telah hampir hilang. Namun berdasarkan hasil wawancara, pendidikan tersebut seringkali tidak maksimal diberikan, karena kendala kemampuan tenaga pengajarnya. Banyak guru yang tidak berkompeten yang memberikan mata pelajaran muatan lokal tersebut. Padahal pendidikan muatan lokal, termasuk pendidikan kearifan lokal perlu untuk diajarkan oleh guru yang memang ahli dan berkompeten masalah kebudayaan daerahnya. Karena selain untuk pelestarian budaya batak dan pengembangan kepariwisataan, pendidikan kearifan lokal ini juga diharapkan dapat membentuk karakter siswa-siswi untuk dapat menjadi teladan di rumah dan lingkungan masyarakat, termasuk dalam menyambut dan melayani wisatawan.

Selain di sekolah, sosialisasi kearifan lokal ini juga perlu dilakukan pada kelompok – kelompok masyarakat, seperti kelompok karang taruna dan kelompok sadar wisata. Kelompok – kelompok masyarakat yang dibentuk tersebut,

diharapkan tidak hanya dilatih untuk pengembangan ekonomi kreatif saja, tetapi seharusnya juga diberi pelatihan dan sosialisasi bagaimana menyambut wisatawan dengan menggunakan budaya dan kearifan lokal yang dimilikinya.

Kearifan lokal menjadi salah satu aset penting masyarakat lokal yang dapat diberdayakan di sektor pariwisata. Joko Sutarto (2012) mengatakan bahwa pengembangan pariwisata di suatu daerah harus memberi jaminan rasa aman bagi pendatang karena penduduk beserta cipta, rasa dan karsanya merupakan obyek wisata yang menarik dan eksotis. Keramah-tamahan penduduk merupakan daya tarik wisata yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, demikian juga kehidupan masyarakat ketika berinteraksi dengan alam dan tuhan-tuhan merupakan atraksi pariwisata yang memikat dan menawan hati.

Kabupaten Samosir sebagai salah satu daerah Tujuan Wisata (DTW) unggulan di Sumatera Utara harus bisa menangkap hal itu dan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui revitalisasi kearifan lokalnya. Karena masyarakat Batak Toba memiliki kekayaan kebudayaan dan kearifan lokal, sehingga harusnya bisa membentuk karakter orang Batak yang disenangi oleh orang luar. Dengan begitu, banyak wisatawan yang akan tertarik untuk datang melihat dan mempelajarinya budaya dan kearifan lokal masyarakat Batak Toba tersebut ke Kabupaten Samosir.

KESIMPULAN

Kearifan lokal Batak Toba menjadi potensi penting dalam membentuk karakter dan identitas masyarakat Batak yang bisa bergaul dan bersosialisasi dengan wisatawan, serta menciptakan lingkungan yang bersih dan aman di lokasi-lokasi wisata. Dengan begitu, para wisatawan dapat nyaman berada di tengah – tengah masyarakat adat. Banyak kearifan lokal intangible masyarakat Batak Toba, baik itu petuah, semboyan, atau lainnya yang berasal dari nenek moyang yang sudah mulai pudar di tengah masyarakat Batak saat ini. Padahal semua kearifan lokal itu baik dan dapat di-revitalisasi untuk mendukung sektor pariwisata, termasuk di Kabupaten Samosir yang menjadi basis wisata di area sekitar Danau Toba. Karenanya, kearifan lokal perlu dihidupkan dan diberdayakan kembali, selain untuk menyambut wisatawan, juga untuk melestarikan kearifan lokal yang telah diajarkan nenek moyang untuk dipedomani oleh generasi – generasi berikutnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi ke sekolah – sekolah dan kelompok –

kelompok masyarakat yang ada di sekitar objek wisata.

REKOMENDASI

Dari hasil pembahasan, maka rekomendasi yang bisa diberikan adalah:

- a. Perlunya koordinasi antara pemuka adat dengan pemerintah, untuk menginventarisasi kearifan lokal intangible lainnya yang bermanfaat dalam membentuk karakter dan identitas masyarakat Batak untuk mendukung sektor pariwisata. Kemudian melakukan sosialisasi dan mengembangkan kurikulum mengenai budaya dan kearifan lokal masyarakat dalam semua tingkatan pendidikan di sekolah-sekolah.
- b. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi, pembinaan dan workshop pada kelompok-kelompok masyarakat di sekitar lokasi wisata dalam me-revitalisasi budaya dan kearifan lokal yang ada untuk membentuk sikap dan karakter masyarakat dalam mendukung sektor pariwisata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dan Magister Antropologi Sosial Universitas Negeri Medan, serta para pihak yang telah memberikan dukungan pada penulisan laporan kegiatan penelitian ini. Khususnya juga kepada informan dan narasumber kami di Kabupaten Samosir serta pihak dinas terkait yang telah memberikan masukan, tanggapan dan kritik dalam penyempurnaan laporan penelitian ini. Semoga laporan ini memberi manfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, dkk. 2012. Mengembangkan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dalam KTSP. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Armawi, Armaidly. 2008. Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan Na Tolu Dan Good Governance Dalam Birokrasi Publik. *Jurnal Filsafat*, 18(2), Agustus 2008.

Astina, I.K. 1999. Geografi Pariwisata. Malang: Universitas Negeri Malang.

Fandeli, Chafid. 2000. Pengusahaan Ekowisata. Penerbit Fakultas Kehutanan UGM.

Giddens, Anthony. 2001. Runaway World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita. Jakarta: Gramedia.

Harahap, H Basyral & Siahaan, Hotman M. 1987. Orientasi Nilai - Nilai Budaya Batak, Jakarta: Sanggar Willem Iskandar.

Kontjaraningrat. 1974. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Malik, Farmawaty. 2016. Peranan Kebudayaan Dalam Pencitraan Pariwisata Bali. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*. Vol. 11 No. 1 Juni 2016 ISSN 1907 - 9419. Jakarta.

Munawaroh, Prasiti. 1999. Peranan Kebudayaan Daerah Dalam Perwujudan Masyarakat Industri Pariwisata. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendit. 2006. Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana. Jakarta: Pradnya Paramita.

Saarinen, Jarkko & Manwa, Heretsebe. 2008. Tourism as a Socio-Cultural Encounter: Host-Guest Relations in Tourism Development in Botswana. *Botswana Notes and Records*, Tourism as a Sustainable Development Factor (2008), Vol. 39, pp. 43-53.

Siahaan, Nalom, Drs. 1982. Adat Dalihan Na Tolu (Prinsip dan Pelaksanaanya). Jakarta: Grafina.

Sumarmi dan Amirudin. 2014. Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal. Yogyakarta: Aditya Media.

Sunaryo, Bambang. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Sutarso, Joko. 2012. Menggagas Pariwisata Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal. Program Studi Ilmu Komunikasi FKI UMS

Suwantoro Gamal. 1997. Dasar-dasar Pariwisata. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Wagiran, dkk. 2009. Pengembangan Model Pendidikan Kearifan Lokal di Wilayah Provinsi DIY dalam Mendukung Perwujudan Visi Pembangunan DIY menuju Tahun 2025 (Tahun Pertama). Penelitian. Yogyakarta: Biro Administrasi Pembangunan.

Walker, L. & Diana, B. 1996. The Tourism Action Society In The Kootenays : Step By Step Guide To Heritage Tourism Development In The Kootenay-Boundary. Kootenay.

Hasil Penelitian

PENGELOLAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS SEI MANGKEI BERBASIS PENILAIAN KINERJA LINGKUNGAN

(MANAGEMENT OF SPECIAL ECONOMIC ZONES SEI MANGKEI BASED ON ENVIRONMENTAL PERFORMANCE ASSESSMENT)

*Nobrya Husni**, *Esther S. M. Nababan***, *Delvian***

*Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Universitas Sumatera Utara
Jl. Dr. Mansyur Medan, 20155
email: nobrya@gmail.com

**Dosen Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Universitas Sumatera Utara
Jl. Dr. Mansyur Medan, 20155

Diterima: 19 Mei 2018; Direvisi: 25 Mei 2018; Disetujui: 25 Mei 2018

ABSTRAK

Bisnis utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei adalah industri pengolahan kelapa sawit dan karet, dengan bisnis pendukung seperti logistik, energi, elektronika, industri penunjang produksi, aneka industri, dan pariwisata. Produk yang dihasilkan yaitu: *fatty acid*, *fatty alcohol*, *surfactant*, biodiesel, dan biogas (Dewan Nasional KEK, 2015). Kegiatan operasional pada kawasan industri memberikan keuntungan dari aspek ekonomi, namun disisi lain menghasilkan limbah, sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan dan kegiatan operasional memiliki hubungan. Oleh karena itu pertimbangan lingkungan penting sebagai upaya mengurangi kerusakan lingkungan untuk meminimalisasi resiko kerusakan lingkungan dan tetap memperoleh keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pengelola dan penyewa terhadap penilaian kinerja lingkungan terutama dari aspek lingkungan, serta menganalisis kesiapan KEK Sei Mangkei dalam melakukan penilaian kinerja lingkungan dari aspek lingkungan. Penelitian dilakukan dengan metode survey dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner. Analisis data dilakukan secara kuantitatif deskriptif dan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengelola dan tenant pada KEK Sei Mangkei memiliki pemahaman sedang – baik terhadap konsep penilaian kinerja lingkungan berdasarkan ISO 14031.

Kata kunci: kawasan ekonomi khusus, kelapa sawit, ISO 14031, indikator lingkungan

ABSTRACT

Major business in the Special Economic Zone (SEZ) Sei Mangkei is a palm oil and rubber processing industry, with supporting businesses such as logistics, energy, electronics, production support industries, various industries, and tourism. The products produced are: fatty acid, fatty alcohol, surfactant, biodiesel, and biogas (National Council of KEK, 2015). Operational activities in the industrial area provide benefits from economic aspects, but on the other hand generate waste, so it can be said that the environment and operational activities have a relationship. Therefore, important environmental considerations as an effort to reduce environmental damage to minimize the risk of environmental damage and still gain a profit. This study aims to determine the understanding of managers and tenants on the assessment of environmental performance, especially from environmental aspects, and analyzing SEZ Sei Mangkei's readiness in conducting environmental performance assessment from environmental aspect. The research was conducted by survey method with data collection technique through interview and questionnaire. Data analysis is done quantitatively descriptive and qualitative. Based on the result of the research, it is concluded that the managers and tenants of KEK Sei Mangkei have good understanding on the concept of environmental performance assessment based on ISO 14031. on the concept of environmental performance assessment based on ISO 14031.

Keywords: special economic zone, oil palm, ISO 14031, environment indicators

PENDAHULUAN

Provinsi Sumatera Utara memiliki luas areal perkebunan kelapa sawit terluas kedua setelah Riau, persentase luas perkebunan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2015. Perkebunan rakyat mengalami peningkatan 29,37 %, perkebunan negara sebesar 23 %, sedangkan perkebunan swasta mengalami kenaikan sebesar 47% (Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, 2014). Sehingga pada program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan pada tahun 2011, Sumatera Utara ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Termasuk dalam koridor ekonomi Sumatera dengan arah pengembangan sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional, dengan kegiatan ekonomi utama yaitu kelapa sawit (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011).

Keberadaan KEK Sei Mangkei ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2012 yang operasionalnya diresmikan pada tanggal 27 Januari 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Bisnis utama di KEK Sei Mangkei adalah industri kelapa sawit dan karet, dengan bisnis pendukung seperti logistik, energi, elektronika, industri penunjang produksi, aneka industri, dan pariwisata. Produk yang dihasilkan yaitu: *fatty acid*, *fatty alcohol*, *surfactant*, biodiesel, dan biogas (Dewan Nasional KEK, 2015). Kegiatan operasional pada kawasan industri mempunyai prospek menguntungkan disisi lain menghasilkan limbah, sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan dan kegiatan operasional memiliki hubungan. Kesalahan pada aspek operasional akan mengakibatkan dampak lingkungan yang merugikan atau malah mengurangi dampak serta peluang untuk melakukan perbaikan (Shokravi, Smith, & Burvill, 2014). Agar keberlanjutan operasional dapat terjaga perlu perhatian khusus untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat kegiatan industri, seperti: limbah padat dan limbah cair, emisi gas rumah kaca, pencemaran air, maupun penanganan limbah yang tidak tepat (Jianchun et al., 2011; Hashim, Bakar and Lim, 2014). Karenanya pertimbangan lingkungan penting sebagai upaya mengurangi kerusakan lingkungan untuk meminimalisasi resiko lingkungan akibat kegiatan industri, seperti: limbah padat dan limbah cair, emisi gas rumah kaca, pencemaran air, maupun dampak akibat penanganan limbah yang tidak tepat dan tetap memperoleh keuntungan (Jianchun et al., 2011; Hashim, Bakar and Lim, 2014).

Meskipun pada saat ini pengelolaan lingkungan telah dilakukan di KEK Sei Mangkei sesuai dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), namun penerapan standar International Standardization Organization (ISO) dalam pengelolaan lingkungan dapat memberikan keuntungan bagi pengelola untuk memperoleh lebih banyak investor. ISO 14031 yang memberikan petunjuk bagi organisasi dalam rangka mengevaluasi kinerja lingkungan merupakan salah satu standar yang telah digunakan dibanyak negara untuk pengelolaan lingkungan. Aspek pengelolaan lingkungan yang dilakukan menurut ISO 14031 yaitu dengan melakukan penilaian kinerja lingkungan terhadap aspek social, ekonomi dan lingkungan. Penilaian kinerja lingkungan telah diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia sebagai evaluasi yang efektif untuk mengatur dan memperbaiki manajemen pencemaran dan perlindungan lingkungan. Pengukuran terhadap kinerja lingkungan dapat menyediakan informasi secara kuantitatif untuk menganalisis kebijakan lingkungan dan pengambilan keputusan. Metode dan prosedur standar penilaian evaluasi kinerja lingkungan antara lain diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO) maupun World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (Liu et al., 2011; Meng et al., 2013).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pengelola dan penyewa terhadap penilaian kinerja lingkungan terutama dari aspek lingkungan dengan menggunakan standar ISO 14031. Variabel dari indikator lingkungan yang akan diidentifikasi pada KEK Sei Mangkei mengacu pada ISO 14031 yaitu: kesehatan dan keselamatan; risiko lingkungan akibat aktivitas organisasi, termasuk tren dari waktu ke waktu; dampak pada kualitas hidup (misalnya iklim, akustik, bau, dampak visual); insiden lingkungan dan keluhan; bukti bahwa organisasi memenuhi komitmen lingkungan mereka; dampak lingkungan; beban lingkungan (misalnya: emisi, pembuangan, pembuangan limbah) termasuk tren dari waktu ke waktu; keanekaragaman hayati; dampak pada layanan ekosistem; keberlanjutan; polusi lintas batas dan masalah lingkungan global lainnya; dampak perdagangan terhadap lingkungan; harmonisasi rezim regulasi; karakteristik lingkungan dari produk dan layanan; dan, kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan hukum dan peraturan (International Organization for Standardization, 2013). Penelitian ini akan memberikan

gambaran terhadap 8 (delapan) variabel yang diamati di Kek Sei Mangkei.

METODE

Penelitian dilakukan dengan pendekatan survey dengan data primer yang bersumber dari wawancara dan kuesioner pada bulan Maret – April 2018, sedangkan data skunder berasal dari: laporan teknis pengelola dan penyewa, aturan perundang-undangan, serta hasil penelitian sebelumnya yang telah diterbitkan dalam jurnal. Responden penelitian adalah pengelola dan penyewa pada KEK Sei Mangkei. Wawancara dilakukan pada pengelola dan penyewa yaitu: sekretaris Administrator KEK Sei Mangkei; Manager operasional PT. Kawasan Industri Nusantara; Asisten tata usaha PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) III; Asisten tata usaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Mangkei; dan, Asisten tata usaha Pabrik Kernel Oil (PKO) Sei Mangkei. Sampel kuesioner berasal dari seluruh responden ditambah dengan staf pada pengelola dan penyewa, sehingga keseluruhan sampel berjumlah 58 orang.

Panduan wawancara meliputi pertanyaan tentang: kegiatan dan aktivitas pada KEK Sei Mangkei; pengelolaan limbah; serta, sarana dan prasarana. Pertanyaan pada kuesioner terkait dengan pemahaman pengelola dan penyewa terhadap unsur-unsur variabel indikator lingkungan menurut ISO 14031 yang diterbitkan pada buku pedoman evaluasi kinerja lingkungan ISO 14031: 2013 (E) lampiran A.2.3, yaitu: penilaian kinerja lingkungan; risiko lingkungan; dampak pada kualitas hidup; keanekaragaman hayati; beban lingkungan; keberlanjutan; konsumsi sumber daya; komitmen organisasi terhadap lingkungan; serta, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Kuesioner berisi 25 pertanyaan dengan pemeringkatan menggunakan *rating scale*, dengan pilihan jawaban: 1= tidak setuju; 2 = netral; dan, 3 = setuju, dengan skor kriteria (jika seluruh pertanyaan mendapat skor maksimal) 4350. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan membandingkan skor setiap variabel dengan skor kriteria. Persentase pemahaman pengelola dan penyewa diperoleh dengan membandingkan jumlah pembobotan dari setiap variabel dibagi dengan skor kriteria.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KEK Sei Mangkei. Merupakan pengembangan bisnis dengan pendekatan dalam bentuk kawasan khusus untuk pusat industri yang berbasis kelapa sawit dan karet. Keunikan KEK Sei Mangkei adalah berada disentra bahan baku berbasis agro, yang tidak dimiliki oleh kawasan industri lainnya di Indonesia. Filosofi

KEK Sei Mangkei sebagai “*ECO Industrial Park*” dengan pengembangan hilirisasi sumber daya alam hasil perkebunan di Sumatera Utara terutama kelapa sawit dan karet, mengedepankan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam mengeksplorasi sumber daya alam menjadi produk siap pakai yang berkualitas. Keberlanjutan akan tercapai jika kemajuan kawasan seimbang dengan daya lingkungan, karenanya pengelolaan lingkungan sangat penting dilakukan.

KEK Sei Mangkei berada di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan luas areal mencapai 640 Ha dan telah memiliki beberapa industri didalam kawasan yang berstatus dalam tahap pengujian operasi. Infrastruktur yang telah tersedia di KEK Sei Mangkei, antara lain: Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) berkapasitas 75 ton/jam; Pabrik Tenaga Listrik Biomassa Sawit (PLTBS) dengan kapasitas 2x3,5 MW; dan, pabrik Palm Kernel Oil (PKO) dengan kapasitas 400 ton/hari. Fasilitas dasar klaster yang telah tersedia di KEK Sei Mangkei antara lain: gedung perkantoran; *water treatment intake and plant*; unit *water treatment*; saluran induk; jaringan listrik; fasilitas Teknologi Informasi (TI); perumahan karyawan; tempat ibadah; serta jalan akses masuk klaster. Sedangkan infrastruktur pendukung yang telah dan akan disediakan antara lain: jalan raya; jalan kereta api; jalan tol Kualanamu – Tebing Tinggi; fly over Kuala Tanjung; peningkatan kapasitas jalan disekitar kawasan; serta pelabuhan pendukung yaitu Belawan dan Kuala Tanjung (Said & Aryanthi, 2013).

PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) III sebagai pemilik lahan perkebunan sawit dan karet yang saat ini menjadi KEK Sei Mangkei, ditetapkan sebagai badan pembangun dan pengelola KEK Sei Mangkei sesuai dengan Keputusan Bupati Simalungun Nomor 188.45/193/BPPD tahun 2012. Kemudian pada tahun 2015, PTPN III mendapat persetujuan atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) KEK Sei Mangkei seluas 1.933,80 ha sesuai dengan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 27/HPL/BPN RI/2014 tanggal 23 Juni 2014. Menjalankan perannya sebagai badan pembangun yang melakukan pembangunan infrastruktur di KEK Sei Mangkei yang saat ini telah memasuki tahap kedua yang dimulai sejak tahun 2016-2021 dengan rencana pengembangan seluas 640 Ha.

Hingga tahun 2018 luas lahan yang telah mengalami pengembangan dan ditempati oleh tenant seluas 212 ha atau masih sepertiga dari target pengembangan tahap kedua. Infrastruktur yang telah disediakan oleh PTPN

III untuk kepentingan pengelola dan kawasan yaitu: jalan didalam kawasan; jaringan listrik; jaringan pipa gas; jaringan telekomunikasi dan informasi teknologi; pusat pengolahan air; pusat pengolahan air limbah; dry port; dan, tanki timbun. PT. Kinra yang merupakan badan usaha milik PTPN III dengan bidang usaha pada jasa pemasaran dan pengelolaan KEK Sei Mangkei. Pembentukannya bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan daya perseroan sehingga menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai sesuai dengan prinsip-prinsip perseroan.

Pemahaman pengelola dan penyewa terhadap penilaian kinerja lingkungan. Pemahaman pengelola dan tenant terhadap kondisi social, ekonomi dan lingkungan berdampak pada kemampuan organisasi dalam melakukan penilaian kinerja lingkungan. Hasil pembobotan kuesioner diperoleh total skor 3738, sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan responden memiliki pemahaman sedang – baik terhadap konsep penilaian kinerja lingkungan berdasarkan ISO 14031. Pemahaman yang baik dari pengelola dan penyewa terhadap penilaian kinerja lingkungan akan menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Seperti yang diungkapkan Viegas (2005) bahwa pemahaman yang sama antara pengelola dan tenant berguna untuk melakukan kontrol terhadap aspek lingkungan yang disesuaikan dengan kebijakan, target dan sasaran organisasi sehingga pengukuran kinerja lingkungan dapat dilakukan.

Penilaian kinerja lingkungan. Pernyataan mengenai penilaian kinerja lingkungan mendapat skor 301 dari total skor 348 atau 86,50% responden menyatakan bahwa penilaian kinerja lingkungan berguna sebagai system pengelolaan lingkungan serta merupakan alat control organisasi terhadap aspek lingkungan. Penilaian kinerja lingkungan suatu kawasan industri merupakan tahapan awal dari proses evaluasi kinerja lingkungan. Pemilihan variabel dari masing-masing indikator sosial, ekonomi dan lingkungan dilakukan pada tahap perencanaan. Pada tahapan perencanaan, pemilihan terhadap indikator untuk evaluasi kinerja lingkungan penting untuk dilakukan. Pengumpulan dan analisis data akan sangat berguna dalam menghasilkan laporan evaluasi kinerja lingkungan yang harus dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder untuk ditinjau ulang guna meningkatkan kinerja lingkungan (Viegas, 2005). Mengacu pada pernyataan tersebut maka perlu dilakukan identifikasi terhadap indikator

kinerja lingkungan di KEK Sei Mangkei dengan melibatkan pengelola dan pihak penyewa (tenant). Hingga tahun 2018 terdapat 3 (tiga) penyewa yang melakukan aktivitas produksi di KEK Sei Mangkei, yaitu: PT. Unilever Oleochem Industri; Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Mangkei; dan, Pabrik Kernel Oil (PKO) Sei Mangkei.

Risiko lingkungan. Variabel ini mencakup aktivitas organisasi, termasuk tren dari waktu ke waktu: mencakup berkurangnya sumber daya, menurunnya keanekaragaman hayati, berkurangnya habitat alami, perubahan iklim dan polusi. Skor variabel risiko lingkungan yaitu 152 dari 174 total skor atau sebesar 87,36%. Persentase ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pentingnya pertimbangan terhadap risiko lingkungan yang merupakan salah satu variabel indikator lingkungan dalam penilaian kinerja lingkungan. KEK Sei Mangkei yang merupakan kawasan industry berbasis agro memiliki kelebihan dari sisi bahan baku dan keterjangkauan. Namun jika kelebihan ini tidak dikelola akan mengakibatkan keberlanjutan dari kawasan industry tidak berjalan seperti yang diharapkan. Seperti pada hasil penelitian Jianchun, dkk (2011) yang mengungkapkan bahwa sejak tahun 2002-2006 kerusakan lingkungan pada kawasan industri di China mencapai 1.400 kasus setiap tahunnya dan berdampak pada kerugian secara ekonomi. Penyebab kerusakan lingkungan yang sering terjadi yaitu pembuangan limbah secara illegal, seperti pembuangan limbah yang mengandung arsenik dan bahan berbahaya.

Dampak pada kualitas hidup. Variabel ini mencakup kebisingan, kenaikan suhu, polusi udara, bau, dan perubahan bentang alam (misalnya iklim, akustik, bau, dampak visual). Variabel dampak pada kualitas hidup mendapat skor 696 dari total skor 738 atau sebesar 94,31%. Persentase ini menggambarkan bahwa mayoritas responden setuju terhadap pengelolaan polusi tanah, air dan udara. Selain menghasilkan barang dan jasa, aktivitas produksi di KEK Sei Mangkei juga menghasilkan polusi udara seperti bau dan kebisingan serta pemanasan global. Kondisi ini seperti yang diungkapkan Shokravi, Smith & Burvill (2014), bahwa kegiatan operasional pada kawasan industri memberikan keuntungan dari aspek ekonomi, namun disisi lain menghasilkan limbah, kesalahan pada aspek operasional akan mengakibatkan dampak lingkungan yang merugikan atau malah mengurangi dampak serta peluang untuk melakukan perbaikan. Maka, penilaian kinerja lingkungan merupakan salah satu alat bagi pengelola dan penyewa kawasan industry untuk meminimalisi dan mengurangi dampak lingkungan.

Keanekaragaman hayati. Mencakup mencakup dampak penting dari aktivitas; habitat yang dilindungi dan dipulihkan; strategi penanganan dampak pada keanekaragaman hayati; umumnya tercantum pada dokumen RKL dan RPL kawasan. Persentase pemahaman terhadap variabel keanekaragaman hayati yaitu 85,92% atau skor sebesar 299 dari total skor 348. Pengelolaan terhadap variabel keanekaragaman telah dilakukan sesuai dengan dokumen Amdal KEK Sei Mangkei. Meskipun, tidak terlalu berdampak mengingat tata guna lahan KEK Sei Mangkei sebelumnya merupakan lahan perkebunan.

Beban lingkungan. Variabel ini mencakup mencakup emisi gas rumah kaca, NO_x , SO_x , dan emisi udara penting lainnya, serta jenis limbah lainnya. Memperoleh skor 467 dari total skor 522 atau 89,46 responden menyatakan setuju dilakukannya pengukuran beban lingkungan di KEK Sei Mangkei. Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas di KEK Sei Mangkei menghasilkan limbah cair dan padat. Pengelolaan terhadap limbah cair dilakukan oleh penyewa sampai baku mutu tertentu, lalu dialirkan ke Waste Water Treatment Plant (WWTP) milik pengelola. Setelah mencapai baku mutu yang dipersyaratkan maka limbah cair dapat dialirkan ke badan air. Sedangkan untuk limbah padat dilakukan dengan membuang ke TPA (Tempat Pembuangan sampah Akhir) yang berada di Kota Perdagangan. Pengelolaan terhadap limbah industri kelapa sawit penting dilakukan sejalan dengan yang disampaikan oleh Hashim et al., (2014) bahwa industri kelapa sawit berkontribusi pada isu lingkungan seperti: konsumsi energi, pembuangan limbah padat dan limbah cair (POME), emisi gas rumah kaca, serta pencemaran air karena penanganan limbah yang tidak tepat.

Keberlanjutan. Mencakup material yang digunakan berdasarkan berat atau volume; persentase material daur ulang yang digunakan; konsumsi energi langsung dari sumber daya primer; penghematan energi; inisiatif penyediaan energi terbarukan; konsumsi air yang diambil dari sumbernya; serta, persentase air yang di daur ulang dan digunakan kembali. Total skor dari variabel keberlanjutan adalah 738 dari total skor 870 atau 84,83%. Persentase ini menggambarkan bahwa mayoritas responden memahami bahwa variabel keberlanjutan penting dimasukkan kedalam variabel penilaian kinerja lingkungan. Konsep keberlanjutan merupakan visi dari pengelola KEK Sei Mangkei yaitu menciptakan kota industry modern yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan melalui pengembangan pengolahan sumberdaya alam lokal secara

optimal di tahun 2031. Guna mewujudkan visi tersebut, pengelolaan terhadap aspek pendukung di KEK Sei Mangkei diserahkan kepada unit-unit usaha yaitu: 1) PT. Kinra Logistik, melakukan pengelolaan terhadap tanki timbun serta dry port dan pergudangan; 2) PT. Kinra Energi, melakukan pengelolaan energi listrik, gas alam, serta energi baru terbarukan; 3) PT. Kinra Utilities, melakukan pengelolaan air bersih, limbah cair, limbah padat, dan pemadam kebakaran; dan, 4) PT. Kinra Properti, melakukan pengelolaan hotel, lapangan golf, pariwisata, perumahan, apartemen, sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, serta pusat olahraga. Menurut Jacobsen (2006) pendekatan yang dapat dilakukan untuk keberlanjutan industri adalah simbiosis industri yang harus dipahami sebagai hubungan antara ekonomi dan kinerja lingkungan.

Konsumsi sumber daya. Merupakan variabel yang mencakup penggunaan bahan baku lokal serta pengelolaan terhadap sumberdaya seperti air dan tanah (lahan) yang digunakan untuk aktivitas di KEK Sei Mangkei. Skor terhadap variabel konsumsi sumber daya adalah 444 dari total skor 696 atau 63,79%. Keterjangkauan bahan baku yaitu sawit yang dapat diperoleh dari perkebunan disekitar KEK Sei Mangkei merupakan salah satu alasan pembangunan kawasan industry berbasis sawit di Kecamatan Bosar Maligas. Kebutuhan sumber daya air dipenuhi dari sungai bah tongguran yang merupakan anak sungai bah bolon. Masterplan KEK Sei Mangkei dengan peruntukan antara lain: industry sawit; aneka industry; saprodi; industry karet; industry elektronika; kawasan komersial; kawasan perkantoran; logistic dan pergudangan; fasilitas umum; perumahan; dan, industry listrik, memerlukan pasokan air dalam jumlah yang besar. Sehingga penilaian kinerja lingkungan dapat digunakan sebagai acuan pengelola untuk menghadapi perkembangan kawasan dengan tetap mempertimbangkan kondisi lingkungan. Kang & Xu (2012) mengusulkan untuk dilakukan analisis perkembangan kawasan industry agar seimbang dengan daya dukung lingkungan.

Komitmen organisasi terhadap lingkungan. Variabel ini mencakup pelaksanaan dokumen RKL dan RPL, pelaporan organisasi tentang pembuangan limbah, persentase limbah yang dikelola, alokasi dana untuk konservasi lingkungan, serta dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Variabel ini memperoleh skor 273 dari total skor 348 atau 78,45%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa organisasi yaitu pengelola KEK Sei Mangkei memiliki komitmen terhadap pengelolaan lingkungan dengan melakukan monitoring dan

pengawasan terhadap aktivitas penyewa. Pihak pengelola yang berperan dalam monitoring dan pengawasan adalah Administrator KEK Sei Mangkei yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tim teknis pemerintah kabupaten Simalungun yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Tenaga Kerja; dan Dinas Penataan Ruang dan Permukiman. Komitmen organisasi terhadap lingkungan sangat penting seperti yang diungkapkan oleh Madanhire and Mbohwa (2016), bahwa Pertimbangan terhadap lingkungan penting untuk mencegah permasalahan lingkungan yang mungkin timbul pada proses produksi sekaligus untuk mendapatkan keuntungan pasar, penghematan biaya dan juga memperkecil resiko. Kinerja lingkungan bukan hanya sekedar tanggung jawab perusahaan, namun juga menjadi faktor yang penting dalam kompetisi bisnis. Perlindungan terhadap lingkungan berfungsi sebagai kontrol, mengurangi pembersihan dan biaya mitigasi tumpahan, mengurangi biaya hukum, biaya kontrol dan denda, serta mengurangi biaya asuransi.

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Mencakup evaluasi lingkungan sesuai dengan dokumen RKL dan RPL, pengelolaan lingkungan sesuai standar ISO, serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Variabel ini memperoleh skor 460 dari total skor 522 atau 88,12%. Kepatuhan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan mengenai KEK Sei Mangkei mutlak dilakukan oleh pengelola dalam rangka menjalankan perannya. Ketiga unsur pengelola memiliki peran yang berbeda-beda dalam mengelola KEK Sei Mangkei. Administrator memiliki tugas, yaitu: 1) Memberikan izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha dan izin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan dan mengembangkan usaha di KEK; 2) Melakukan pemantauan dan pengendalian operasionalisasi KEK yang dilakukan oleh Badan Usaha Pengelola KEK dalam hal ini PTPN III dan PT. Kinra; dan, 3) Menyampaikan laporan operasionalisasi KEK secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.

Keseluruhan persepsi memiliki persentase diatas 50% yang menunjukkan bahwa pengelola memiliki pemahaman terhadap pentingnya penilaian kinerja lingkungan di KEK Sei Mangkei dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Namun demikian, pemahaman penyewa terhadap penilaian kinerja lingkungan di KEK Sei Mangkei perlu diketahui sehingga penilaian kinerja dapat dilakukan. Konsep ini seperti yang diungkapkan Viegas (2005), bahwa

pemahaman yang sama antara pengelola dan penyewa berguna untuk melakukan kontrol terhadap aspek lingkungan yang disesuaikan dengan kebijakan, target dan sasaran organisasi sehingga pengukuran kinerja lingkungan dapat dilakukan, analisis data terhadap setiap variabel berguna untuk menghasilkan evaluasi kinerja lingkungan sebagai bahan pertimbangan bagi pengelola dan penyewa untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Pengukuran terhadap kinerja lingkungan telah disarankan secara luas karena dapat menyediakan informasi secara kuantitatif untuk analisis kebijakan lingkungan dan pengambilan keputusan (Meng, Fan, Zhou, & Zhou, 2013). Selanjutnya evaluasi terhadap kawasan industri dapat ditinjau dari segi lingkungan, ekonomi, sosial, dan manajemen (Hui, 2011; Wenbo, 2011). Keunikan KEK Sei Mangkei yang membuat penilaian kinerja lingkungan penting untuk dilakukan yaitu lokasinya berada di sekitar areal permukiman warga sehingga akan berdampak tidak hanya pada lingkungan, namun juga sosial ekonomi. Kondisi ini juga diungkapkan oleh Nababan, Ibrahim, & Siahaan (2017) yang menyatakan bahwa penduduk sekitar KEK Sei Mangkei akan memberikan dampak sosial dan ekonomi pada penilai kinerja lingkungan.

KESIMPULAN

Pengelola dan penyewa pada KEK Sei Mangkei memiliki pemahaman sedang – baik terhadap konsep penilaian kinerja lingkungan berdasarkan ISO 14031 yang bermakna bahwa pengelola dan penyewa memiliki pemahaman terhadap pentingnya penilaian kinerja lingkungan di KEK Sei Mangkei dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi dan keberlanjutan kawasan. Pengelolaan lingkungan dengan mengacu pada Amdal KEK Sei Mangkei telah mampu memberikan pemahaman kepada pengelola dan kawasan tentang konsep keberlanjutan yang menjadi visi misi kawasan. Penerapan ISO 14031 pada pengelolaan lingkungan akan meningkatkan daya saing kawasan yang hingga saat ini pengembangannya baru mencapai 35% dari keseluruhan luas lahan yang direncanakan. Kemudahan dalam aspek administrasi dan operasional akan meningkatkan minat investor dalam berinvestasi di KEK Sei Mangkei.

REKOMENDASI

1. Identifikasi terhadap variabel lingkungan untuk penilaian kinerja lingkungan disarankan untuk dilakukan sehingga KEK Sei Mangkei memperoleh sertifikat ISO 14031 yang berguna untuk meningkatkan daya saing kawasan pada calon investor.

2. Pengelola dan penyewa bekerjasama untuk menentukan variabel lingkungan untuk penilaian kinerja lingkungan di KEK Sei Mangkei serta berupaya untuk memperoleh sertifikasi ISO 14031.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. Esther Sorta Mauli Nababan, M.Sc. dan bapak Dr. Delvian, SP, MP. yang telah membantu dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dewan Redaksi Jurnal INOVASI Balitbang Provinsi Sumatera Utara yang telah menerima artikel ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Universitas Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. 2014. *Statistik Perkebunan Indonesia 2013-2015 Kelapa Sawit, Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit*. Jakarta.

Hashim, H., Bakar, S. M. A., & Lim, J. S. 2014. Green Industry for Low Carbon Economy: Palm Oil Green Assessment Tool. *Energy Procedia*, 61, 2759–2762. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.12.299>

Hui, Z. 2011. Study on the fuzzy analytic hierarchy integrated evaluation method of Eco-Industrial Parks. *Energy Procedia*, 5, 1944–1948. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2011.03.335>

International Organization for Standardization. 2013. INTERNATIONAL STANDARD - ISO 14031. Switzerland: ISO.

Jacobsen, N. B. 2006. Industrial Symbiosis in Kalundborg, Denmark. *Journal of Industrial Ecology*, 10(1–2), 239–256.

Jianchun, W., Lin, W., Xiaohu, W., Gaosheng, Z., Haifang, F., & Keqin, L. 2011. A Study on the Strategy of Sustainable Development of Chemical Industry of Shandong Province. *Energy Procedia*, 5, 962–968. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2011.03.170>

Kang, P., & Xu, L. 2012. Water Environmental Carrying Capacity Assessment of an Industrial Park. *Procedia Environmental Sciences*, 13, 879–890. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2012.01.082>

Madanhire, I., & Mbohwa, C. 2016. Achieving Environmental Performance through Design for Environment (DFE) Process in Foundry Operations. *Procedia CIRP*, 40, 121–126. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2016.01.076>

Meng, F. Y., Fan, L. W., Zhou, P., & Zhou, D. Q. 2013. Measuring environmental performance in China's industrial sectors with non-radial DEA. *Mathematical and Computer Modelling*, 58(5), 1047–1056. <https://doi.org/10.1016/j.mcm.2012.08.009>

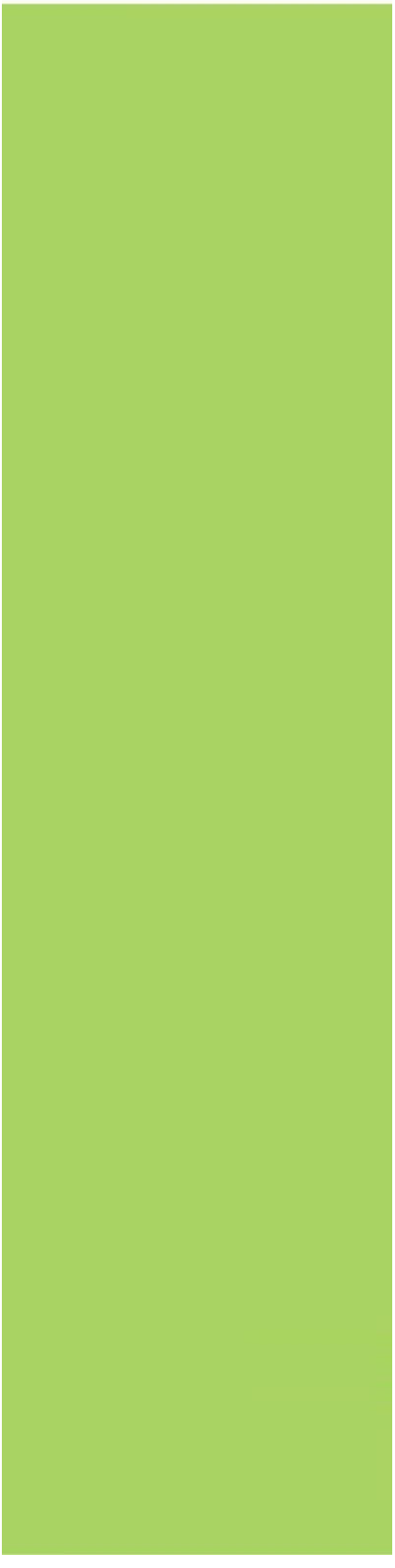
Nababan, E. S. M., Ibrahim, D., & Siahaan, N. 2017. Environmental Performance Indicators of Oleo-Chemical Based Industrial Park in Indonesia: The Conceptual Model. *International Journal of Applied Engineering Research*, 12(21), 11614–11623.

Said, E., & Aryanthi, D. 2013. MP3EI Dan Pembangunan Klaster Industri Kelapa Sawit Di Indonesia. *AGRIMEDIA MAGAZINE*. Retrieved from <http://publikasi.sb.ipb.ac.id/index.php/agrimedia/article/view/69>

Shokravi, S., Smith, A. J. R., & Burvill, C. R. 2014. Industrial environmental performance evaluation: A Markov-based model considering data uncertainty. *Environmental Modelling & Software*, 60, 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2014.05.024>

Viegas, M. 2005. *ENVIRONMENTAL PERFORMANCE EVALUATION ISO 14031 : 1999 and the future*.

Wenbo, L. 2011. Comprehensive evaluation research on circular economic performance of eco-industrial parks. *Energy Procedia*, 5, 1682–1688. <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2011.03.287>



Alamat Redaksi :

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. Singamangaraja No. 198 Medan 20126

Tel. (061) 7866225; 7883016; Fax. (061) 7866248

Email : inovasibpp@gmail.com

ISSN 1829-8079



9 771829 807965